KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Laporan Hasil Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 telah dapat diselesaikan. Dalam laporan ini dimunculkan gambaran fasilitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pelaksanaan pengumpulan data Risfaskes 2011 dilakukan pada bulan Mei-Desember 2011, di 33 Provinsi. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) mengerahkan sekitar 4000 enumerator yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, seluruh peneliti Balitbangkes, dosen Poltekkes, Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perguruan Tinggi.

Proses manajemen data mulai dari data dikumpulkan, kemudian dientri ke komputer, selanjutnya data *cleaning* dilakukan di Badan Litbangkes. Proses pengumpulan data dan manajemen data ini sungguh memakan waktu, stamina dan pikiran, sehingga tidaklah mengherankan bila diwarnai dengan dinamika kehidupan yang indah dalam dunia ilmiah.

Perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus atas semua kerja cerdas dan penuh dedikasi dari seluruh peneliti, litkayasa dan staf Balitbangkes, rekan sekerja dari BPS, para pakar dari Perguruan Tinggi, Penanggung Jawab Operasional dari jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh enumerator serta semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan Risfaskes. Simpati mendalam disertai doa kami haturkan kepada mereka yang mengalami kecelakaan sewaktu melaksanakan Rifaskes.

Secara khusus, perkenankan ucapan terima kasih kami dan para peneliti kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberi kepercayaan kepada kita semua, anak bangsa, dalam menunjukkan karya baktinya.

Kami telah berupaya maksimal, namun pasti masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan. Untuk itu kami mohon kritik, masukan dan saran, demi penyempurnaan Risfaskes dimasa yang akan datang.

Billahit taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, Desember 2012
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

DR. dr. Trihono, MSc.

RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL RISET FASILITAS KESEHATAN (RIFASKES) PUSKESMAS 2011
BADAN LITBANGKES, KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kemkes RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda), Puskesmas dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). *Supply* tersebut termasuk gedung, persediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, Sumber Daya Manusia (SDM), pedoman, pelatihan, anggaran dan sebagainya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 melakukan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder untuk mengetahui situasi terkini kecukupan dan ketepatan *supply*pada institusi-institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut diatas.

Kerangka pikir riset ini dikembangkan atas dasar konsep *Blum* (1974), *Donabedian* (2002), *Jacab* dan *WHO* 2000. Pada prinsipnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini dilakukan didalam dan diluar gedung institusi pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Semua kegiatan tersebut mempunyai komponen asupan (*input*), proses, luaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Komponen asupan inilah yang menjadi fokus utama Rifaskes 2011. Disamping itu, dalam Rifaskes 2011 ini dikumpulkan pula data esensial yang berhubungan dengan komponen proses dan luaran dari berbagai jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan baik oleh Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda maupun LKM.

Dengan demikian, Rifaskes 2011 memberikan gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply* di Puskesmas, RSU Pemerintah/Pemda dan LKM, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Gambaran/potret dan pemetaan ketersediaan *supply*tersebut tentunyadisesuaikan dengan fungsi yang diemban oleh ke tiga institusi pelaksana upaya kesehatan tersebut. Diharapkan riset ini juga akan menghasilkan Indeks Fasilitas dan Indeks Kinerja RSU Pemerintah/Pemda, Puskesmas dan LKM. Rifaskes 2011 mulai dilaksanakan sejak 2010. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan sosialisasi hasil dan analisis lanjut pada tahun 2012. Rifaskes 2011 dilaksanakan dengan menggunakan dana yang berasal dari DIPA Badan Litbangkes Kementerian kesehatan RI.

Laporan ini merupakan laporan hasil dari data fasilitas Puskesmas yang telah dikumpulkan melalui Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Puskesmas 2011. Sedangkan hasil Rifaskes 2011 untuk RSU Pemerintah/Pemda dan LKM dilaporkan secara tersendiri.

Rancangan Rifaskes Puskesmas 2011 adalah studi potong lintang *(cross sectional)*. Dilakukan secara sensus terhadap 9005 Puskesmas (berdasarkan data Ditjen BUK dan Pusdatin tahun 2010). Rancangan ini merupakan salah satu bagian dari rancangan Rifaskes 2011 secara keseluruhan.

Data yang dikumpulkan meliputi data input, proses, dan output upaya kesehatan di Puskesmas yang antara lain terdiri dari data fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, output esensial dan pelayanan kesehatan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Rifaskes Puskesmas 2011 yang terdiri dari 16 Blok. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan penilaian terhadap data sekunder.

Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik kesehatan (Poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi, ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilakukan : 1. Telaah dokumen (*document review*), 2. Pertemuan konsinyasi lintas program dan organisasi profesi, 3. Pertemuan pakar, 4. Penyusunan draft instrumen Rifaskes 2011, 5. Uji coba Instrumen, 6. Perbaikan dan finalisasi instrumen Rifaskes Puskesmas 2011, 7. Penyusunan *Plan of Action* (POA) pelaksanaan Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 8. Penyusunan pedoman instrumen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 9. Pertemuan Tim Manajemen Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 10. Rapat Koordinasi tingkat Provinsi, 11. Workshop/Pelatihan Fasilitator (*Master of Trainers*/MOT) Rifaskes 2011 tingkat Pusat (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 12. Workshop/Pelatihan Penanggung Jawab Teknis/PJT (*Training of Trainers*/ TOT) Kabupaten/Kota Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), 13. Workshop/Pelatihan Rifaskes Puskesmas 2011 untuk enumerator, 14. Pengumpulan data Rifaskes Puskesmas 2011, 15. Validasi studi, 16. Data RB/Editing/ Cleaning, 17. Analisa data, 18. Penulisan laporan akhir, 19. Diseminasi hasil Rifaskes 2011 (bersama-sama dengan RSU dan LKM), dan 20. Analisis lanjut

Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah I – IV (1 Korwil bertanggung jawab atas 8-9 Provinsi), tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes2011 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis RS Pemerintah, Puskesmas, LKM, Manajemen Data (Mandat) dan Analisis Data (Andat).

Validasi studi ini dilaksanakan oleh tiga Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) terkemuka di Indonesia yaitu FKM UI, FKM Unair dan FKM Unhas. Proses validasi dilaksanakan 1-2 minggu setelah enumerator mengumpulkan data. Hasilnya baik proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan mempunyai validitas rata 80% lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengumpulan data dan data yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 adalah valid.

Dari kuesioner Puskesmas di Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau yang telah terkumpul sebanyak 65, dan semuanya merupakan kuesioner Puskesmas yang memenuhi kriteria Rifaskes 2011 dan dipergunakan untuk analisis data dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Jumlah Puskesmas di perdesaan hamper sama dengan jumlah Puskesmas perkotaan yaitu masing masing 50,8 dan 49,2 persen. Dan 36,9 persen merupakan Puskesmas Perwatan. Hanya 33,9 persen Puskesmas yang merupakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).
- Analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya tenaga kesehatan seperti dokter, dan perawat. Sementara untuk tenaga dokter gigi hanya 87,7 persen, bidan 98,5 persen ,dan tenaga promkes hanya 27,7 persen. Untuk tenaga saintarian dan gizi masing-masing sebesar 84,6 persen dan 80,6 persen.
- Analisis diskriptif juga menunjukkan bahwa 92,3 persen bangunan Puskesmas merupakan bangunan permanen dengan kondisi semua bangunan baik atau rusak ringan 84,6 persen. Sebanyak 70,8 persen Puskesmas memiliki listrik 24 jam dan 60,0 persen Puskesmas memiliki air bersih.
- Untuk ketersediaan alat transportasi sebanyak 61,5 persen Puskesmas memiliki kendaraan roda 2, dan 67,7 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulans dan 76,9 persen Puskesmas memiliki pusling/ambulan/perahu bermotor. Sementara hanya 21,5 persen Puskesmas memiliki perahu bermotor dan 24,6 persen Puskesmas memiliki 3 roda 2 dan pusling/perahu bermotor.
- Sebesar 90,8 persen Puskesmas melaksanakan perencanaan tahunan, sebanyak 94,9 persen diantaranya memiliki dokumen RUK (Rencana Usulan Kegiatan) dan 96,6 persen memiliki dokumen RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan). Kegiatan Lokakarya Mini bulanan yang dilakukan Puskesmas adalah sebesar 67,7 persen dan hanya 40,0 persen Puskesmas yang melakukan Lokakarya Mini Triwulan, serta 64,6 persen puskesmas melaksanakan Penilaian Kinerja puskesmas.
- Untuk sistem informasi Puskesmas, hanya 10,8 persen Puskesmas yang memiliki jaringan computer antar ruang, 50,8 persen Puskesmas memiliki komputer tetapi tidak ada jaringan antar ruang, dan 55,4 persen Puskesmas menggunakan ICD X.
- Di dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Kepmenkes No. 128/2004 Puskesmas diwajibkan melaksanakan Upaya Kesehatan Wajib yang terdiri dari Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA/KB, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pngendalian Penyakit menular dan Pengobatan. Untuk kesesuaian penanggungjawab program sebanyak 23,1 persen Puskesmas memiliki penanggung jawab program promkes, 76,9 persen penanggungjawab program kesling, 96,9 persen penanggungjawab KIA/KB, 76,9 persen penanggungjawab perbaikan gizi masyarakat, 75,4 persen penanggungjawab pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan 73,8 persen penanggungjawab pengobatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- Pada kegiatan Program Promosi Kesehatan, , kegiatan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (90,8%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga (87,7%**),** Pembinaan UKBM (83,1%), Pembinaan Poskesdes (67,7%), Sebesar 61,5 persen Puskesmas telah melakukan keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan secara lengkap .

- Pada kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (83,1%), dan disusul oleh **Pe**meriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM) (81,5%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (78,5%), Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (75,4%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemeriksaan Jentik Nyamuk (64,6%) dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (21,5%). Di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,2 persen Puskesmas melakukan lengkap ketujuh kegiatan dalam Program Kesehatan Lingkungan

- Pada kegiatan Program kesehatan ibu, kegiatan P4K merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (92,3%) dan diikuti oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (78,5%), Kemitraan Bidan dan Dukun (60,0%), , dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (29,2%). Persentase Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan Program Kesehatan Ibu secara lengkap adalah sebesar 7,7 persen.

- Pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak, , kegiatan MTBS merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (78,5%) dan disusul oleh Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (73,8%), MTBM (64,6%), SDIDTK (56,95), PKPR (50,8%), Manajemen Asfiksia (46,2%), Kelas Ibu Balita (21,5%) dan KTA (15,4%). Persentase Puskesmas melakukan keseluruhan kegiatan di atas secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak sebesar 3,1 persen.
- Pada kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana, Konsultasi KB merupakan persentase tertinggi sebesar 96,9 persen, diikuti Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) (87,7%), Penanganan Komplikasi (61,5 persen).

- Pada kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, persentase tertinggi adalah kegiatan pemberian kapsul vitamin A pada Balita (100,0%), dan pemberian tablet besi pada ibu hamil (96,9%), penimbangan balita (100,0%), Pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan (86,2%), pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin (81,5%).

- Pada kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular, persentase tertinggi adalah TB Paru (100%), diikuti Diare (98,5), Malaria (96,9%), ISPA/Pneumonia (93,8%) dan Filariasis (89,5%), DBD (84,6%), Surveilans terpadu (75,4%), Kusta (58,5%), HIV/AIDS (44,6%), Rabies (23,1%), Schistosomiasis (1,5%).

- Pada kegiatan Program Imunisasi, kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas tertinggi adalah dengan frekuensi setiap hari (52,3%), diikuti frekuensi seminggu sekali (27,7%), dua hari dalam seminggu (6,2%), dan tiga hari dalam seminggu (3,1%).

- Pada Puskesmas perawatan PONED, 93,3 persen melakukan pelayanan PONED 24 jam

- Persentase Puskesmas dengan keberadaan UKBM yang terbanyak adalah Posyandu dan Peduli HIV-AIDs (100,0%), diikuti Posyandu Lansia (87,7%), Dana Sehat (30,8%), POD/WOD (21,5%), SBH (20,0%)Peduli Lansia (10,8%), Poskestren (9,2%), dan Peduli TB Paru (21,1%).
- Sekitar 55,8,4% Puskesmas memiliki kelengkapan jenis alat kesehatan poliklinik umum kurang dari 60% jumlah standard jenis alat poliklinik umum (56 alat). Untuk poliklinik KIA sebanyak 52,3% Puskesmas memiliki jenis alat kesehatan kurang dari 60%. Pada Puskesmas Perawatan PONED sebanyak 75,0% Puskesmas Perawatan PONED memiliki jenis alat kesehatan Poned kurang dari 46,7%.
- Untuk ketersediaan jenis obat umum di Poliklinik Umum, sebanyak 100% Puskesmas memiliki ketersediaan jenis obat umum kurang dari 80%. Sementara 80 persen Puskesmas Perawatan PONED memiliki ketersediaan jenis Obat PONED kurang dari 60%. Sementara untuk Pelayanan Obat KB, sebanyak 81,5% Puskesmas memiliki ketersediaan pelayanan obat KB kurang dari 60%.

Dari hasil-hasil diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi Kepulauan Riau telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Provinsi, kabupaten/kota maupun individual Puskesmas; 2. Baik input, dan proses upaya kesehatan di Puskesmas antara lain fasilitas, SDM, alat kesehatan, organisasi dan manajemen, pelayanan kesehatan yang berjalan, fungsi serta Indikator Mutu Esensial Puskesmas tahun 2010 diketemukan masih banyak berada dibawah standar yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Puskesmas dan kebijakan Kementerian Kesehatan lainnya; 3. Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan fungsi Puskesmas sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan masih jauh dari harapan; 4. Dari sudut program wajib upaya kesehatan Puskesmas, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONED, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi; dan 5. Terdapat disparitas input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang cukup tajam berdasarkan geografi, kota/desa dan regional.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah: 1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011 khususnya di Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau; 2. Perlu pemenuhan dan pengembangan segera dan secara prioritisasi terhadap input dan proses upaya kesehatan Puskesmas; 3. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi; 4. Pemenuhan dan penyempurnaan input dan proses pada program PONED pada seluruh Puskesmas perawatan harus segera dilaksanakan guna pencapaian RPJMN dan MDG; dan 5. Kesenjangan geografi, kota/desa dan regional dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan peran Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

DAFTAR SINGKATAN

AC	: Air Conditioner
AFP	: Acute Flaccid Paralysis
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome
Akbid	: Akademi Kebidanan
AKL	: Akademi Kesehatan Lingkungan
Akper	: Akademi Keperawatan
Akzi	: Akademi Gizi
Alkes	: Alat Kesehatan
AMP	: Audit Maternal Perinatal
ANC	: Antenatal Care
APN	: Asuhan Persalinan Normal
Askes	: Asuransi Kesehatan
Astek	: Asuransi Tenaga Kerja
Balita	: Bawah Lima Tahun
Balkesmas	: Balai Kesehatan Masyarakat
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BCG	: Bacille Calmete Guerin
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Binfar	: Bina Farmasi
BLU	: Badan Layanan Umum
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOR	:Bed Occupancy Rate
BP	: Balai Pengobatan
BPP	: Badan Penyantun Puskesmas
BSL	: Bio Safety Level
BTA	: Basil Tahan Asam
CMHN	: Community Mental Health Nursing
D1 Keb	: Diploma-1 Kebidanan
DIII	: Diploma-3
D-IV	: Diploma-4
DBD	: Demam Berdarah Dengue
DHF	: Dengue Hemorrhagic Fever
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DP3	: Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
DPT	: Difteri Pertusis Tetanus
DTP	: Dengan Tempat Perawatan

EKG	: Elektro Kardiogram
Email	: Electronic Mail
FIFO	: First In First Out
FEFO	: First Expired First Out
FK	: Fakultas Kedokteran
FKG	: Fakultas Kedokteran Gigi
FKM	: Fakultas Kesehatan Masyarakat
Gakin	: Keluarga Miskin
GKM	: Gugus Kendali Mutu
HB	: Hepatitis B
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
HP	: Handphone
ID	: Identitas
IMD	: Insiasi Menyusu Dini
ISO	: International Standard Organization
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Akut
IUD	: Intrauterine Device
Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk Teknis
KB	: Keluarga Berencana
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kepmenkes	: Keputusan Menteri Kesehatan
Kesling	: Kesehatan Lingkungan
Kesmas	: Kesehatan Masyarakat
KN	: Kunjungan Neonatus
Keswa	: Kesehatan Jiwa
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIPI	: Kejadian Ikutan Paska Imunisasi
KLB	: Kejadian Luar Biasa
KMS	: Kartu Menuju Sehat
Korwil	: Koordinator Wilayah
KTA	: Kekerasan Terhadap Anak

Lansia	: Lanjut Usia
LB	: Laporan Bulanan
Lokmin	: Lokakarya Mini
LOS	:Length of Stay
LP LPO	: Laporan Penerimaan dan Lembar Permintaan Obat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs	: Millennium Development Goals
MMD	: Musyawarah Masyarakat Desa
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MP ASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MTBM	: Manajemen Terpadu Bayi Muda
MTBS	: Manajemen Terpadu Balita Sakit
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Ormas	: Organisasi Massa
P2M	: Pengendalian Penyakit Menular
P4K	: Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
PA	: Pembantu Administrasi
PAH	: Penampungan Air Hujan
PAM	: Perusahaan Air Minum
PE	: Penyelidikan Epidemiologis
Perkesmas	: Perawatan Kesehatan Masyarakat
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
PGPS	: Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHN	: Public Health Nursing
PINERE	: Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
PJO	: Penanggungjawab Operasional
PJT	: Penanggungjawab Teknis
PKPR	: Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PMK	: Pengembangan Manajemen Kinerja
PMTCT	: Prevention of Mother to Child Transmission
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POA	: Plan of Action
POD	: Pos Obat Desa
Podes	: Potensi Desa
Polindes	: Pondok Bersalin Desa
PONED	: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif
Posbindu	: Pos Pembinaan Terpadu

Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
Promkes	: Promosi Kesehatan
Protap	: Prosedur Tetap
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
PUS	: Pasangan Usia Subur
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusling	: Puskesmas Keliling
Pustu	: Puskesmas Pembantu
PWS	: Pemantauan Wilayah Setempat
QA	: Quality Assurance
Rekmed	: Rekam Medik
Renstra	: Rencana Strategis
RI	: Rawat Inap
Rifas	: Riset Fasilitas
Rifaskes	: Riset Fasilitas Kesehatan
Rikhus	: Riset Khusus
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RJ	: Rawat Jalan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPK	: Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RS	: Rumah Sakit
RUK	: Rencana Usulan Kegiatan
RW	: Rukun Warga
S1 Kes	: Sarjana Strata-1 Kesehatan
S2 Kes	: Sarjana Strata-2 Kesehatan
SAA	: Sekolah Asisten Apoteker
SBH	: Saka Bhakti Husada
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDIDTK	: Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SIMPUS	: Sistem Manajemen Puskesmas
SK	: Surat Keputusan
SKp	: Sarjana Keperawatan
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMD	: Survei Mawas Diri
SMU	: Sekolah Menengah Umum
SOP	: Standard Operational Procedures

SP2TP : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas
SPAG : Sekolah Pembantu Ahli Gizi
SPAL : Sistem Pembuangan Air Limbah
SPK : Sekolah Perawat Kesehatan
SPM : Standar Pelayanan Minimal
SPM-BK : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
SPPH : Sekolah Pembantu Penilik Hygiene
SPR : Sekolah Pengatur Rawat
SPRG : Sekolah Pengatur Rawat Gigi
Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tb : Tuberkulosis
THT : Telinga, Hidung, Tenggorokan
TOGA : Tanaman Obat Keluarga
TPA : Tempat Pemrosesan Akhir
TPM : Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman
TT : Tetanus Toksoid
TTU : Tempat-tempat Umum

UCI : Universal Child Immunization
UKBM : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UKGS : Usaha Kesehatan Gigi Sekolah
UKGMD : Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa
UKK : Usaha Kesehatan Kerja
UKS : Usaha Kesehatan Sekolah
UKP : Upaya Kesehatan Pengembangan
UKW : Upaya Kesehatan Wajib
USG : Ultrasonografi
Usila : Usia Lanjut

VCCM : Vaccine Cold Chain Monitor
VCT : Voluntary Counseling and Testing
Vit-A : Vitamin A
VVM : Vaccine Vial Monitor

WOD : Warung Obat Desa

Yankes : Pelayanan Kesehatan
Yankespro : Pelayanan Kesehatan Reproduksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR SINGKATAN ix
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xxv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN 2
1.3. PERTANYAAN PENELITIAN 3
1.4. TUJUAN PENELITIAN 3
1.5. MANFAAT PENELITIAN 3
1.6. RUANG LINGKUP 3

BAB II KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR
2.1. BATASAN 5
2.2. KERANGKA KONSEP 5
2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS
2.3.1. Indikator Input 7
2.3.2. Indikator Proses 8
2.3.3. Indikator Output 9

BAB III METODE PENELITIAN
3.1. RANCANGAN PENELITIAN 11
3.2. POPULASI dan SAMPEL
3.2.1. Populasi Penelitian 11
3.2.2. Sampel Penelitian 11
3.3. RESPONDEN 12
3.4. PENGUMPULAN DATA
3.4.1. Jenis Data yang Dikumpulkan 12
3.4.2. Pengumpul Data 13
3.4.3. Cara Pengumpulan Data 13
3.5. PENGOLAHAN DATA 14
3.6. RINCIAN KEGIATAN
3.6.1. Tahap Persiapan 14
3.6.1.1. Telaah Dokumen (document review) 14
3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi 14
3.6.1.3. Pertemuan Pakar 14
3.6.1.4. Penyusunan Instrumen 15
3.6.1.5. Uji coba instrumen 15
3.6.1.6. Penyusunan Plan of Action (POA) Pelaksanaan..... 15

3.6.2. Tahap Pelaksanaan 15
3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan 15
3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen 16
3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen 16
3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi 17
3.6.2.5. Workshop Fasilitator Tingkat Pusat 18
3.6.2.6. Workshop Penanggungjawab Teknis Kabupaten/Kota 18
3.6.2.7. Workshop Enumerator 18
3.6.2.8. Pengumpulan Data 19
3.6.2.9. Validasi Studi 19
3.6.2.10. Pengolahan Data 19
3.6.2.11. Analisa Data 19

BAB IV HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS 21
4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS 22
4.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA ..... .23
4.4. SARANA DAN PRASARANA 25
4.5. ALAT TRANSPORTASI 27
4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS 28
4.6.1. Perencanaan Tahunan Lokakarya Mini.dan Penilaian Kinerja 28
4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas..... 30
4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM 31
4.8. PELAYANAN KESEHATAN 33
4.8.1. Program Promosi Kesehatan..... 33
4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan..... 33
4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan..... 34
4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan..... 36
4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan..... 37

4.8.2. Program Kesehatan Lingkungan..... 38
4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan..... 38
4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan..... .40
4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan..... 42
4.8.2.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan..... 43

4.8.3. Program Kesehatan Ibu..... 44
4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu 44
4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu ..... .45
4.8.3.3. Pedoman Program Kesehatan Ibu 46
4.8.3.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu..... 49

4.8.4. Program Kesehatan Bayi dan Anak 50
4.7.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 50
4.7.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 53
4.7.4.3. Pedoman ProgramKesehatan Bayi dan Anak..... 54
4.7.4.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak..... 56

4.8.5. Program Keluarga Berencana..... 57
4.8.5.1. Kegiatan Program Keluarga Berencana..... 57
4.8.5.2. Pelatihan Program Keluarga Berencana..... 58
4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana..... 59
4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana..... 61

4.8.6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 63
4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 63
4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 65
4.8.6.3. PedomanProgram Perbaikan Gizi Masyarakat 66
4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat..... 68

4.8.7. Program Pengendalian Penyakit Menular..... 70
4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular..... 70
4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular..... 72
4.8.7.3. Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular..... 73
4.8.7.4. Pengawasan, Evalusi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular.... 78

4.8.8. Program Imunisasi..... 79
4.7.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas..... 79
4.7.8.2. Pelatihan Program Imunisasi..... 81
4.7.8.3. Pedoman Program Imunisasi..... 82
4.7.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi..... 83

4.9. PELAYANAN PONED PUSKESMAS PERAWATAN ..... .84

4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 85

4.11. ALAT KESEHATAN DAN OBAT 92
4.11.1. Poliklinik Umum 92
4.11.2. Poliklinik KIA..... 93
4.11.3. Alat-alat Puskesmas PONED ..... .94
4.11.4. Alat-alat Imunisasi 95
4.11.5. Obat Umum ..... .96
4.11.6. Obat PONED ..... .96
4.11.7. Obat/Alat KB..... 97

BAB V. KESIMPULAN ..... .99

BAB VI. SARAN-SARAN..... 101

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN SK TIM RIFASKES 2011 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN KUESIONER PUSKESMAS RIFASKES 2011

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 3.1.	Jumlah Puskesmas per Kabupaten/Kota	11
Tabel 4.1.1.	Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	21
Tabel 4.1.2.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Lokasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	21
Tabel 4.1.3.	Jumlah dan Persentase Puskesmas menurut Jenis Puskesmas, Rifaskes 2011	22
FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS		
Tabel 4.2.1.	Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONED Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	23
SUMBER DAYA MANUSIA		
Tabel 4.3.1.a.	Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	24
Tabel 4.3.1.b.	Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	25
SARANA DAN PRASARANA		
Tabel 4.4.1.	Persentase Puskesmas dengan menurut Jenis dan Kondisi Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	26
Tabel 4.4.2.	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 Jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Ridaskes 2011	26
ALAT TRANSPORTASI		
Tabel 4.5.1	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	27
MANAJEMEN PUSKESMAS		
Tabel 4.6.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Perencanaan dan Penilaian Kinerja Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	28
Tabel 4.6.1.2.	Persentase Puskesmas menurut Penggerakan Pelaksanaan Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	29

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.6.1.3.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dalam menyusun RKT di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	29
Tabel 4.6.2.1..	Persentase Puskesmas Menurut Sistem Informasi Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	30
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM		
Tabel 4.7.1.a.	Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	31
Tabel 4.7.1.b.	Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	32
PELAYANAN KESEHATAN		
Tabel 4.8.1.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	34
Tabel 4.8.1.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Pelatihan Program Promosi Kesehatan pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	35
Tabel 4.8.1.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	36
Tabel 4.8.1.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Penerimaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	37
Tabel 4.8.2.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	39
Tabel 4.8.2.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	40
Tabel 4.8.2.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	41
Tabel 4.8.2.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Kepemilikan Pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	42
Tabel 4.8.2.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	43

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.3.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	45
Tabel 4.8.3.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu pada Tahun 2009-2010, Rifaskes 2011	46
Tabel 4.8.3.4.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	47
Tabel 4.8.3.4.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Pedoman untuk Melaksanakan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	48
Tabel 4.8.3.5.1.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	49
Tabel 4.8.4.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	51
Tabel 4.8.4.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	52
Tabel 4.8.4.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak pada Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	53
Tabel 4.8.4.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	54
Tabel 4.8.4.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	55
Tabel 4.8.4.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	56
Tabel 4.8.5.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	58
Tabel 4.8.5.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	59
Tabel 4.8.5.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	60
Tabel 4.8.5.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	61

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.5.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	62
Tabel 4.8.6.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	63
Tabel 4.8.6.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	64
Tabel 4.8.6.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	65
Tabel 4.8.6.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	66
Tabel 4.8.6.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	67
Tabel 4.8.6.3.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	68
Tabel 4.8.6.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	69
Tabel 4.8.7.1.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	70
Tabel 4.8.7.1.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	71
Tabel 4.8.7.1.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	72
Tabel 4.8.7.2.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	73
Tabel 4.8.7.2.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	74
Tabel 4.8.7.2.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	75

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.8.7.3.1.a.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	76
Tabel 4.8.7.3.1.b.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	77
Tabel 4.8.7.3.1.c.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	77
Tabel 4.8.7.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	79
Tabel 4.8.8.1.1.	Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	80
Tabel 4.8.8.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	81
Tabel 4.8.8.3.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	82
Tabel 4.8.8.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	83
PELAYANAN PONED		
Tabel 4.9.1.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED, Rifaskes 2011	84
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
Tabel 4.10.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	85
Tabel 4.10.2.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan tentang pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	86
Tabel 4.10.3.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusu Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	86
Tabel 4.10.4.a.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	87

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
Tabel 4.10.4.b.	Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	88
Tabel 4.10.5.	Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	89
Tabel 4.10.6.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	90
Tabel 4.10.7.a.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	90
Tabel 4.10.7.b.	Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	91
ALAT KESEHATAN DAN OBAT DALAM GEDUNG		
Tabel 4.11.1.1.	Persentase Puskesmas menurut kelengkapan Ketersediaan jenis Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	92
Tabel 4.11.2.1.	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapanr Ketersediaan jenis Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	93
Tabel 4.11.3.1.	Persentase Puskesmas Poned menurut Kelengkapan Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan PONED di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	94
Tabel 4.11.4.1.	Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	95
Tabel 4.11.5.1	Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Jenis Obat Umum di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	96
Tabel 4.11.6.1.	Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut kelengkapan Ketersediaan jenis Obat PONED di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	97
Tabel 4.11.7.1.	Persentase Puskesmas Menurut Skor Ketersediaan Pelayanan Obat KB Di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011	98

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1.	Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011	6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hak atas kesehatan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28A menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Selanjutnya, dalam pasal 28 H ayat 1, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*, pasal 34 ayat 1, *"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"*, dan pasal 34 ayat 3, *"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 (pasal 10) dan PP Nomor 38 tahun 2007, penyelenggaraan urusan kesehatan di Indonesia merupakan sinergi antara peran pemerintah daerah dan pusat. Sistem Kesehatan Nasional menetapkan Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan (Kepmenkes 274 tahun 2009). Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan bagian dari pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keberadaan Rumah Sakit dan Puskesmas juga menjadi bagian dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, setidaknya terkait dengan Bab V (Bagian Kedua) mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Bab VI mengenai Upaya Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mengatur hal yang esensial tentang Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara Nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan, tapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah desa/kelurahan/RW. Masing masing Puskesmas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk menjangkau seluruh wilayah kerjanya Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling. Untuk daerah yang jauh dari sarana pelayanan rujukan Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.

Fungsi Puskesmas :

1. Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
   Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap pembangunan di wilayah kerjanya.
2. Pusat pemberdayaan Masyarakat
   Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat , keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif

dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayaannya serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan berdayaan masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat Pelayanan kesehatan Strata pertama, yang meliputi:
   - Pelayanan kesehatan perorangan
   - Pelayanan kesehatan masyarakat

Dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra – Kemenkes) 2010 -2014, maka dukungan kebijakan yang tepat dalam hal Upaya Kesehatan menjadi suatu hal yang penting. Kebijakan yang tepat hanya akan diperoleh bila didasarkan pada bukti yang kuat dan sahih (*evidence based policy*). Melalui kebijakan yang tepat maka perencanaan program secara konkuren di setiap tingkat administrasi Pemerintahan dan intervensi yang dilakukan akan lebih efektif.

Informasi yang dibutuhkan agar penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilakukan secara tepat, belum tersedia secara akurat, *up to date* dan memadai. Selain itu, saat ini belum tersedia peta status terkini tentang fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium) dan kinerjanya pada pada tingkat wilayah dan Nasional. Penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan di masa datang yang kompleks (Jaminan Kesehatan Masyarakat/ Jamkesmas) memerlukan informasi tentang *supply* pelayanan kesehatan agar tujuan tercapai optimal.

Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2011 merupakan salah satu riset kesehatan Nasional yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI, disamping Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Riset Khusus Kesehatan (Rikus). Rifaskes 2011 dilaksanakankan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Klinik Mandiri (LKM). Buku ini membahas secara khusus mengenai pelaksanaan dan hasil Riset Fasilitas Kesehatan pada fasilitas kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan tahun 2011.

1.2. PERTANYAAN KEBIJAKAN

Supply apa yang dibutuhkan (fasilitas, SDM, peralatan kesehatan dan pelayanan kesehatan) agar institusi pelayanan kesehatan baik pusat maupun daerah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan RPJMN Bidang Kesehatan 2010-2014, MDGs 2015, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK), *Universal Coverage*, dan akselerasi pencapaian pembangunan kesehatan.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu Puskesmas, termasuk SDM, alat kesehatan (alkes) penting dan canggih dan penyediaan pelayanannya pada pada tingkat wilayah dan Nasional
2. Bagaimana distribusi *supply* pelayanan kesehatan di berbagai wilayah

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Diperolehnya informasi terkini tentang *supply* pelayanan kesehatan, yaitu fasilitas (Puskesmas), termasuk Sumber Daya Manusia, peralatan kesehatan penting dan penyediaan pelayanannya pada tingkat wilayah dan Nasional (*stock opname*).
2. Diperolehnya peta ketersediaan *supply* fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) di berbagai wilayah (kabupaten/kota/propinsi)
3. Diperolehnya Indeks Kinerja Puskesmas

1.5. MANFAAT PENELITIAN

1. Mendukung pencapaian Universal Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan menyediakan data fasilitas (Puskesmas) terkait dengan paket pelayanan kesehatan yang dapat diberikan (*benefit package*).
2. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan revitalisasi Puskesmas.
3. Memungkinkan Pemerintah Pusat/Provinsi mengalokasi bantuan/peran kepada daerah berdasar evidens secara optimal.
4. Memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan supply pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
5. Dapat digunakan dasar bagi perencanaan fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai tingkat administrasi pemerintahan.
6. Menghasilkan peta yang terintegrasi antara masalah kesehatan dan penyediaan pelayanan kesehatan berdasarkan berbagai riset/informasi yang relevan (riskesdas, Rifaskes, Podes, Susenas dll).
7. Mendorong kegiatan riset *follow up* yang lebih tajam dan terarah.

1.6. RUANG LINGKUP

Secara keseluruhan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) ini dilakukan di seluruh Rumah Sakit Umum Pemerintah, di seluruh Puskesmas, dan di seluruh Laboratorium Klinik Mandiri di Indonesia. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2010, sedangkan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2011.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR

2.1. BATASAN

Riset Fasilitas Kesehatan merupakan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder tentang kecukupan (adekuasi) dan ketepatan (*appropriateness*) penyediaan fasilitas kesehatan dan kinerjanya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang disediakan oleh swasta yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan, baik yang ditujukan untuk memberikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), rawat jalan, rawat inap, serta melingkupi strata I, II, dan III. Fasilitas kesehatan strata pertama meliputi antara lain Puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan serta fasilitas laboratorium Pelayanan Mandiri. Termasuk fasilitas kesehatan strata kedua dan ketiga antara lain Balai kesehatan mata masyarakat, Balai pengobatan penyakit paru, Balai kesehatan indera masyarakat, Balai besar kesehatan paru masyarakat, RS Pemerintah dan swasta.

Berdasarkan tingkat kepentingannya (urgensi), maka Riset Fasilitas Kesehatan pertama ini ditujukan untuk Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium pelayanan kesehatan mandiri.

2.2. KERANGKA KONSEP

Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan mengacu pada Konsep HL. Blum mengenai *"Health Determinant"*, Konsep *"Organization System"* Donabedian dan Konsep Jakab mengenai *"Organizational Reform"*.

Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan kerangka konsep seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Riset Fasilitas Kesehatan 2011

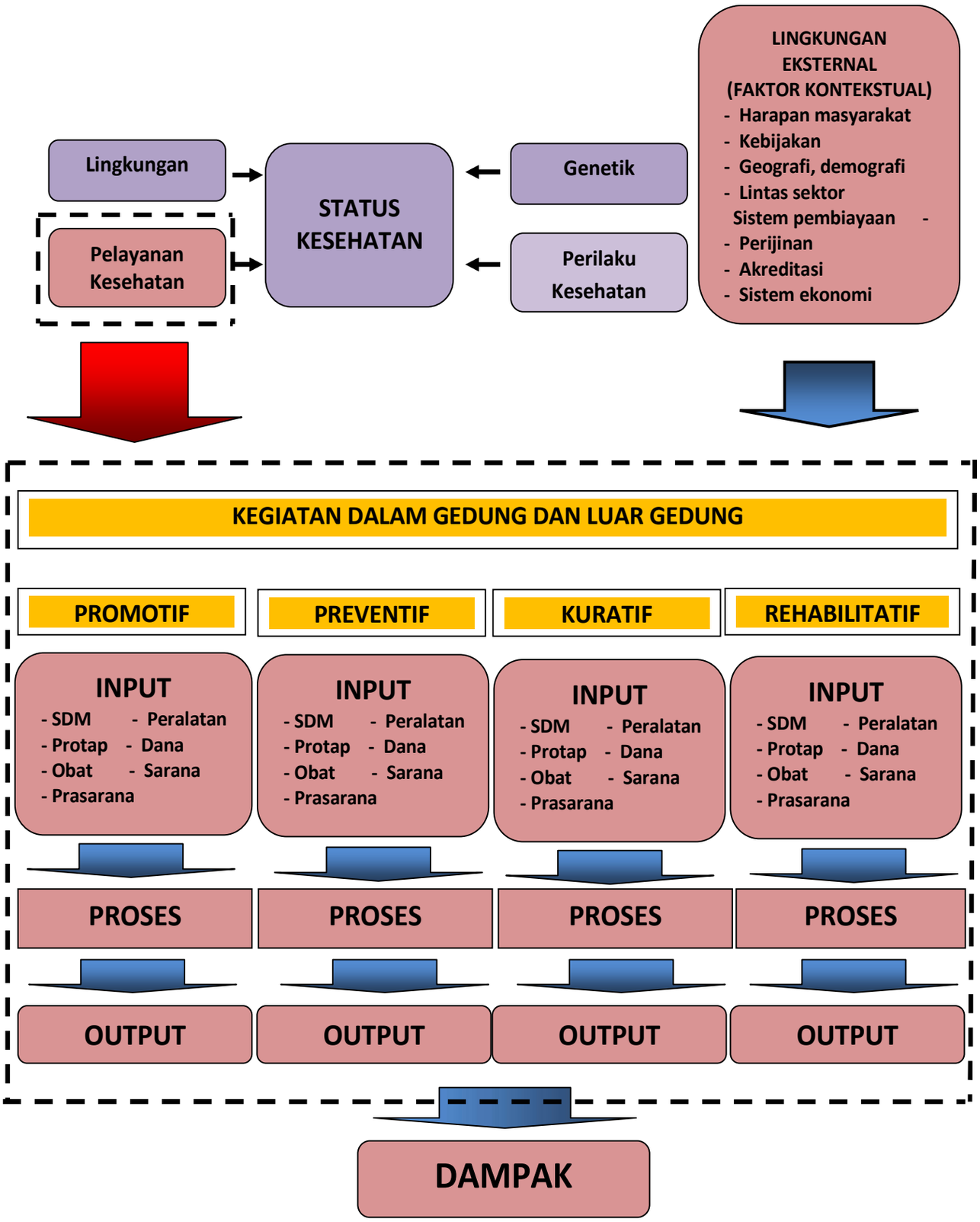

Dimodifikasi dari : ***Blum, Donabedian, dan Jakab***

HL. Blum menyebutkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) determinan kesehatan, yakni Perilaku Kesehatan, Genetik, Lingkungan, dan Pelayanan Kesehatan. Riset Fasilitas terkait erat dengan determinan pelayanan kesehatan seperti yang dimaksud oleh Blum. Konsep ini dipadukan dengan pendekatan kesisteman organisasi yang dikemukakan oleh Donabedian, yang meliputi Input (Masukan), Proses, Output (Luaran), dan *Outcome* (Dampak). Secara khusus, Jakab menjabarkan komponen kesisteman organisasi Donabedian dalam konteks elemen-elemen yang mempengaruhi Fasilitas Kesehatan.

2.3. PENGEMBANGAN INDIKATOR PUSKESMAS

2.3.1. INDIKATOR INPUT

Indikator-indikator Input untuk Puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Organisasi, meliputi:
   1. Struktur
   2. Fungsi
   3. Jejaring
   4. Luas wilayah
   5. Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

B. Peraturan/kebijakan, meliputi:
   1. SPO/Protap pelayanan
   2. Surat Edaran, Pedoman, Surat Keputusan

C. Sumber Daya Puskesmas, meliputi:
   1. Sumber Daya Manusia: jumlah, kualifikasi, status kepegawaian, pendidikan, pelatihan
   2. Fasilitas bangunan: kondisi bangunan, jenis ruang pelayanan, jenis ruang non pelayanan, sarana air, toilet, listrik, jaringan telepon, internet
   3. Alat transportasi: kendaraan roda empat, roda dua, perahu bermotor, dan lain-lain. Penilaian mengenai alat transportasi ini termasuk jumlah dan kondisi dari alat transportasi tersebut.
   4. Alat kesehatan: jenis, jumlah, dan kondisi
   5. Obat-obatan: jenis dan jumlah
   6. Buku Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Prosedur Operasional untuk Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan
   7. Dana operasional Puskesmas: Alokasi dan Realisasi

2.3.2. INDIKATOR PROSES

Indikator-indikator proses untuk Puskesmas diklasifikasikan ke dalam kelompok:

A. Perencanaan (P1), meliputi keberadaan dokumen perencanaan:
   1. Bulanan,
   2. Tribulanan, dan
   3. Tahunan

B. Penggerakan dan Pelaksanaan, meliputi:
   1. Dokumen pencatatan dan pelaporan, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) dan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)
   2. Pembagian tugas/pekerjaan jelas dan tertulis
   3. Pembagian daerah binaan
   4. Penetapan penanggung jawab Program

C. Pembinaan dan pengawasan penilaian, meliputi:
   1. Bimbingan
   2. Monitoring: Terencana, Insidentil, metode
   3. Evaluasi: Penilaian Kinerja

D. Manajemen operasional Puskesmas, meliputi:
   1. Membuat data pencapaian/cakupan kegiatan pokok tahun lalu
   2. Menyusun RUK melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
   3. Menyusun RPK secara rinci dan lengkap
   4. Melaksanakan lokakarya mini bulanan
   5. Melaksanakan lokakarya mini tribulanan (lintas sektoral)
   6. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke Kabupaten/kota
   7. Program Jaminan Mutu
   8. Penilaian kepuasan pasien

E. Manajemen alat dan obat, meliputi:
   1. Membuat kartu inventarisasi dan menempatkan di masing-masing ruangan
   2. Melaksanakan up dating daftar inventaris alat
   3. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat/bahan di gudang secara rutin
   4. Menerapkan pendekatan *First In First Out* (FIFO) dan FEFO

2.3.3. INDIKATOR OUTPUT

A. Utilisasi *(outreach)*

1. Dalam gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan didalam gedung, misalnya pemeriksaan gigi.
2. Luar gedung, artinya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di masyarakat, misalnya Puskesmas keliling, imunisasi.

B. Target cakupan pelayanan kesehatan

1. Upaya kesehatan wajib
   (1) Promosi Kesehatan,
   (2) Kesehatan lingkungan,
   (3) KIA,
   (4) Upaya perbaikan gizi masyarakat,
   (5) Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
   (6) Upaya pengobatan.

2. Upaya kesehatan pengembangan (penambahan atau inovasi) :
   (1) Rawat inap dan PONED
   (2) Usaha Kesehatan Sekolah
   (3) Kesehatan Gigi dan Mulut
   (4) Kesehatan usia lanjut,
   (5) Upaya kesehatan mata,
   (6) Kesehatan jiwa,
   (7) Kesehatan olah raga,
   (8) Perawatan Kesehatan Masyarakat,
   (9) Pembinaan Pengobatan Tradisional,
   (10) Kesehatan kerja
   (11) Kesehatan haji

3. Layanan Penunjang, meliputi:
   (1) Laboratorium
   (2) Farmasi
   (3) Gawat darurat bencana
   (4) Puskesmas keliling

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan Riset Fasilitas Kesehatan adalah studi potong lintang *(cross sectional)*.

3.2. POPULASI dan SAMPEL

3.2.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi penelitian adalah Puskesmas di seluruh Provinsi Kepulauan Riau.

3.2.2. SAMPEL PENELITIAN

Pada perencanaan awal, sampel penelitian adalah seluruh Puskesmas yang terdaftar di Pusdatin yaitu 66 seperti terlihat pada tabel 3.1. Namun sesudah dilaksanakan rapat kordinasi teknis dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disepakati sampel Puskesmas adalah semua Puskesmas yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Sensus). Puskesmas yang akan didatangi hanya Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum bulan Februari 2010, sedangkan Puskesmas lainnya informasinya diambil di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota saja. Hasil pengumpulan data dari 65 Puskesmas, Semuanya (65) Puskesmas yang dianalisis yaitu Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

Tabel 3.1.
Jumlah Puskesmas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS
1	KABUPATEN KARIMUN	9
2	KABUPATEN BINTAN	12
3	KABUPATEN NATUNA	12
4	KABUPATEN LINGGA	7
5	KABUPATEN KEP. ANAMBAS	7
6	KOTA BATAM	13
7	KOTA TANJUNG PINANG	6
KEPULAUAN RIAU		**66**

Sumber: Pusdatin, 2010

3.3. RESPONDEN

Responden di Puskesmas meliputi :

1. Kepala Puskesmas
2. Staf Puskesmas terkait
3. Pengelola informasi Puskesmas

3.4. PENGUMPULAN DATA

3.4.1. JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Secara umum data yang dikumpulkan meliputi: Identitas tempat, karakteristik, Input (sumber daya manusia, fasilitas fisik, peralatan, pedoman dan ketatausahaan), proses (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, pengawasan penilaian dan pengendalian), dan out kegiatan.

Kuesioner Puskesmas terdiri dari 16 Blok sebagai berikut :

Blok I	:	Pengenalan Tempat
Blok II	:	Keterangan Pengumpul Data
Blok III	:	Karakteristik Puskesmas
Blok IV	:	Sumber Daya Manusia
Blok V	:	Fasilitas Fisik
Blok VI	:	Ketatausahaan (Tu)
Blok VII	:	Manajemen
Blok VIII	:	Pelayanan Kesehatan
Blok IX	:	Pelayanan Rawat Inap
Blok X	:	Puskesmas Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Blok XI	:	A. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat B. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Puskesmas Sebagai Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan
Blok XII	:	Pustu Dan Bidan Desa
Blok XIII	:	Jaringan Pelayanan Kesehatan Dasar
Blok XIV	:	Rumah Dinas
Blok XV	:	Alat Kesehatan Dalam Gedung
Blok XVI	:	Alat Kesehatan Luar Gedung

3.4.2. PENGUMPUL DATA

Pengumpul data adalah petugas yang direkrut Badan Litbangkes, yang berasal dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes), kalangan Universitas (perguruan tinggi), Dinas kesehatan Kabupaten/Kota ataupun masyarakat umum yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Petugas pengumpul data di Puskesmas harus memenuhi kualifikasi latar belakang pendidikan D3 di bidang kesehatan. Sebelum melakukan pengumpulan data, setiap petugas mendapat pelatihan terlebih dahulu.

3.4.3. CARA PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan faktor penentu dan bagian penting dari rangkaian kegiatan survei sehingga data yang dikumpulkan terhindar dari bias, akurat, valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. *Interview* (wawancara) dengan menggunakan kuesioner
2. Pengamatan/ observasi langsung
3. Data sekunder, dikumpulkan dengan memperhatikan/ *check* dokumen yang ada di Puskesmas.

Pada pengumpulan data, enumerator/ pengumpul data diharuskan memperhatikan etika sebagai berikut

1. Tim pengumpul data harus menghormati norma sosial setempat. Upayakan agar kunjungan ke Puskesmas dapat diatur sedemikian rupa sehingga seluruh responden sedang berada di tempat. Oleh karena itu, enumerator harus membuat perjanjian waktu terlebih dahulu sebelum berkunjung.
2. Pada waktu menggali informasi dari responden, pewawancara harus menciptakan suasana yang baik. memperhatikan dan bersikap netral terhadap respons dari responden, tidak memberi kesan memaksa. tidak emosi, tidak mengarahkan, dapat menghindari percakapan yang menyimpang atau bertele-tele. meminta izin sebelumnya untuk pertanyaan yang sensitif.
3. Setelah selesai melakukan wawancara, mengucapkan terima kasih pada saat berpamitan.

Untuk mengendalikan mutu hasil wawancara dilakukan hal seperti berikut:

1. Tim pewawancara harus bekerjasama dengan baik selama melaksanakan tugas di lapangan. Ketua Tim (Katim) harus dapat membagi tugas lapangan (dalam proses pengumpulan data) secara seimbang, baik untuk dirinya sendiri dan maupun untuk anggota tim pengumpul data yang lain.
2. Semua enumerator bertanggung jawab melakukan editing terhadap hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan harus diverifikasi oleh Katim, segera setelah pengumpulan data dianggap selesai. Ketua tim meneliti ***kelengkapan dan konsistensi*** jawaban pada kuesioner yang telah diisi, segera setelah diserahkan oleh pewawancara.
3. Kualitas yang tinggi dari data yang dikumpulkan dapat dicapai apabila wawancara sudah diverifikasi dengan observasi yang cermat dan dilakukan mengikuti prosedur yang benar.

4. Apabila dalam hal-hal tertentu ada permasalahan dalam pengisian kuesioner yang tidak bisa diselesaikan oleh tim, maka tim segera menghubungi Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota dan akan didiskusikan bersama dengan PJO Kabupaten/Kota, jika perlu berkoordinasi dengan PJT dan atau PJO Provinsi.

Kuesioner yang sudah selesai diedit oleh Ka Tim, diserahkan pada PJT Kab/Kota untuk selanjutnya dibawa ke Tim Manajemen Data. Sementara kuesioner yang belum terisi lengkap saat PJT Kab/Kota kembali ke Pusat, dilengkapi dan diserahkan kepada PJT Kab/Kota. Untuk selanjutnya dikirim via pos/paket ke Tim Manajemen Data.

3.5. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data yang direncanakan meliputi:

1. Deskriptif Nasional dan Provinsi
2. Peta wilayah
3. Analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, *apropriateness*, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu.
4. Penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas

Buku ini hanya memuat hasil analisis deskriptif.

3.6. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan di dalam Riset Fasilitas Kesehatan ini meliputi:

3.6.1. TAHAP PERSIAPAN

3.6.1.1. Telaah Dokumen (*document review*)

Kegiatan ini diperlukan untuk menyusun protokol pelaksanaan penelitian, agar data yang dkumpulkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3.6.1.2. Pertemuan Konsinyasi Lintas Program dan Organisasi Profesi

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan lintas program dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011. Pada pertemuan ini antara lain menghasilkan:

a. Indikator-indikator kinerja Puskesmas dari unit-unit utama Kementerian Kesehatan yang terkait dan Organisasi Profesi
b. Tersosialisasinya rencana kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011
c. Adanya pemahaman tentang perlu dan manfaat dari kegiatan Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011

3.6.1.3. Pertemuan Pakar

Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dari para pakar dalam pengembangan indikator RIFAS 2011.

Pada pertemuan ini dihasilkan antara lain:

a. Perumusan indikator Rifas 2011 untuk Puskesmas
b. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
c. Pengembangan jejaring dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
d. Masukan pakar dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011

3.6.1.4. Penyusunan Instrumen

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun instrumen penelitian Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011, meliputi instrumen RIFAS Puskesmas. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dan berbagai masukan yang diterima melalui serangkaian pertemuan (diskusi). Kuesioner Puskesmas dikembangkan dengan mempertimbangkan jenis (Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dan non rawat inap) dan lokasi (perkotaan dan perifer) Puskesmas.

3.6.1.5. Uji coba instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai validitas dan realiabilitas draft instrumen Riset Fasilitas 2011. Tujuan kegiatan uji coba instrumen adalah:

a. Diperoleh hasil uji coba instrumen riset fasilitas pelayanan kesehatan
b. Diperolehnya gambaran untuk manajemen data hasil penelitian
c. Diperolehnya masukan-masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan instrumen

Uji coba kuesioner Puskesmas dilakukan di 21 Puskesmas yang berbeda dengan mempertimbangkan keterwakilan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap (dengan tempat tidur) dan Puskesmas non rawat inap (non tempat tidur), daerah perkotaan (urban) dan daerah perifer (*remote*). Puskesmas yang menjadi sampel dalam uji coba instrumen untuk masing-masing Provinsi: 1 Puskesmas perawatan dan 2 *non*perawatan (1 di perkotaan dan 1 di *remote area*) di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

3.6.1.6. Penyusunan *Plan of Action* (POA) Pelaksanaan

Tujuan pertemuan ini adalah tersusunnya perencanaan pelaksanaan *(plan of action)* Riset Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2011.

3.6.2. TAHAP PELAKSANAAN

Riset Fasilitas dilaksanakan pada tahun 2011. Pengumpulan data dilakukan antara bulan Juli sampai dengan pertengahan Oktober 2011. Pengorganisasian Rifaskes 2011 meliputi tingkat Pusat, tingkat Wilayah, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota. Susunan organisasi Rifaskes tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Manajemen, Tim Teknis, Tim Manajemen Data (Mandat) dan Tim Analisis Data (Andat).

3.6.2.1. Pengorganisasian Lapangan

Untuk memudahkan pengumpulan data dan menjaga kualitas data pelaksanaan pengumpulan dibagi dalam 4 wilayah. Setiap koordinator wilayah bertanggung jawab pada 8-9 propinsi. Koordinator Wilayah (korwil) terdiri dari Ketua, 1-2 orang Wakil Ketua, Penanggung Jawab Teknis Provinsi (PJT) dan Penanggung Jawab Administrasi.

Korwil 1. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Pusat 1) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulsel, dan Papua.

Korwil 2. Pusat Teknologi Kesehatan Terapan dan Epidemiologi Klinik (Pusat 2) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat.

Korwil 3. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat (Pusat 3) bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan Rifas di sembilan (9) provinsi, yaitu: Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Korwil 4. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusat 4) bertanggung jawab menggkoordinasi kegiatan Rifas di delapan (8) provinsi, yaitu: Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

3.6.2.2. Penyusunan Pedoman Instrumen

Sebagai perlengkapan pengumpulan data terlebih dahulu disiapkan formulir yang akan diisi oleh petugas. Sebagai pedoman cara pengisian formulir dibuat pedoman teknis instrumen Riset Fasilitas 201. Pada pengumpulan data ini dibuat 4 pedoman teknis yaitu: pedoman teknis instrumen Puskesmas Riset Fasilitas 2011, serta pedoman teknis pertanggungjawaban keuangan Riset Fasilitas 2011. Pedoman Instrumen Riset fasilitas 2011 diperlukan sebagai acuan agar terjadi kesamaan di dalam definisi operasional dan pemaknaan dari instrumen yang sudah disusun.

Penyusunan pedoman instrumen dimaksudkan sebagai bagian dari upaya jaga mutu yang dilakukan agar data yang dikumpulkan didasarkan pada kesamaan pemahaman dari enumerator yang akan menghasilkan data yang valid. Penyusunan pedoman instrumen dilakukan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan narasumber terkait dan kerja tim sehingga menghasilkan pedoman instrumen yang meliputi instrumen untuk pengambilan data Puskesmas.

3.6.2.3. Pertemuan Tim Manajemen

Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin pelaksanaan Riset Fasilitas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pertemuan ini dihasilkan yaitu :

a. Rencana teknis pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
b. Identifikasinya potensi permasalahan dan masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.
c. Identifikasinya alternatif-alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011.

Pertemuan tim manajemen merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Pada tahap-tahap awal, pertemuan tim manajemen dilakukan untuk mematangkan perencanaan dan mempersiapkan penunjang pelaksanaan Rifas. Ketika Rifas berjalan, pertemuan tim manajemen dilakukan dengan maksud melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan tim internal manajemen melibatkan tim inti, tim manajemen data, dan tim administrasi. Pelaksana kegiatan adalah Tim Riset Fasilitas 2011.

3.6.2.4. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi

Rapat koordinasi tingkat Provinsi bertujuan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011 di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa tujuan khusus rapat Koordinasi antara lain :

a. Sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
b. Teridentifikasinya faktor penghambat dalam pelaksanaan Rifas 2011
c. Teridentifikasinya faktor penunjang dan potensi untuk pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
d. Tersusunnya alternatif pemecahan untuk mengatasi faktor penghambat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Riset Fasilitas 2011
e. Tersusunnya rencana pelaksanaan dan mekanisme kerja Riset Fasilitas 2011 di setiap daerah
f. Tersedianya tenaga penanggungjawab operasional Rifas 2011 di setiap daerah

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 tingkat Provinsi dilaksanakan di seluruh Provinsi dan dilakukan di ibukota Provinsi. Rapat ini diikuti oleh pelaksana Riset Fasilitas 2011 (tim pusat yang terdiri dari ketua dan wakil penanggungjawab propinsi, tim administrasi , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi.

Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 diikuti oleh pimpinan instiitusi terkait dengan harapan akan dilakukan sosialisasi dan persiapan pelaksanaan Riset Fasilitas di masing-masing fasilitas kesehatan yang dipimpinnya atau di setiap Puskesmas yang berada di wilayah kerjanya. Kegiatan Rapat Koordinasi Riset Fasilitas 2011 dilakukan di ibukota 33 Provinsi di Indonesia. Sebagai pelaksana kegiatan adalah seluruh Satuan kerja (satker) di lingkungan Badan Litbang Kesehatan.

3.6.2.5. *Workshop* Fasilitator Tingkat Pusat

Workshop fasilitator Riset Fasilitas dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya pendelegasian dan penyebarluasan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 mengingat rentang kendali *(span of control)* kegiatan Rifas 2011 yang cukup lebar. Tujuan dari kegiatan ini agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan materi dan arahan mengenai Riset Fasilitas pada Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota dan enumerator Riset Fasilitas 2011, dan memahami substansi, instrumen yang digunakan, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011. Melalui kegiatan ini peserta mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi.

Workshop diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) Provinsi Riset Fasilitas 2011, Koordinator Wilayah, dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

3.6.2.6. *Workshop* Penanggung jawab Teknis Kabupaten/Kota

Tujuan *workshop* agar peserta *workshop* mampu untuk memberikan pemahaman mengenai substansi dan pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011 pada enumerator. Melalui kegiatan ini, peserta *workshop* mampu memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop penanggungjawab teknis kabupaten/kota diikuti oleh seluruh Penanggungjawab Teknis (PJT) kabupaten/kota, Koordinator Wilayah, pembantu administrasi (PA) dan panitia. Pelatihan dilakukan selama 7 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Workshop ini khususnya ditujukan untuk PJT kabupaten/kota dan tenaga Pembantu Administrasi (PA). *Workshop* untuk PJT kabupaten/kota dilakukan oleh fasilitator tingkat pusat dengan dukungan dari Tim Manajemen Rifas 2011. Peserta *workshop* dapat memberikan pengarahan dan pemahaman untuk enumerator. Hal ini dilakukan mengingat akan ada sekitar 3352 enumerator Riset Fasilitas 2011 yang direkrut sehingga perlu adanya penyamaan pemahaman pelaksanaan Riset Fasilitas kepada PJT kabupaten/kota yang selanjutnya akan terlibat di dalam pelaksanaan *workshop* untuk enumerator.

3.6.2.7. *Workshop* Enumerator

Workshop untuk enumerator dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyamaan pemahaman substansi Riset Fasilitas 2011 kepada enumerator Rifas 2011. Dengan pemahaman yang baik, enumerator dapat mengumpulkan data dengan benar sehingga akan menghasilkan kualitas data yang baik. Tujuan umum dari *workshop* ini agar peserta workshop mampu untuk melakukan pengumpulan data Riset Fasilitas 2011 dengan baik, memahami substansi Riset Fasilitas 2011, memahami instrumen Riset Fasilitas 2011, dan memahami mekanisme pertanggungjawaban administrasi Riset Fasilitas 2011

Workshop enumerator secara nasional diikuti oleh seluruh enumerator Riset Fasilitas, enumerator untuk Puskesmas. *Workshop* dilakukan selama 5 hari dengan berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan Riset Fasilitas 2011, meliputi pemahaman mengenai kebijakan umum Puskesmas, indikator-indikator penelitian, cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mekanisme dan alur kerja, pemahaman instrumen yang digunakan, serta pertanggung jawaban keuangan.

Workshop enumerator dilakukan terhadap 3352 enumerator Rifas 2011, dengan rincian 2186 enumerator Puskesmas dan 498 orang tim entri data. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi paparan/presentasi dan tanya jawab, diskusi, dan praktek lapangan. *Workshop* dilakukan di ibukota propinsi. Pelaksanaan workshop dilakukan sesuai dengan kesediaan waktu masing-masing propinsi.

3.6.2.8. Pengumpulan Data

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data Riset Fasilitas di Puskesmas yang meliputi data input, proses, dan output. Kegiatan pengumpulan data riset fasilitas kesehatan, dilaksanakan di seluruh Puskesmas sebanyak 9.188 buah.

Riset fasilitas kesehatan untuk Puskesmas dilakukan secara total *coverage*. Ruang lingkup kegiatan meliputi: input, proses, output dan outcome pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pengumpulan data dilakukan di setiap Puskesmas dengan cara mendatangi langsung fasilitas kesehatan tersebut dan melakukan wawancara terhadap responden terkait, pengamatan (observasi) dan telaah terhadap data sekunder yang ada.

3.6.2.9. Validasi Studi

Kegiatan validasi studi merupakan salah satu bentuk dari upaya jaga mutu pelaksanaan Riset Fasilitas 2011. Dilakukan oleh Akademisi dari beberapa universitas (perguruan tinggi), untuk melihat gambaran seberapa valid hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011. Validasi studi dilakukan oleh tim khusus dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

3.6.2.10. Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi *data editing*, *data entry*, *data cleaning*, dan *data processing.* Pelaksanaan pengolahan data dilakukan oleh 2 tim yaitu tim manajemen data dan tim analisis data. Tim manajemen data (mandat) bertanggung jawab pada data sejak diterima dari enumerator hingga data siap dianalisa. Sedangkan tim analisis data bertanggung jawab pada pembuatan *syntax*, *dummy table* dan mengeluarkan hasil.

3.6.2.11. Analisa Data

Analisa data meliputi: deskriptif Nasional dan wilayah, Peta wilayah, analisis untuk menghasilkan berbagai indikator adekuasi, apropriateness, kinerja (efektivitas dan efisiensi), dan mutu, dan penyusunan Indeks Kinerja Puskesmas.

BAB IV
HASIL

4.1. JUMLAH PUSKESMAS

Analisis deskriptif hasil Rifaskes 2011 untuk Puskesmas dilakukan berdasarkan seluruh Puskesmas yang ada di Provinsi Kepulaun Riau. Jumlah Puskesmas yang berhasil dikunjungi dan dilakukan pengumpulan data adalah sejumlah 65 Puskesmas yang tersebar di 7 kabupaten/kota. Pada tabel 4.1.1. disajikan distribusi Puskesmas tersebut.

Tabel 4.1.1
Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas beroperasi sebelum Februari 2010 dan dikunjungi	Puskesmas tidak dikunjungi karena beroperasi setelah Januari 2010	Puskesmas tidak dikunjungi karena merupakan daerah sulit	Total Jumlah Puskesmas
1	Karimun	9	0	0	9
2	Bintan	12	0	0	12
3	Natuna	12	0	0	12
4	Lingga	6	0	0	6
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	7
6	Kota Batam	13	0	0	13
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	0	6
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**0**	**0**	**65**

Dari total jumlah Puskesmas, sebanyak 65 Puskesmas semuanya dianalisis. Tidak ada Puskesmas tidak dikunjungi karena akses yang sulit dan sebagainya.

Tabel 4.1.2.

Jumlah dan Persentase Puskesmas Menurut Lokasi di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lokasi			
			Perkotaan		Perdesaan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Karimun	9	5	55.6	4	44.4
2	Bintan	12	2	16.7	10	83.3
3	Natuna	12	1	8.3	11	91.7
4	Lingga	6	4	66.7	2	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	1	14.3	6	85.7
6	Kota Batam	13	13	100.0	0	.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	6	100.0	0	.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**32**	**49.2**	**33**	**50.8**

Jumlah dan persentase Puskesmas menurut lokasi di Propinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel 4.1.2. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa Puskesmas di perkotaan dan di perdesaan, hampir sama banyak yaitu 49,2 persen dan 50,8 persen.

Menurut Jenis, Puskesmas diklasifikasikan menjadi dua: Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non-Perawatan. Yang dimaksud dengan Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang menjalankan fungsi perawatan. Untuk menjalankan fungsinya biasanya Puskesmas diberikan tambahan ruangan dan fasilitas rawat inap yang merupakan pusat rujukan antara.

Pada tabel 4.1.3. dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terdapat 24 Puskesmas Perawatan (36,9) dan 41 Puskesmas Non Perawatan (63,1) di Provinsi Kepulaun Riau. Persentase Puskesmas Perawatan terbanyak yang melebihi 50 persen dari total Puskesmas adalah di Kabupaten Natuna (58,3), selanjutnya Kabupaten Karimun (44,4), Kabupaten Kepulaun Anambas (42,9), Kabupaten Bintan (41,7), dan Kota Batam (23,1).Sementara Kabupaten/Kota terendah yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga masing masing 16,7 persen.

Tabel 4.1.3.

Jumlah dan Persentase Puskesmas Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jenis			
			Perawatan		Non Perawatan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Karimun	9	4	44.4	5	55.6
2	Bintan	12	5	41.7	7	58.3
3	Natuna	12	7	58.3	5	41.7
4	Lingga	6	1	16.7	5	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	3	42.9	4	57.1
6	Kota Batam	13	3	23.1	10	76.9
7	Kota Tanjung Pinang	6	1	16.7	5	83.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**24**	**36.9**	**41**	**63.1**

4.2. FASILITAS PELAYANAN LAIN DI PUSKESMAS

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan, selain mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dasar/wajib dan pengembangan, juga diperkenankan untuk memberikan fasilitas pelayanan lainnya. Fasilitas tersebut yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011, antara lain ditanyakan tentang ada/tidak ada PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar).

Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar. Pada umumnya, Puskesmas dimaksud mempunyai fasilitas rawat inap.

Tabel 4.2.1.
Persentase Puskesmas dengan Fasilitas PONED Menurut Jenis Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Perawatan		Puskesmas Non Perawatan	
			PONED	Non PONED	PONED	Non PONED
1	Karimun	9	33.3	11.1	.0	55.6
2	Bintan	12	25.0	16.7	.0	58.3
3	Natuna	12	50.0	8.3	25.0	16.7
4	Lingga	6	.0	16.7	.0	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	28.6	.0	57.1
6	Kota Batam	13	7.7	15.4	23.1	53.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	16.7	.0	16.7	66.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**23.1**	**13.8**	**10.8**	**52.3**

Dari Rifaskes 2011, terdata bahwa fasilitas PONED dimiliki oleh 23,1 persen di Puskesmas Perawatan dan 10,8 persen di Puskesmas Non Perawatan,. Kabupaten yang memiliki Fasilitas PONED di Puskesmas Perawatan terbanyak yaitu Kabupaten Natuna (50,0), selanjutnya Kabupaten Karimun (33,3). Sementara ada 1 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki fasilitas PONED di Puskesmas Perawatan (0) yaitu Kota Tanjungpinang.

4.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Keberhasilan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Yang dimaksud tenaga kesehatan di Puskesmas adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan professional di bidang kesehatan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu pula dipertimbangkan distribusi tenaga kesehatan tersebut.

Analisis deskriptif tenaga kesehatan di Puskesmas dari hasil Rifaskes 2011 ditujukan untuk mengetahui ketersediaan tenaga Puskesmas dan penyebarannya di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulaun Riau. Analisis dilakukan untuk 65 Puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Februari 2010.

Analisis dilakukan pada tenaga Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Tenaga Gizi dan Promkes. Untuk setiap jenis tenaga dilihat keberadaanya dan jumlah rata-rata per Puskesmas, seperti dapat dilihat pada tabel 4.3.1.a. dan 4.3.1.b.

Untuk keberadaan Dokter (Tabel 4.3.1.a.) seluruh Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki tenaga dokter (100) dengan jumlah rata-rata 4,69 per Puskesmas.

Tabel 4.3.1.a.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Dokter		Dokter Gigi		Perawat		Bidan	
			Ada	Jml Rata-rata/Pusk	Ada	Jml Rata-rata/Pusk	Ada	Jml Rata-rata/Pusk	Ada	Jml Rata-rata/Pusk
1	Karimun	9	100.0	7.11	88.9	1.11	100.0	17.78	100.0	17.78
2	Bintan	12	100.0	5.33	100.0	1.75	100.0	15.75	100.0	11.08
3	Natuna	12	100.0	3.33	83.3	.92	100.0	12.42	100.0	6.50
4	Lingga	6	100.0	1.67	66.7	.83	100.0	22.17	100.0	15.67
5	Kepulauan Anambas	7	100.0	4.00	71.4	1.00	100.0	18.71	85.7	9.29
6	Kota Batam	13	100.0	6.15	100.0	2.08	100.0	11.38	100.0	12.77
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	3.17	83.3	1.67	100.0	12.67	100.0	15.00
KEPULAUAN RIAU		**65**	**100.0**	**4.69**	**87.7**	**1.40**	**100.0**	**15.17**	**98.5**	**12.09**

Untuk keberadaan Dokter Gigi, hanya 87,7 Puskesmas di Provinsi Kepulaun Riau yang memiliki dokter gigi, dengan jumlah rata-rata 1,4 per Puskesmas. Semua Puskesmas di Kota Batam dan Kabupaten Bintan memiliki Dokter Gigi, dengan jumlah rata-rata per Puskesmas yaitu 2,08 untuk Kota Batam dan 1,75 untuk Kabupaten Bintan. Sementara Kabupaten/Kota terendah yang memiliki Dokter Gigi adalah Kabupaten Lingga (66,7) dengan jumlah rata-rata 0,83 per Puskesmas.

Deskripsi keberadaan Perawat menunjukkan bahwa 100 persen Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki tenaga Perawat dengan jumlah rata-rata 15,17 per Puskesmas. Jumlah rata-rata per Puskesmas yang tertinggi adalah Kabupaten Lingga (22,17) dan selanjutnya adalah Kabupaten Kepulaun Anambas (18,17). Sementara yang terendah adalah Kota Batam (11,38%).

Keberadaan Bidan di Provinsi Kepulauan Riau juga hampir 100 persen (98,5) dengan jumlah rata-rata 12,09 Bidan per Puskesmas. Hanya satu Kabupaten/Kota yang tidak 100 persen yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7) dengan jumlah rata-rata 9,29. Tenaga bidan merupakan tenaga yang sangat penting di Puskesmas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan tenaga bidan, seperti juga perawat, diharapkan ada di seluruh Puskesmas.

Pada Tabel 4.3.1.b. terlihat analisis keberadaan tenaga Sanitarian menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau hanya ada 84,6 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 1,06 Sanitarian per Puskesmas. Kabupaten/Kota dengan tenaga Sanitarian 100 persen adalah Kabupaten Bintan dengan jumlah rata-rata 1,58 Sanitarian per Puskesmas, Kota Batam dengan jumlah rata-rata 1,38 Sanitarian per Puskesmas, dan Kota Tanjungpinang dengan jumlah rata-rata 1,17 per Puskesmas. Sementara Kabupaten/Kota yang memiliki tenaga Sanitarian terendah adalah Kabupaten Natuna (66,7%) dengan jumlah rata-rata 0,67 Sanitarian per Puskesmas dan Kabupaten Lingga (66,7) dengan jumlah rata-rata 0,83 Sanitarian per Puskesmas.

Tabel 4.3.1.b.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Sumber Daya Tenaga di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Sanitarian		Tenaga Gizi		Promkes	
			Ada	Jml Rata-rata/Pusk	Ada	Jml Rata-rata/Pusk	Ada	Jml Rata-rata/Pusk
1	Karimun	9	66.7	.67	55.6	.56	55.6	.56
2	Bintan	12	100.0	1.58	91.7	1.17	25.0	.50
3	Natuna	12	66.7	.67	66.7	.75	41.7	.50
4	Lingga	6	66.7	.83	100.0	1.00	16.7	.17
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	.86	42.9	.43	.0	.00
6	Kota Batam	13	100.0	1.38	100.0	1.62	23.1	.23
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	1.17	100.0	1.83	16.7	.17
Kepulauan Riau		**65**	**84.6**	**1.06**	**80.0**	**1.06**	**27.7**	**.34**

Tenaga gizi di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 80,0 persen dengan jumlah rata-rata 1,06 per Puskesmas. Kabupaten/Kota dengan Tenaga gizi 100 persen adalah Kota Tanjungpinang dengan jumlah rata-rata 1,83 per Puskesmas, Kota Batam dengan jumlah rata-rata 1,62 per Puskesmas, dan Kabupaten Lingga dengan jumlah rata-rata 1,0 per Puskesmas. Sementara Tenaga gizi terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9) denhan jumlah rata-rata 0,43 per Puskesmas.

Tenaga Promosi Kesehatan(Promkes) termasuk tenaga di Puskesmas yang mempunyai peran penting untuk kontirbusi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi tenaga Promosi kesehatan ini termasuk tenaga yang jumlahnya sedikit, di Provinsi Kepulauan Riau hanya 27,7 persen Puskesmas dengan jumlah rata-rata 0,34 Tenaga Promkes Per Puskesmas. Kabupaten/Kota dengan Tenaga Prom Kes tertinggi adalah Kabupaten Karimun (55,6) dengan jumlah rata-rata 0,56 per Puskesmas, selanjutnya adalah Kabupaten Natuna (41,7) dengan jumlah rata-rata 0,50 per Puskesmas. Kabupaten/Kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak memiliki tenaga Promosi Kesehatan.

4.4. SARANA DAN PRASARANA

Pada tabel 4.4.1. dan 4.4.2. disajikan data tentang Sarana dan Prasarana Puskesmas yang meliputi Jenis dan Kondisi bangunan, listrik 24 jam, dan air bersih.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi bangunan dalam keadaan baik atau rusak ringan sebanyak 84,6 persen.Persentase terbesar adalah Kota Batam dan Tanjungpinang (100%) . Sementara terendah adalah Kabupaten Karimun (55,6).

Tabel 4.4.1.

Persentase Puskesmas dengan Kondisi dan Jenis Seluruh Bangunan Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Keadaan Bangunan Baik/Rusak Ringan	Jenis Bangunan Permanen
1	Karimun	9	55.6	77.8
2	Bintan	12	91.7	100.0
3	Natuna	12	75.0	83.3
4	Lingga	6	83.3	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	85.7
6	Kota Batam	13	100.0	100.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**84.6**	**92.3**

Persentase Puskesmas yang memiliki jenis bangunan permanen di Provinsi Kepulauan Riau sudah 92,3 persen. Terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan persentase puskesmas memiliki bangunan permanen 100 persen, yaitu Kabupaten Bintan, Lingga, Kota Batam, dan Tanjungpinang. Sementara di Kabupaten Karimun 77,8 persen, Kabupaten Natuna 83,3 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 85,7 persen.

Tabel 4.4.2.

Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Listrik 24 jam dan Air Bersih Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Puskesmas dengan Ketersediaan (%)	
			Listrik 24 Jam	Air Bersih*
1	Karimun	9	88.9	66.7
2	Bintan	12	75.0	75.0
3	Natuna	12	66.7	33.3
4	Lingga	6	66.7	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	42.9	42.9
6	Kota Batam	13	61.5	69.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	50.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**70.8**	**60.0**

* komposit : tersedia sumber air, tersedia sepanjang tahun dan kualitas air baik

Persentase Puskesmas yang tersedia listrik 24 jam di Provinsi Kepulauan Riau 70,8 persen. Kabupaten/Kota dengan Persentase Puskesmas memiliki ketersediaan listrik 24 jam terbesar adalah Kota Tanjungpinang (100%), dan selanjutnya Kabupaten Karimun (88,9%). Sementara persentase yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9).

Untuk ketersediaan air bersih, di Provinsi Kepulauan Riau Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih sepanjang tahun hanya 60,0 persen. Persentase puskesmasdengan ketersediaan air bersih terbesar adalah Kabupaten Lingga (83,3), dan selanjutnya Kabupaten Bintan (75,0). Sementara yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9)

4.5. ALAT TRANSPORTASI

Untuk ketersediaan sarana transportasi, Tabel 4.5.1. menunjukkan dari 65 Puskesmas hanya 61,5 persen Puskesmas di Kepulauan Riau memiliki kendaraan bermotor roda dua. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang sudah memiliki alat transportasi kendaraan roda dua (100%). Persentase kepemilikan kendaraan roda dua terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, 23,1 persen Puskesmas sudah memiliki kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4. Persentase Puskesmas yang memiliki kendaraan pusling roda 4 tertinggi adalah Kota Tanjungpinang (50,0%), dan selanjutnya Kota Batam (46,2%). Sementara Persentase terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Sedangkan persentase Puskesmas yang memiliki perahu bermotor adalah 21,5 persen . Persentase Puskesmas yang memiliki perahu bermotor tertinggi adalah kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%, selanjutnya Kabupaten Kepulauan Natuna (33,3%), sedangkan yang terendah adalah Kota Tanjungpinang (0,0%).

Tabel 4.5.1.
Persentase Puskesmas Berdasarkan Ketersediaan Alat Transportasi di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Alat Transportasi Puskesmas (%)					
			Kendaraan Roda 2	Pusling	Perahu Bermotor	3 Roda 2 + 1 Pusling / Perahu Bermotor	Pusling / Ambulans	Pusling/ Ambulans/ Perahu Bermotor
1	Karimun	9	100.0	11.1	11.1	22.2	88.9	88.9
2	Bintan	12	83.3	16.7	8.3	25.0	50.0	58.3
3	Natuna	12	25.0	16.7	33.3	16.7	41.7	58.3
4	Lingga	6	83.3	16.7	16.7	16.7	33.3	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	0	42.9	0	57.1	85.7
6	Kota Batam	13	46.2	46.2	30.8	38.5	100.0	100.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	50.0	0	50.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**61.5**	**23.1**	**21.5**	**24.6**	**67.7**	**76.9**

Tabel 4.5.1 menunjukkan persentase Puskesmas yang memiliki sarana transportasi tiga (3) kendaraan bermotor roda 2 (yang masing-masing diasumsikan digunakan oleh Sanitarian, Perawat dan Bidan untuk pelayanan luar gedung) dan pusling roda 4 atau perahu bermotor sebesar 24,6 persen. Persentase tertinggi ada di kota Batam (50,0%) Sementara persentase terendah ada di kep Anambas(0,0%).

Ambulans merupakan sarana transportasi pasien untuk kasus yang tidak bisa ditangani Puskesmas dan memerlukan rujukan ke sarana pelayanan yang lebih mampu seperti ke rumah sakit. Puskesmas Keliling walaupun tidak didesain seperti ambulans, namun bila tidak ada ambulans digunakan juga sebagai kendaraan ambulans, yaitu membawa pasien yang memerlukan rujukan segera. Di Provinsi Kepulaun Riau persentase Puskesmas yang memiliki ambulans atau pusling roda empat sebesar 67,7 persen. Sementara

yang memiliki ambulans atau pusling roda empat atau perahu bermotor di Kepulauan Riau sebanyak 76,9 persen.

4.6. MANAJEMEN PUSKESMAS

4.6.1. Perencanaan Tahunan dan Lokakarya Mini

Pada Rifaskes 2011 ditanyakan apakah Puskesmas mempunyai dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2010, bila ada dilihat apakah dokumennya berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) atau Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan dilihat juga apakah Penanggung Jawab Program terlibat dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan. Selain Rencana Kerja Tahunan, RIfaskes 2011 juga melihat dokumen Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Triwulanan.

Dari 65 Puskesmas yang dianalisis, persentase Puskesmas yang mempunyai Rencana Kerja Tahunan di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 90,8 persen. Ada 5 Kabupaten Kota yang seluruh Puskesmasnya mempunyai Rencana Kerja Tahunan (100) Sementara Persentase terendah ada di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6), kemudian Kabupaten Karimun (88,9).

Tabel 4.6.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Perencanaan dan Penilaian Kinerja di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	% Rencana Kerja Tahunan (2010)	% Penilaian Kinerja
1	Karimun	9	88.9	100.0
2	Bintan	12	100.0	83.3
3	Natuna	12	100.0	66.7
4	Lingga	6	100.0	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	28.6
6	Kota Batam	13	100.0	30.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**90.8**	**64.6**

Dari 65 Puskesmas yang dianalisis, persentase Puskesmas yang melksanakan Penilaian kinerja di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 64,6 persen. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjung Pinang adalah yang seluruh Puskesmasnya mempunyai kegiatan penilaian kinerja (100%) Sementara Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6),.

Tabel 4.6.1.2. menggambarkan persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Penggerakkan Pelaksanaan, berupa Lokakarya Mini Bulanan dan Lokakarya Mini Triwulan. Terdapat 67,7 persen Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan dan ada dokumennya. Seluruh Puskesmas di 2 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepilauan Riau telah melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan dan ada dokumennya, yaitu di Kabupaten Karimun dan Kota Batam (100). Sementara terendah ada di Kabupaten Natuna (41,7). Sedangkan

yang mengatakan melaksanakan Lokakarya Mini Bulanan, tapi tidak dapat memperlihatkan dokumennya di Provinsi Kepulauan Riau hanya 12,3 persen.

Tabel 4.6.1.2.
Persentase Puskesmas Menurut Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lokakarya Mini Bulanan		Lokakarya Mini Triwulan	
			Ya, ada Dokumen	Ya, Tidak ada Dokumen	Ya, ada Dokumen	Ya, Tidak ada Dokumen
1	Karimun	9	100.0	.0	22.2	11.1
2	Bintan	12	66.7	8.3	66.7	8.3
3	Natuna	12	41.7	33.3	41.7	16.7
4	Lingga	6	66.7	.0	33.3	.0
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	28.6	14.3	.0
6	Kota Batam	13	100.0	.0	23.1	7.7
7	Kota Tanjung Pinang	6	16.7	16.7	83.3	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**67.7**	**12.3**	**40.0**	**9.2**

Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Lokakarya Mini Triwulan dan ada dokumennya di Provinsi Kepulauan Riau 40,0 persen Puskesmas. Terbesar di Kota Tanjungpinang (83,3), selanjutnya Kabupaten Bintan (66,7), dan Kabupaten Natuna (41,7). Sementara terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3). Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan melaksanakan Lokakarya mini Triwulanan tapi tidak dapat menunjukkan dokumennya sebesar 9,2 persen.

Pada tabel 4.6.1.3 terlihat di Provinsi Kepulauan Riau ,dari 59 Puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, 94,9 persen memiliki dokumen RUK. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Bintan, Lingga, Kota Batam dan Tanjungpinang telah memiliki dokumen Rencana Usulan Kegiatan (100%). Sedangkan yang belum adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas (50,0%), kab Karimun (87,5%) dan kab Natuna (91,7%).

Tabel 4.6.1.3
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Dokumen dan Keterlibatan PJ Program dan menyusun Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk dengan RKT	% Ketersediaan Dokumen		% Keterlibatan PJ Program dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
			Rencana Usulan Kegiatan (RUK)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)	
1	Karimun	8	87.5	100.0	100.0
2	Bintan	12	100.0	100.0	91.7
3	Natuna	12	91.7	91.7	91.7
4	Lingga	6	100.0	100.0	100.0
5	Kepulauan Anambas	2	50.0	50.0	100.0
6	Kota Batam	13	100.0	100.0	100.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0
	KEPULAUAN RIAU	**59**	**94.9**	**96.6**	**96.6**

Dari 59 Puskesmas yang memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) di provinsi Kepulauan Riau, keberadaan dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), terdapat 96,6 persen .. Seluruh Puskesmas di 5 Kabupaten/kota telah memiliki dokumen RPK. Sementara yang belum semua Puskesmas memiliki adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas (50,0) dan Kab Natuna (91,7%).

Dari 59 Puskesmas yang memiliki rencana kerja tahunan, di Provinsi Kepulauan Riau 96,6 persen sudah mengikut sertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Seluruh Puskesmas di 5 Kabupaten/kota telah mengikutsertakan penanggung jawab program dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Sedangkan 2 Kabupaten /Kota yg belum adalah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna (masing-masing 91,7%).

4.6.2. Sistem Informasi Puskesmas

Tabel 4.6.2.1. menunjukkan Sistem Informasi yang dimiliki Puskesmas, diantaranya mengenai penggunaan sistem komputerisasi di Puskesmas, yaitu komputer antar ruang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) dan Penggunaan Sistem Pengkodean Penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Puskesmas.

Tabel 4.6.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Sistem Informasi Puskesmas
di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Penggunaan sistem komputer untuk pelayanan dalam gedung		Penggunaan International code disease (ICD) X di Puskesmas
			Ya, ada jaringan antar ruangan	Ya, menggunakan komputer tapi tidak ada jaringan antar ruang	
1	Karimun	9	22.2	55.6	66.7
2	Bintan	12	25.0	66.7	58.3
3	Natuna	12	0	75.0	16.7
4	Lingga	6	0	100.0	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	14.3
6	Kota Batam	13	15.4	0	61.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	83.3	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**10.8**	**50.8**	**55.4**

Penggunaan system komputerisasi di Puskesmas yang terhubung satu sama lain dengan jaringan tertentu (LAN/Local Area Network) di Provinsi Kepulauan Riau hanya 10,8 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan (25,0%), Kabupaten Karimun (22,2%), dan Kota Batam (15,4%). Sementara di 4 kabupaten/kota lainnya belum ada Puskesmas yang memiliki system komputerisasi dengan jaringan antar ruangan (0,0%).

Sedangkan persentase Puskesmas dengan penggunaan komputer tanpa jaringan antar ruang Provinsi Kepulauan Riau sebesar 50,8 persen. Terdapat 2 Kabupaten/Kota yang yang semua Puskesmasnya belum menggunakan komputer tanpa jaringan antar ruangan yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam (0,0%). Sementara persentase yang

tertinggi ada di Kabupaten Lingga (100,0%), Kota Tanjungpinang (83,3%), dan selanjutnya adalah Kabupaten Natuna (75,0%).

Persentase Puskesmas yang telah menggunakan system pengkodean penyakit dalam pencatatan pelaporan dengan ICD X di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 55,4 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (100,0%). Sementara yang terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

4.7. PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Di dalam melaksanakan fungsi Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, sesuai Kepmenkes No. 128/2004, seluruh Puskesmas di Indonesia diharapkan melaksanakan program Upaya Kesehatan Wajib. Sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan di setiap Puskesmas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana masing-masing Puskesmas, juga dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Untuk kelancaran pelaksanaan setiap upaya atau program kegiatan ditentukan siapa penanggung jawabnya dan dibuatkan Surat Keputusannya oleh pejabat yang berwenang menetapkan. Pada tabel 4.7.1.a. dan 4.7.1.b. dapat kita lihat tentang kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab program Upaya Kesehatan Wajib.

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan adalah dari DIII Promosi Kesehatan atau S1 Kesehatan Masyarakat. Pada Tabel 4.7.1.a. dapat dilihat bahwa persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 23,1 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Promosi Kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kota Kabupaten Natuna (58,3%), Kabupaten Bintan (33,3%) dan Kota Batam (30,8%). Sedangkan di 4 Kabupaten/Kota lainnya, tidak ada yang sesuai (0,0%)).

Tabel 4.7.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program
di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kesesuaian PJ Program		
			Promosi Kesehatan	Kesehatan Lingkungan	KIA/KB
1	Karimun	9	0	55.6	100.0
2	Bintan	12	33.3	91.7	100.0
3	Natuna	12	58.3	58.3	91.7
4	Lingga	6	0	66.7	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	0	57.1	85.7
6	Kota Batam	13	30.8	100.0	100.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**23.1**	**76.9**	**96.9**

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan adalah DIII Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian atau S1 Kesehatan Masyarakat. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 76,9 persen. Seluruh Puskesmas Kota Batam dan Tanjungpinang mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (100%). Persentase terendah mempunyai penanggung jawab Program Kesehatan Lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Kabupaten Karimun (55,6%).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program KIA/KB adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Persentase Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program KIA/KB dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di Kepulauan Riau adalah sebesar 96,9 persen. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang semua penanggung jawab KIA/KB di Puskesmas sudah sesuai (100,0%) dengan latar belakang pendidikannya . Sementara yang belum 100 persen sesuai adalah Kabupaten Natuna (91,7) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7).

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah DIII Gizi, S1 Kesehatan Masyarakat, atau S1 Gizi. Kesesuaian latar belakang pendidikan penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 76,9 persen. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang mempunyai penanggung jawab Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (100%). Sementara yang belum semuanya sesuai adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9), Kabupaten Natuna (75,0), Kabupaten Bintan (83,3), Kab Karimun (44,4%) dan kab Lingga (92,3%)

Tabel 4.7.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Kesesuaian PJ Program
di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kesesuaian PJ Program		
			Perbaikan Gizi Masyarakat	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Pengobatan
1	Karimun	9	44.4	100.0	100.0
2	Bintan	12	83.3	25.0	100.0
3	Natuna	12	75.0	91.7	41.7
4	Lingga	6	100.0	83.3	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	42.9	85.7	57.1
6	Kota Batam	13	92.3	69.2	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**76.9**	**75.4**	**73.8**

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, atau Dokter. Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai penanggungjawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 75,4 persen. Persentase tertinggi yaitu Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang, dimana seluruh Puskesmas sudah mempunyai penanggung jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (100%), kemudian Kota Natuna (91,7) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7). Persentase terendah adalah di Kabupaten Bintan (25,0), berikutnya adalah Kota Batam (69,2) .

Latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Penanggungjawab Program Pengobatan adalah DIII Kebidanan, DIII Keperawatan, atau Dokter. Di Provinsi Kepulauan Riau, Puskesmas yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah sebesar 73,8 persen. Persentase tertinggi yang mempunyai penanggung jawab Program Pengobatan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai adalah Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (100%). Sementara, yang belum 100 persen adalah Kabupaten Natuna (41,7), kemudian Kota Batam (46,2), dan kabupaten Kepulauan Anambas (57,1).

4.8. PELAYANAN KESEHATAN

4.8.1. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

4.8.1.1. Kegiatan Program Promosi Kesehatan

Jenis kegiatan dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pembinaan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pembinaan Forum Desa Siaga, dan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Dalam lingkup i Provinsi Kepulauan Riau, dari keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan, kegiatan PHBS merupakan presentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (90,8%) dan disusul oleh kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga (87,7%**),** Pembinaan UKBM (83,1%), Pembinaan Poskesdes (67,7%), Sebesar 61,5 persen Puskesmas telah melakukan keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan secara lengkap (Tabel 4.8.1.1.1).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penyuluhan PHBS dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 90,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di 4 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga dan Kota Tanjungpinang (100,0). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan penyuluhan PHBS ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1), kemudian Kabupaten Karimun (77,8), dan Kota Batam (92,3) .

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan pembinaan di Poskesdes dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 67,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan di Poskesdes terdapat di 1 Kabupaten/Kota yakni, Kota Tanjungpinang (100,0%), kemudian diikuti Kabupaten Natuna (83,3%), dan Kabupaten Bintan (75,0%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%), kemudian Kabupaten Lingga (50%), dan Kota Batam (61,5%).

Tabel 4.8.1.1.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	PHBS	Pembinaan Poskesdes	Pembinaan Forum Desa Siaga	UKBM	Kegiatan Lengkap Promosi Kesehatan
1	Karimun	9	77.8	66.7	88.9	88.9	66.7
2	Bintan	12	100.0	75.0	100.0	91.7	75.0
3	Natuna	12	100.0	83.3	91.7	75.0	66.7
4	Lingga	6	100.0	50.0	83.3	100.0	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	28.6	57.1	57.1	14.3
6	Kota Batam	13	92.3	61.5	84.6	76.9	53.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**90.8**	**67.7**	**87.7**	**83.1**	**61.5**

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 87,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan Forum Desa Siaga terdapat di 2 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang (100,0%). Sementara persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1), selanjutnya Kabupaten Lingga (83,3%) dan Kota Batam (84,6%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 83,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Pembinaan UKBM terdapat di Kabupaten Lingga (100%) dan Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kabupaten Bintan (91,7%), dan Kabupaten Karimun (88,9%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan pada Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), kemudian Kabupaten Natuna (75,0%), dan Kota Batam (76,9%).

Persentase Puskesmas yang melakukan secara lengkap keempat jenis kegiatan Program Promosi Kesehatan dalam lingkup Provinsi kepulauan Riau adalah sebesar 61,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan secara lengkap Program Promosi Kesehatan terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kabupaten Bintan (75,0%), kabupaten Karimun (66,7%) dan Kabupaten Natuna (66,7%). Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ditemukan pada Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), berikutnya Kabupaten Lingga (50,0%), dan Kota Batam (53,8%).

4.8.1.2. Pelatihan Program Promosi Kesehatan

Jenis Pelatihan petugas Puskesmas dalam pelaksanaan Program Promosi Kesehatan yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pelatihan Desa Siaga dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2009 dan 2010. Di Provinsi Kepulauan Riau dari ketiga jenis pelatihan, Pelatihan Desa Siaga merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (60,0%) dan berikutnya adalah

Pelatihan PHBS (33,8%), dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (21,5%). Di Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 7,7 persen Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan (Tabel 4.8.1.2.1).

Persentase petugas Puskesmas yang mengikuti Pelatihan PHBS dalam lingkup Provinsi kepulauan Riau adalah sebesar 33,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan PHBS terdapat di Kabupaten Lingga (66,7%), kemudian Kota Batam (46,2%), Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang (33,3%) . Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan PHBS ditemukan pada Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), kemudian Kabupaten Bintan (16,7%).

Tabel 4.8.1.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pada Pelatihan Program Promosi Kesehatan Tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Kepulauan Riau ,Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan PHBS	Pelatihan Desa Siaga	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Lengkap Promosi Kesehatan
1	Karimun	9	33.3	77.8	0	0
2	Bintan	12	16.7	16.7	8.3	0
3	Natuna	12	33.3	75.0	41.7	8.3
4	Lingga	6	66.7	83.3	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	42.9	0	0
6	Kota Batam	13	46.2	61.5	38.5	23.1
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3	83.3	50.0	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**33.8**	**60.0**	**21.5**	**7.7**

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga dalam lingkup Provinsi kepulauan Riau adalah sebesar 60,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga terdapat di Kabupaten Lingga (83,3%) dan Kota Tanjungpinang (83,3%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Desa Siaga ditemukan di Kabupaten Bintan (16,7%), kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), dan Kota Batam (61,5%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat terdapat di Kota Tanjungpinang (50,0%), kemudian Kabupaten Natuna (41,7%), dan Kota Batam (38,5%). Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikuti Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dapat ditemukan di 3 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap ketiga jenis pelatihan Program Promosi Kesehatan dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan dalam Program Promosi Kesehatan adalah di Kota Batam (23,1%), kemudian Kota Tanjungpinang (16,7%), dan Kabupaten Natuna (8,3%). Persentase Puskesmas terendah

mengikuti pelatihan secara lengkap dalam Program Promosi Kesehatan ada di 4 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, dan Kepulauan Anambas (0,0%).

4.8.1.3. Pedoman Program Promosi Kesehatan

Pedoman Program Promosi Kesehatan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Promosi Kesehatan, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Juknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Poskesdes, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, Juknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga. Pada Provinsi Kepulauan Riau pedoman Program Promosi Kesehatan terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga (83,1%) kemudian Juknis Poskesdes (63,1%) dan Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga (63,1%). Ppersentase Puskesmas yang memiliki ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 52,3 persen (Tabel 4.8.1.3.1).

Persentase Puskesmas yang memiliki petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 63,1 persen. Persentase tertinggi ditemukan di Kota Tanjungpinang (83,3%), kemudian Kabupaten Karimun (77,8%), Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna (66,7%) . Persentase terendah ditemukan pada Kabupaten Lingga (33,3%), kemudian Kota Batam (53,8%) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%).

Persentase Puskesmas yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 83,1 persen. Persentase tertinggi ditemukan di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang (100%), berikutnya adalah Kabupaten Natuna dan Lingga (83,3%). Persentase terendah ditemukan pada Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), kemudian Kota Batam (76,9%), dan Kabupaten Karimun (77,8%).

Tabel 4.8.1.3.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Promosi Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Juknis Poskesdes	Pengembangan Desa Siaga	Juknis Penggerakan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Siaga	Pedoman Lengkap Promosi Kesehatan
1	Karimun	9	77.8	77.8	77.8	77.8
2	Bintan	12	66.7	100.0	83.3	58.3
3	Natuna	12	66.7	83.3	66.7	58.3
4	Lingga	6	33.3	83.3	33.3	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	57.1	57.1	42.9
6	Kota Batam	13	53.8	76.9	53.8	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	100.0	50.0	50.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**63.1**	**83.1**	**63.1**	**52.3**

Persentase Puskesmas yang memiliki Petunjuk Teknis Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Siaga dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 63,1 persen. Persentase tertinggi ditemukan di Kabupaten Bintan (83,3%), kemudian Kabupaten Karimun (77,8%), dan Kabupaten Natuna (66,7%) . Persentase terendah ditemukan di Kabupaten Lingga (33,3%).

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Program Promosi Kesehatan secara lengkap (yaitu memiliki ketiga jenis pedoman dan juknis yang disebutkan di atas) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 52,3 persen. Persentase tertinggi ditemukan di Kabupaten Karimun (77,8%), kemudian Kabupaten Bintan (58,3%), dan Natuna (58,3%). Persentase terendah ditemukan di Kabupaten Lingga (33,3%).

4.8.1.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis diperlukan dalam Program Promosi Kesehatan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Promosi Kesehatan. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dapat berupa kunjungan supervisi atau bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balik laporan dalam bentuk tertulis, dan pertemuan monitoring dan evaluasi (monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Pada Provinsi Kepulauan Riau bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam Program Promosi Kesehatan yang paling banyak diterima Puskesmas adalah supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (66,2%) dan pertemuan monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (60,0%) dan kemudian umpan balik (52,3%). Di Provinsi Kepulauan Riau persentase Puskesmas menerima lengkap ketiga bentuk Pengawasan evaluasi dan bimbingan (kunjungan supervisi, umpan balik tertulis dan pertemuan monev) adalah sebesar 38,5 persen.

Tabel 4.8.1.4.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Promosi Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Karimun	9	66.7	33.3	11.1	11.1
2	Bintan	12	83.3	50.0	83.3	50.0
3	Natuna	12	58.3	58.3	41.7	41.7
4	Lingga	6	100.0	100.0	66.7	66.7
5	Kepulauan Anambas	7	0	14.3	28.6	0
6	Kota Batam	13	61.5	38.5	84.6	23.1
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		65	66.2	52.3	60.0	38.5

Di Provinsi Kepulauan Riau, dari 65 Puskesmas sebesar 66,2 persen Puskesmas menerima kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program

Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten Lingga (100%) dan Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kabupaten Bintan (83,3%),. Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kabupaten Natuna (58,3%), dan Kabupaten Karimun (66,7%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, dari 65 Puskesmas sebesar 52,3 persen Puskesmas menerima umpan balik laporan dari Dinas Kesehatan untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi di Kabupaten Lingga (100%), dan Kota Tanjungpinang (100%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), kemudian Kabupaten Karimun (33,3%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, dari 65 Puskesmas sebesar 60,0 persen Puskesmas mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi Program Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kota Batam (84,6%), dan Kabupaten Bintan (83,3%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Karimun (11,1%), kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%), dan Kabupaten Natuna (41,7%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, dari 65 Puskesmas, sebesar 38,5 persen Puskesmas menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (ketiga jenis) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Promosi Kesehatan. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kabupaten Lingga (66,7%), dan Kabupaten Natuna (41,7%). Sedangkan persentase Puskesmas terendah menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kabupaten Karimun (11,1%), dan Kota Batam (23,1%) .

4.8.2. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN

4.8.2.1. Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan

Jenis Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah, Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU), Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga, Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau Pemeriksaan Jentik Nyamuk dan Pelayanan klinik Sanitasi. Di Provinsi Kepulauan Riau, dari ketujuh jenis kegiatan Program Kesehatan Lingkungan, kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (83,1%), dan disusul oleh Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelola Makanan/Minuman (TPM) (81,5%), Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga (78,5%), Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah (75,4%), Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemeriksaan Jentik Nyamuk (64,6%) dan Kunjungan/Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah (21,5%). Di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,2 persen Puskesmas melakukan lengkap ketujuh kegiatan dalam Program Kesehatan Lingkungan (Tabel 4.8.2.1.1.a dan 4.8.2.1.1.b).

Di Provinsi Kepulauan Riau persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kunjungan/ Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah adalah sebesar 75,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), dan Kabupaten Natuna (91,7%). Sementara Persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), kemudian Kabupaten Karimun (66,7%) dan Kota Batam (76,9%).

Tabel 4.8.2.1.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sekolah	Pemeriksaan Sanitasi TTU	Pemeriksaan Sanitasi Tempat Makanan Minuman	Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga
1	Karimun	9	66.7	77.8	66.7	66.7
2	Bintan	12	83.3	91.7	91.7	91.7
3	Natuna	12	91.7	91.7	91.7	91.7
4	Lingga	6	83.3	100.0	100.0	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	42.9	42.9	0
6	Kota Batam	13	76.9	76.9	76.9	84.6
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**75.4**	**83.1**	**81.5**	**78.5**

Di Provinsi Kepulauan Riau persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi TTU adalah sebesar 83,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten Lingga (100%), Kota Tanjungpinang (100,0%), Kabupaten Bintan (91,7%), dan Kabupaten Natuna (91,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Anambas (42,9%),kemudian Kota Batam (76,9%). .

Di Provinsi Kepulauan Riau persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan/ Minuman (TPM) adalah sebesar 81,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten Lingga (100,0%), Kota Tanjungpinang (100%), Kabupaten Bintan (91,7%), dan Kabupaten Natuna (91,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), Kabupaten Karimun (66,7%), dan Kota Batam (76,9%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Rumah Tangga dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 78,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten Lingga (100%), Kota Tanjungpinang (100,0%), Kabupaten Bintan (91,7%), dan Kabupaten Natuna (91,7%). Persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kabupaten Karimun (66,7%).

Tabel 4.8.2.1.1.b. menunjukkan Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kota Tanjungpinang (66,7%), kemudian Kabupaten Natuna (33,3%), dan Kabupaten Karimun (22,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Lingga (0.0%),

kemudian Kota Batam (7,7%), dan Kabupaten Bintan (16,7%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk/ Pemeriksaan Jenis Nyamuk dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 64,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kota Batam (92,3%), kemudian Kabupaten Bintan (91,7%),. Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kota Tanjungpinang (33,3%), dan Kabupaten Karimun (55,6%).

Tabel 4.8.2.1.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Pemeriksaan Sanitasi TPA Sampah	Pemberantasan Sarang Nyamuk/Pemeriksaan Jentik	Pelayanan Klinik Sanitasi	Kegiatan Lengkap Program Kesling
1	Karimun	9	22.2	55.6	11.1	11.1
2	Bintan	12	16.7	91.7	50.0	8.3
3	Natuna	12	33.3	66.7	16.7	16.7
4	Lingga	6	0	66.7	16.7	0
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	0	0	0
6	Kota Batam	13	7.7	92.3	7.7	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	33.3	33.3	33.3
KEPULAUAN RIAU		65	21.5	64.6	20.0	9.2

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan Klinik Sanitasi dalam lingkup propinsi adalah sebesar 20,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi ditemukan di Kabupaten Bintan (50,0%), kemudian Kota Tanjungpinang (33,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kota Batam (7,7%) dan Kabupaten Karimun (11,1%).

Persentase Puskesmas yang melakukan kegiatan lengkap (melaksanakan ketujuh kegiatan tersebut di atas) dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 9,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%), Kabupaten Natuna (16,7%), Kabupaten Karimun (11,1%), dan Kabupaten Bintan (8,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ditemukan di 3 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, dan Kota Batam (masing-masing 0,0%).

4.8.2.2. Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi Pelatihan Air Minum/Bersih, Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman, Pelatihan Pengelolaan Sampah, dan Pelatihan Pengelolaan Air Limbah yang diikuti petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari keempat jenis pelatihan Program Kesehatan Lingkungan, persentase tertinggi yang diikuti Puskesmas adalah Pelatihan Air Bersih/Minum (16,9%) berikutnya adalah Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman (15,4%), Pelatihan Pengelolaan Air Limbah (7,7%), dan Pelatihan Pengelolaan Sampah (3,1%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan di atas adalah sebesar 3,1 persen (Tabel 4.8.2.2.1).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Bersih/ Minum dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 16,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (50,o5), kemudian Kota Batam (30,85), dan Kabupaten Lingga (16,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), Kabupaten Bintan (8,3%), Kabupaten Natuna (8,3%), dan Kabupaten Karimun (11,1%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Sanitasi Makanan/Minuman dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 15,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (50,0%), kemudian Kabupaten Bintan (25.0%), dan Kabupaten Karimun (22,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga (0,0%), kemudian Kabupaten Bintan (7,7%), dan Kabupaten Natuna (8,3%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 3,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (16,7%) dan Kabupaten Karimun (11,7%). Terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan Pengelolaan Sampah (0,0%) yaitu di Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (16,7%), Kabupaten Lingga (16,7%), dan Kota Batam (15,4%). Terdapat 3 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan Pengelolaan Air Limbah (0,0%) yaitu di Kabupaten Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas.

Tabel 4.8.2.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Lingkungan Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Air Minum/Air Bersih	Pelatihan Sanitasi Makanan/ Minuman	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Pelatihan Pengelolaan Air Limbah	Pelatihan Lengkap
1	Karimun	9	11.1	22.2	11.1	11.1	11.1
2	Bintan	12	8.3	25.0	0	0	0
3	Natuna	12	8.3	8.3	0	0	0
4	Lingga	6	16.7	0	0	16.7	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	0	0	0
6	Kota Batam	13	30.8	7.7	0	15.4	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	50.0	50.0	16.7	16.7	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**16.9**	**15.4**	**3.1**	**7.7**	**3.1**

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 3,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (16,7%), dan Kabupaten Karimun (11,1%). Terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Anambas yang keseluruhan petugasnya Puskesmasnya tidak mengikuti secara lengkap keempat jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Lingkungan (0,0%), yaitu Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Kota Batam.

4.8.2.3. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan

Pedoman Program Kesehatan Lingkungan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Jenis pedoman Program Kesehatan Lingkungan yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, dan Permenkes Tentang Persyaratan Kualitas Air. Pedoman Program Kesehatan Lingkungan terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air (29,2%), diikuti oleh Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan (24,6%) dan Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah (21,5%). Persentase Puskesmas yang memiliki secara lengkap ketiga jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 18,5 persen (Tabel 4.8.2.3.1).

Persentase Puskesmas yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Sekolah adalah sebesar 21,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Batam (53,8%), kemudian Kabupaten Karimun (33,3%), dan Kabupaten Bintan (25,0%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang (0,0%), dan Natuna (8,3%).

Tabel 4.8.2.3.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Lingkungan, di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Penyelenggaraan Kesling di Sekolah	Pedoman Penyelenggaraan Kesling	Permenkes Tentang Kualitas Air	Pedoman Lengkap Kesling
1	Karimun	9	33.3	33.3	44.4	33.3
2	Bintan	12	25.0	41.7	16.7	16.7
3	Natuna	12	8.3	8.3	16.7	8.3
4	Lingga	6	0	16.7	16.7	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	28.6	0
6	Kota Batam	13	53.8	46.2	53.8	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	0	16.7	0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**21.5**	**24.6**	**29.2**	**18.5**

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 24,6 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Batam (46,2%), kemudian Kabupaten Bintan (41,7%), dan Kabupaten

Karimun (33,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Tanjungpinang dan Kab Kepulauan Anambas (0,0%) serta Kab Natuna (8,3%)

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Permenkes tentang Persyaratan Kualitas Air adalah sebesar 29,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Batam (53,8%), kemudian Kabupaten Karimun (44,4%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Bintan, Natuna, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki petunjuk teknis dan pedoman dalam Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap sebesar 18,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Batam (46,2%), kemudian kabupaten Karimun (33,3%), dan Kabupaten Bintan (16,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang (0,0 %).

4.8.2.4.Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Lingkungan untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dapat berupa kunjungan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, umpan balikLaporan dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi (Monev) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah dalam bentuk Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (46,2%) diikuti oleh pertemuan monev (38,5%) dan umpan balik (39,8%). Persentase Puskesmas yang menerima secara lengkap ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Lingkungan adalah sebesar 20,0 persen (Tabel 4.8.2.4.1.).

Tabel 4.8.2.4.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesling			
			Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Karimun	9	33.3	33.3	11.1	0
2	Bintan	12	75.0	25.0	33.3	16.7
3	Natuna	12	41.7	25.0	16.7	16.7
4	Lingga	6	33.3	16.7	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	0	0
6	Kota Batam	13	53.8	61.5	92.3	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	66.7	100.0	66.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**46.2**	**33.8**	**38.5**	**20.0**

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 46,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (75,0%), kemudian Kota Tanjungpinang (66,7%), dan Batam (53,8%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk umpan balik adalah sebesar 39,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7%), kemudian Batam (61,5%), dan Kabupaten Karimun (33,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan dalam bentuk pertemuan monitoring dan evaluasi adalah sebesar 38,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kota Batam (92,3%), dan Kabupaten Bintan (33,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima ketiga bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Lingkungan secara lengkap adalah sebesar 20,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7%), kemudian Kota Batam (38,5%), Kabupaten Bintan (16,7%), dan Kabupaten Natuna (16,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas (0,0%).

4.8.3. PROGRAM KESEHATAN IBU

4.8.3.1. Kegiatan Program Kesehatan Ibu

Jenis Kegiatan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas, Kelas Ibu (Hamil dan Nifas), dan Pelayanan Antenatal Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun 2010. Dari keempat jenis kegiatan Program Kesehatan Ibu, kegiatan P4K merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (92,3%) dan diikuti oleh Pelayanan Antenatal Terintegrasi (78,5%), Kemitraan Bidan dan Dukun (60,0%), , dan Kelas Ibu Hamil dan Nifas (29,2%). Persentase Puskesmas yang melakukan keempat jenis kegiatan Program Kesehatan Ibu secara lengkap adalah sebesar 7,7 persen.

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan P4K adalah sebesar 92,3 persen. Terdapat 5 kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang seluruh Puskesmasnya (100,0 Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau) melakukan kegiatan P4K, yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Kota Batam, dan Tanjungpinang. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan P4K terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), dan Natuna (83,3%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas adalah sebesar 60,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kabupaten Karimun (88,9%), Kabupaten Natuna (83,3%), Kabupaten Lingga (83,3%), dan Kabupaten Bintan (75%). Sementara Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (7,7%), Kota Tanjungpinang (16,7%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%).

Tabel 4.8.3.1.1
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	P4K	Kemitraan Dukun dan Bidan di Puskesmas	Kelas Ibu (Hamil dan Nifas)	Pelayanan Antenatal Terintegrasi	Kegiatan Lengkap Kesehatan Ibu
1	Karimun	9	100	88.9	33.3	77.8	11.1
2	Bintan	12	100	75.0	16.7	91.7	8.3
3	Natuna	12	83.3	83.3	16.7	83.3	8.3
4	Lingga	6	100	83.3	83.3	100	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	71.4	0	42.9	0
6	Kota Batam	13	100	7.7	7.7	61.5	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	100	16.7	100	100	0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**92.3**	**60.0**	**29.2**	**78.5**	**7.7**

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Nifas adalah sebesar 29,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), Kabupaten Lingga (83,3%), dan Kabupaten Karimun (33,3%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kota Batam (7,7%), Kabupaten Bintan (16,7%), dan Kabupaten Natuna (16,7%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Pelayanan Antenatal Terintegrasi di Puskesmas adalah sebesar 78,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), Kabupaten Lingga (100%), Kabupaten Bintan (91,7%) dan Kabupaten Natuna (83,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%) dan Kota Batam (61,5%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang melakukan keempat jenis kegiatan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (33,3%), Kabupaten Karimun (11,1%), Kabupaten Bintan (8,3%), dan kabupaten Natuna (8,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Tanjungpinang (0,0%).

4.8.3.2. Pelatihan Program Kesehatan Ibu

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Program Kesehatan Ibu yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Pelayanan

Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) yang diikuti tenaga Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari ketiga jenis pelatihan Program Kesehatan Ibu di provinsi Kepulauan Riau, pelatihan APN merupakan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas (92,3%) kemudian pelatihan PWS KIA (49,2%), dan pelatihan PONED (36,9%). Persentase Puskesmas yang secara lengkap mengikuti ketiga jenis pelatihan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 21,5 persen (Tabel 4.8.3.2.1.).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti pelatihan APN adalah 92,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun, Lingga, da Kota Tanjungpinang (100%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (84,6%), berikutnya Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti pelatihan PONED adalah sebesar 36,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di kota Tanjungpinang (83,3%) dan kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9)% . Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (15,4%), dan berikutnya adalah kabupaten Lingga (16,7%%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti pelatihan PWS KIA adalah sebesar 49,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (83,3%), berikutnya Kabupaten Natuna (83,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (22,2%), berikutnya Kota Batam (30,8%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti pelatihan lengkap dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7%) dan Kabupaten Bintan (25,0%). Terdapat 2 kabupaten/ kota dari 7 kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti ketiga jenis pelatihan secara lengkap dalam Program Kesehatan Ibu (0,0%), yaitu di Kabupaten Karimun dan Kota Batam.

Tabel 4.8.3.2.1.
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan pada Pelatihan Program Kesehatan Ibu Tahun 2009-2010, di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan APN	Pelatihan PONED	Pelatihan PWS-KIA	Pelatihan Lengkap Kesehatan Ibu
1	Karimun	9	100.0	33.3	22.2	0
2	Bintan	12	91.7	41.7	41.7	25.0
3	Natuna	12	91.7	41.7	83.3	41.7
4	Lingga	6	100	16.7	66.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	42.9	28.6	14.3
6	Kota Batam	13	84.6	15.4	30.8	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	100	83.3	83.3	66.7
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**92.3**	**36.9**	**49.2**	**21.5**

4.8.3.4. Pedoman Program Kesehatan Ibu

Pedoman Program Kesehatan Ibu diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Untuk Program Kesehatan Ibu, buku pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi, Acuan Asuhan Persalinan Normal (APN), Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Pedoman Kelas Ibu, Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi,.

Pedoman Program Kesehatan Ibu yang dimiliki oleh Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, yang terbanyak dimiliki adalah Buku KIA (93,8%) kemudian berturut turut Pedoman APN (81,5%), Pedoman PWS-KIA (81,5%), Pedoman Kelas Ibu (61,5%) , Buku Pedoman P4K (58,5%), Buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (53,8%), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil (49,2%), dan Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi (47,7%). Persentase Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 33,8 persen.

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pedoman APN adalah sebesar 81,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (100%), berikutnya Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7%). Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga (66,7%) dan Kota Batam (69,2%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku KIA adalah sebesar 93,8 persen. Terdapat 4 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya memiliki Buku KIA (100,0%), yaitu Kabupaten Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang. Sedangkan Persentase terendah Puskesmas memiliki Buku KIA terdapat di Kabupaten Lingga (66,7%), dan Kabupaten Bintan (91,7%).

Tabel 4.8.3.4.1.a.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman APN	Pedoman Buku KIA	Pedoman P4K	Pedoman Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal	Pedoman Kelas Ibu
1	Karimun	9	100	100	77.8	77.8	55.6
2	Bintan	12	83.3	91.7	83.3	75.0	83.3
3	Natuna	12	83.3	100	58.3	58.3	83.3
4	Lingga	6	66.7	66.7	50.0	16.7	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	100	57.1	71.4	57.1
6	Kota Batam	13	69.2	92.3	38.5	38.5	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	100	33.3	16.7	50.0
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**81.5**	**93.8**	**58.5**	**53.8**	**61.5**

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman P4K adalah sebesar 58,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas terdapat di Kabupaten Bintan (83,3%), berikutnya Kabupaten Karimun (77,8%) . Sementara Persentase terendah terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%), kemudian Kota Batam (38,5%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Pegangan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal adalah sebesar 53,8 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (77,8%), kemudian Kabupaten Bintan (75,0%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (71,45). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga (16,7%), dan berikutnya Kota Batam (38,5%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Kelas Ibu adalah sebesar 61,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (83,3), berikutnya Kabupaten Bintan dan Kab Natuna (83,3%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Batam (38,5%), dan Kota Tanjungpinang (50,0%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pedoman PWS - KIA adalah sebesar 81,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (100%), selanjutnya di ikuti Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7%), dan Kota Batam (84,6%) . Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Tanjungpinang (50,0%), dan kemudian Kabupaten Karimun (66,7%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria pada Ibu Hamil adalah sebesar 49,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%), kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), dan Kabupaten Karimun (55,6%). Sementara Persentase terendah yaitu Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (16,7%).

Tabel 4.8.3.4.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman PWS-KIA	Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malaria Pada Ibu Hamil	Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kespro	Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu
1	Karimun	9	66.7	55.6	55.6	22.2
2	Bintan	12	100	91.7	75.0	58.3
3	Natuna	12	83.3	50.0	41.7	33.3
4	Lingga	6	83.3	16.7	16.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	57.1	57.1	57.1
6	Kota Batam	13	84.6	30.8	46.2	23.1
7	Kota Tanjung Pinang	6	50.0	16.7	16.7	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**81.5**	**49.2**	**47.7**	**33.8**

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi adalah sebesar 47,7 persen.

Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (75,0%) berikutnya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), dan Kabupaten Karimun (55,6%). Sedangkan Persentase terendah Puskesmas yang memiliki Pedoman Operasional Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang dengan persentase masing-masing 16,7 persen.

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki secara lengkap seluruh pedoman tersebut di atas adalah sebesar 33,8 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (58,3%), kemudian diikuti Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 16,7%)

4.8.3.5. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan diperlukan dalam Program Kesehatan Ibu untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Program Kesehatan Ibu. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, penerimaan Umpan Balik dalam bentuk tertulis, Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Audit Maternal Perinatal (AMP). Di Provinsi Kepulauan Riau, bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu yang paling banyak diterima Puskesmas adalah dalam bentuk Audit Maternal dan Perinatal (84,6%) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota diikuti oleh pertemuan monev (76,9%), umpan balik (75,4%), dan kunjungan supervisi dan monitoring oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (67.7%). Persentase Puskesmas yang secara lengkap menerima seluruh bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 49,2 persen (Tabel 4.8.3.5.1.).

Tabel 4.8.3.5.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Ibu di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Audit Maternal Perinatal	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Karimun	9	77.8	88.9	77.8	88.9	44.4
2	Bintan	12	91.7	100	100	100	91.7
3	Natuna	12	58.3	50.0	41.7	75.0	0
4	Lingga	6	100	100	100	100	100
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	14.3	71.4	0
6	Kota Batam	13	53.8	84.6	100	69.2	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	100	100	100	100	100
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**67.7**	**75.4**	**76.9**	**84.6**	**49.2**

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 67,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 100%), selanjutnya di ikuti oleh Kabupaten Bintan (91,7%), dan Kabupaten Karimun (77,8%).

Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), berikutnya Kota Batam (53,8%) dan Kabupaten Natuna (58,3%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau Angka Provinsi untuk Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 75,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 100%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), berikutnya adalah Kabupaten Natuna (50,0%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 76,9 persen. Terdapat 4 kabupaten/ kota dari 7 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (100,0%) yaitu Kabupaten Bintan, Lingga, Kota Batam, dan Tanjungpinang. Sedangkan Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi untuk Program Kesehatan Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), kemudian berikutnya adalah Kabupaten Natuna (41,7%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Audit Maternal dan Perinatal untuk Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 84,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan, Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 100,0%) berikutnya adalah Kabupaten Karimun (88,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Batam (69,2%), dan kemudian Kepulauan Anambas (71,4%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau menerima secara lengkap seluruh bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Kesehatan Ibu adalah sebesar 49,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Tanjungpinang (masing-masing 100%) selanjutnya Kabupaten Bintan (91,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas (0,0%).

4.8.4. PROGRAM KESEHATAN BAYI DAN ANAK

4.8.4.1. Kegiatan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan kesehatan bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes ini meliputi Manajemen Asfiksia, Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Kelas Ibu Balita, Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), dan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat. Dalam lingkup Provinsi.

Dari keselurahan jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak di atas, kegiatan MTBS merupakan persentase tertinggi yang dilakukan oleh Puskesmas (78,5%) dan disusul oleh Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat (73,8%), MTBM (64,6%), SDIDTK (56,95), PKPR (50,8%), Manajemen Asfiksia (46,2%), Kelas Ibu Balita

(21,5%) dan KTA (15,4%). Persentase Puskesmas melakukan keseluruhan kegiatan di atas secara lengkap dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak sebesar 3,1 persen.

Tabel 4.8.4.1.1.a
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Manajemen Asfiksia	MTBM	MTBS	Kelas Ibu Balita	Simulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
1	Karimun	9	77.8	88.9	100.0	11.1	44.4
2	Bintan	12	50.0	75.0	100.0	33.3	91.7
3	Natuna	12	25.0	41.7	58.3	8.3	41.7
4	Lingga	6	50.0	83.3	100.0	33.3	66.7
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	0	0	0	28.6
6	Kota Batam	13	38.5	76.9	84.6	7.7	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	83.3	100.0	83.3	83.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**46.2**	**64.6**	**78.5**	**21.5**	**56.9**

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Asfiksia dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 46,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (77,8), selanjutnya Kota Tanjungpinang (66,7%), Kabupaten Bintan dan Lingga (masing-masing 50,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (25,0%) kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%) dan Kota Batam (38,5%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 64,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (88,9%), selanjutnya Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 83,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), berikutnya Kabupaten Natuna (41,7%), dan Kabupaten Bintan (75,0%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 78,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 100,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas (0,05), dan kemudian di ikuti oleh Kabupaten Natuna (58,3%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Kelas Ibu Balita dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (83,3%), kemudian Kabupaten Lingga dan Bintan (masing-masing 33,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), berikutnya Kota Batam (7,7%), dan Kabupaten Natuna (8,3%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 56,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat Kabupaten Bintan (91,7%), berikutnya disusul oleh Kota Tanjungpinang (83,3%), dan Kabupaten Lingga (66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas

terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%), dan Kabupaten Natuna (41,7%).

Tabel 4.8.4.1.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Kegiatan Program Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Penanganan Kasus Diare Pada Balita	Kegiatan Lengkap Bayi dan Anak
1	Karimun	9	11.1	44.4	66.7	0
2	Bintan	12	16.7	83.3	100.0	0
3	Natuna	12	0	25.0	58.3	0
4	Lingga	6	33.3	50.0	83.3	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	28.6	57.1	0
6	Kota Batam	13	15.4	61.5	69.2	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3	50.0	83.3	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**15.4**	**50.8**	**73.8**	**3.1**

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 15,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 33,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (0,0%), berikutnya Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), dan Kota Batam (15,4%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 50,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (83,3%), selanjutnya Kota Batam (61,5%), Kabupaten Lingga (50,0%) dan Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (25,0%), dan kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan Penanganan Kasus Diare pada Balita dengan Dehidrasi Sedang dan Berat dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 73,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (100,0%) berikutnya adalah Kabupaten Lingga (83,3%) dan Kota Tanjungpinang (83,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), dan Kabupaten Natuna (58,3%).

Persentase Puskesmas melakukan kegiatan lengkap terkait dengan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 3,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 16,7%). Sedangkan 5 kabupaten/ kota lainnya seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan secara lengkap (0,0%).

4.8.4.2. Pelatihan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Manajemen Asfiksia, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Pelatihan Pelayanan KTA, Pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), dan Pelatihan Manajemen Terpada Balita Sakit (MTBS) yang diikuti petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari keseluruhan pelatihan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang tersebut di atas, pelatihan MTBS merupakan persentase tertinggi (56,9%) yang dilakukan oleh Puskesmas, dan disusul oleh Pelatihan Manajemen Asfiksia (55,4%), Pelatihan Kelas Ibu Balita (15,4%), pelatihan Pelayanan KTA (13,8%), dan Pelatihan SDIDTK (12,3%). Dalam lingkup Provinsi, tidak ada (0,0%) Puskesmas yang petugasnya mengikuti keseluruhan pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak.

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Manajemen Asfiksia adalah sebesar 55,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (88,9%), selanjutnya Kota Tanjungpinang (83,3%), dan Kabupaten Bintan (58,3%). Sedangkan Persentase terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%), berikutnya Kabupaten Natuna (33,3%), dan Kabupaten Lingga (50,0%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Kelas Ibu Balita adalah sebesar 15,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (50,0%), selanjutnya Kabupaten Bintan (25,0%), dan Kabupaten Natuna (16,7%). Kabupaten/kota dengan persentase terendah yang menerima pelatihan Kelas Ibu Balita yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas (masing-masing 0,0%), dan Kota Batam (7,7%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan KTA dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 13,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (33,3%), berikutnya Kota Batam (23,1%), dan Kabupaten Karimun (22,2%). Terdapat 2 kabupaten/ kota yang seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti pelatihan KTA (0,0%) yaitu Kabupaten Natuna, dan Kepulauan Anambas.

Tabel 4.8.4.2.1
Persentase Puskesmas Menurut Keikutsertaan Pelatihan Program Bayi dan Anak Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Manajemen Asfiksia	Pelatihan Kelas Ibu Balita	Pelatihan KTA	Pelatihan SDIDTK	Pelatihan MTBS	Pelatihan Lengkap Kesehatan Bayi dan Anak
1	Karimun	9	88.9	11.1	22.2	0	88.9	0,0
2	Bintan	12	58.3	25.0	8.3	0	58.3	0,0
3	Natuna	12	33.3	16.7	0	8.3	41.7	0,0
4	Lingga	6	50.0	0	33.3	16.7	66.7	0,0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	0	0	0	0	0,0
6	Kota Batam	13	53.8	7.7	23.1	15.4	84.6	0,0
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	50.0	16.7	66.7	33.3	0,0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**55.4**	**15.4**	**13.8**	**12.3**	**56.9**	0,0

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) adalah sebesar 12,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7%), berikutnya Kabupaten Lingga (16,7%), dan Kota Batam (15,4%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kabupaten Karimun, Bintan, dan Kapulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 56,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (88,9%), kemudian Kota Batam (84,6%), dan Kabupaten Lingga (66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kota Tanjungpinang (33,3%), dan Kabupaten Natuna (41,7%).

Tidak ada Puskesmas di Provinsi kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti secara lengkap keseluruhan jenis pelatihan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak (0,0%)

4.8.4.3. Pedoman Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak. Jenis Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes ini meliputi, Pedoman Manajemen Asfiksia, Buku KIA, Pedoman SDIDTK, Pedoman Kelas Ibu Balita, Modul BBLR, Modul MTBS, Pedoman pelayanan KTA, dan Pedoman PKPR. Di ProvinsiKepulauan Riau, Pedoman upaya Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak terbanyak dimiliki oleh Puskesmas adalah Buku KIA (89,2%), kemudian Modul MTBS (83,1%), Pedoman Manajemen Asfiksia (64,6%), Pedoman SDIDTK (61,5%), Modul BBLR (56,9%), Pedoman PKPR (49,2%), Pedoman Kelas Ibu Balita (44,6%) dan Pedoman Pelayanan KTA (41,5%). Persentase Puskesmas yang memiliki seluruh Pedoman seperti yang disebutkan di atas dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 26,2 persen. (Tabel 4.8.4.3.1.a dan 4.8.4.3.1.b.).

Tabel 4.8.4.3.1.a.

Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman Manajemen Asfiksia	Pedoman Buku KIA	Pedoman SDIDTK	Pedoman Kelas Ibu Balita	Modul BBLR
1	Karimun	9	88.9	100.0	55.6	55.6	66.7
2	Bintan	12	91.7	91.7	83.3	58.3	83.3
3	Natuna	12	50.0	75.0	16.7	25.0	25.0
4	Lingga	6	33.3	100.0	66.7	50.0	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	71.4	57.1	57.1	57.1
6	Kota Batam	13	69.2	92.3	84.6	38.5	53.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3	100.0	66.7	33.3	83.3
KEPULAUAN RIAU		65	64.6	89.2	61.5	44.6	56.9

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Manajemen Asfiksia dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 64,6 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%) kemudian Kabupaten Karimun (88,9%), dan Kota Batam (69,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga (33,3%), Kota Tanjungpinang (33,3%), dan Kabupaten Natuna (50,0%).

Persentase Puskesmas memiliki Buku KIA dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 89,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 100%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%), kemudian Kabupaten Natuna (75,0%), dan Kabupaten Bintan (91,7%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 61,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Pedoman SDIDTK terdapat di Kota Batam (84,6%), kemudian Kabupaten Bintan (83,3%), dan Kota Tanjungpinang (66,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Natuna (16,7%), kemudian Kabupaten Karimun (55,6%), dan Kabupaten Kapulauan Anambas (57,1%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Kelas Ibu Balita dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 44,6 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (58,3%), Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), dan Kabupaten Karimun (55,6%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Natuna (25,0%), kemudian Kota Tanjungpinang (33,3%), dan Kota Batam (38,5%).

Persentase Puskesmas memiliki Modul BBLR dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 56,9 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (83,3%), Kota Tanjungpinang (83,3%), dan Kabupaten Karimun (66,7%). Sedangkan Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul BBLR terdapat di Kabupaten Natuna (25,0%), kemudian Kabupaten Lingga (33,3%), dan Kota Batam (53,8%)

Persentase Puskesmas memiliki Modul MTBS dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 83,1 persen. Persentase tertinggi terdapat di kabupaten Karimun dan lingga (masing-masing 100%). Persentase terendah Puskesmas memiliki Modul MTBS terdapat di Kabupaten Natuna (58,3%) kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%), dan Kota Tanjungpinang (83,3%).

Tabel 4.8.4.3.1.b.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pedoman Program Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Modul MTBS	Pedoman KTA	Pedoman PKPR	Pedoman Lengkap Kesehatan Ibu Balita
1	Karimun	9	100.0	44.4	66.7	33.3
2	Bintan	12	91.7	58.3	66.7	50.0
3	Natuna	12	58.3	8.3	16.7	8.3
4	Lingga	6	100.0	33.3	16.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	71.4	57.1	57.1	57.1
6	Kota Batam	13	84.6	46.2	53.8	7.7
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	50.0	66.7	16.7
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**83.1**	**41.5**	**49.2**	**26.2**

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman KTA dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 41,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (58,3), kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), dan Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Natuna (8,3%), kemudian Kabupaten Lingga (33,3%), dan Kabupaten Karimun (44,4%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman PKPR dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 49,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun, Bintan, dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 66,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Natuna (16,7%), Kabupaten Lingga (16,7%), dan Kota Batam (53,8%).

Persentase Puskesmas memiliki Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak secara lengkap dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 26,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,15), kemudian Kabupaten Bintan (50,0%), dan Kabupaten Karimun (33,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Batam (7,7%), kemudian Kabupaten Natuna (8,3%), dan Kabupaten Lingga. (16,7%).

4.8.4.4 Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Kesehatan Bayi dan Anak

Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Tabel 4.8.4.4.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Bayi dan Anak			
			Supervisi Dinkes	Umpan Balik	Pertemuan Monev	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Lengkap
1	Karimun	9	33.3	55.6	22.2	11.1
2	Bintan	12	91.7	91.7	91.7	83.3
3	Natuna	12	25.0	33.3	41.7	0
4	Lingga	6	100.0	100.0	100.0	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	14.3	0
6	Kota Batam	13	61.5	61.5	76.9	30.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	66.7	100.0	66.7
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**56.9**	**58.5**	**63.1**	**38.5**

Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak yang paling banyak diterima Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam bentuk

Pertemuan Monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (63,1%) dan diikuti oleh Umpan Balik (58,5%) kemudian Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (56,9%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk kunjungan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan kesehatan bayi dan Anak dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 56,9 persen. Persentase Puskesmas terdapat di Kabupaten Lingga (100%) dan Kota Tanjungpinang (100%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0), kemudian Kabupaten Natuna (25,0%), dan Kabupaten Karimun (33,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 58,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (100,0) kemudian Kabupaten Bintan (91,7), dan Kota Tanjungpinang (66,7). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0), kemudian Kabupaten Natuna (33,3), dan Kabupaten Karimun (55,6).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk pertemuan monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak dalam lingkup Provinsi adalah sebesar 63,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (100,0) dan Kota Tanjungpinang (100) kemudian Kabupaten Bintan (91,7). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3), kemudian Kabupaten Karimun (22,2), dan Kabupaten Natuna (41,7).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak adalah sebesar 38,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (100,0) kemudian Kabupaten Bintan (83,3) dan Kota Tanjungpinang (66,7). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (0) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (0).

4.8.5. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

4.8.5.1 Kegiatan Program Keluarga Berencana

Jenis Kegiatan dalam Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi), Penanganan Komplikasi Kontrasepsi, dan Konsultasi KB (Keluarga Berencana). Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau adalah Konsultasi KB 96,9 persen, Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) 87,7 persen, dan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi 61,5 persen. Persentase Puskesmas yang melaksanakan ketiga kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 60 persen (Tabel 4.8.5.1.1).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi Mantap (IUD, Susuk, Vasektomi) adalah sebesar

87,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi , terdapat di Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, masing-masing mencapai 100 persen, sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (50,0%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kegiatan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi adalah sebesar 61,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Batam (84,6%), kemudian Kabupaten Bintan dan Lingga (masing-masing 83,3%), sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (25,0%), Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), dan Kota Tanjungpinang (50,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB adalah sebesar 96,9 persen . Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang seluruh Puskesmasnya melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Pelayanan Konsultasi KB terdapat di Kabupaten Natuna (83,3%).

Tabel 4.8.5.1.1.

Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Pelayanan KB			
			Pemasangan Alat Kontrasepsi	Penanganan Komplikasi	Konsultasi KB	Kegiatan Lengkap
1	Karimun	9	100.0	55.6	100.0	55.6
2	Bintan	12	100.0	83.3	100.0	83.3
3	Natuna	12	50.0	25.0	83.3	16.7
4	Lingga	6	100.0	83.3	100.0	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	71.4	42.9	100.0	42.9
6	Kota Batam	13	100.0	84.6	100.0	84.6
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	50.0	100.0	50.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**87.7**	**61.5**	**96.9**	**60.0**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kegiatan lengkap Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 60 persen. Persentase Puskesmas tertinggi adalah Kota Batam (84,6%), Kabupaten Bintan (83,3%), Kabupaten Lingga (83,3%). Persentase Puskesmas terendah melakukan ketiga kegiatan di atas terdapat di Kabupaten Natuna (16,7%), Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), dan Kota Tanjungpinang (50,0%).

4.8.5.2 Pelatihan Program Keluarga Berencana

Jenis Pelatihan Pelayanan Keluarga Berencana yang dikumpulkan Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Program KB, Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi, dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi yang diikuti tenaga Puskesmas pada tahun 2009 dan tahun 2010. Pelatihan Program KB sebesar 58,5 persen, merupakan persentase tertinggi yang diikuti puskesmas , kemudian diikuti oleh Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi

(43,1%), dan Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi (7,7%). Persentase puskesmas yang mengikuti secara lengkap ketiga pelatihan di atas sebesar 7,7 persen (Tabel 4.8.5.2.1.).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti Pelatihan Program KB sebesar 58,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (83,3%) Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna (66,7%), dan Lingga (66,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%), kemudian Kota Batam (38,5%), dan Kabupaten Bintan (58,3%) .

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi sebesar 43,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (83,3%), kemudian Kabupaten Natuna (75,0%), dan Kabupaten Bintan (41,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), kemudian Kota Batam (30,0%), dan Kabupaten Lingga (33,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%), kemudian Kabupaten Natuna (16,7%), dan Kabupaten Bintan (8,35). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas dan Kota Batam (masing-masing 0,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti secara lengkap ketiga jenis pelatihan Program Pelayanan KB sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%), kemudian Kabupaten Natuna (16,7%), dan Kabupaten Bintan (8,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah ada di Kabupaten Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas dan Kota Batam (masing-masing 0,0%).

Tabel 4.8.5.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Pelayanan KB Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Program KB	Pelatihan Pemasangan Alat Kontrasepsi	Pelatihan Penanganan Komplikasi Kontrasepsi	Pelatihan Lengkap
1	Karimun	9	77.8	22.2	0	0
2	Bintan	12	58.3	41.7	8.3	8.3
3	Natuna	12	66.7	75.0	16.7	16.7
4	Lingga	6	66.7	33.3	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	14.3	0	0
6	Kota Batam	13	38.5	30.8	0	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	83.3	33.3	33.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**58.5**	**43.1**	**7.7**	**7.7**

4.8.5.3. Pedoman Program Keluarga Berencana

Untuk Pelayanan Keluarga Berencana, jenis pedoman yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, Panduan Audit Medik Pelayanan KB, Panduan Baku Klinis KB, Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Yankespro) Terpadu, Panduan Kontrasepsi Darurat, dan Panduan Penanggulangan Efek

Samping/ Komplikasi Kontrasepsi. Ketersediaan buku pedoman Pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi adalah ketersediaan Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (58,5%), kemudian Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi (33,8%), Panduan Baku Klinis KB (32,3%), Panduan Kontrasepsi Darurat (32,3%), Panduan Audit Medik Pelayanan KB (30,8%), dan Pedoman Yankespro Terpadu (29,2%). Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki keseluruhan jenis pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 21,5 persen (Tabel 4.8.5.3.1.a-b).

Tabel 4.8.5.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program KB			
			Panduan Pelayanan Kontrasepsi	Panduan Audit Medik Pelayanan KB	Panduan Klinis KB	Pedoman Yankespro Terpadu
1	Karimun	9	33.3	0	22.2	0
2	Bintan	12	91.7	83.3	58.3	66.7
3	Natuna	12	33.3	16.7	8.3	8.3
4	Lingga	6	33.3	16.7	16.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	42.9	42.9	42.9
6	Kota Batam	13	69.2	23.1	46.2	30.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	16.7	16.7	33.3
KEPULAUAN RIAU		65	58.5	30.8	32.3	29.2

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi sebesar 58,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%) kemudian Kota Tanjungpinang (83,3%), dan Kota Batam (69,2%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Pelayanan Kontrasepsi terdapat di Kabupaten Karimun, Natuna, dan Lingga (masing-masing 33,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Panduan Audit Medik Pelayanan KB sebesar 30,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (83,35),kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), dan Kota Batam (23,1%). Persentase Puskesmas terendah yang memiliki buku Panduan Audit Medik Pelayanan KB terdapat di Kabupaten Karimun (0,0%), kemudian Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Panduan Baku Klinis KB sebesar 32,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (58,3%) kemudian Kota Batam (46,2%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (8,35), kemudian Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Pedoman Yankespro Terpadu sebesar 29,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (66,7%), kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), dan Kota

Tanjungpinang (33,3%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (0,0%), kemudian Kabupaten Natuna (8,3%), dan Kabupaten Lingga (16,7%).

Tabel 4.8.5.3.1.b.menunjukkan Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Panduan Kontrasepsi Darurat sebesar 32,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (75,0%), kemudian Kota Tanjungpinang (50,0%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (8,3%), kemudian Kabupaten Karimun (11,1%), dan Kabupaten Lingga (16,7%).

Tabel 4.8.5.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan KB di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program KB		
			Panduan Kontrasepsi Darurat	Panduan Penanggulangan Efek Samping Kontrasepsi	Pedoman Lengkap
1	Karimun	9	11.1	11.1	0
2	Bintan	12	75.0	66.7	50.0
3	Natuna	12	8.3	16.7	8.3
4	Lingga	6	16.7	16.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	42.9	42.9	42.9
6	Kota Batam	13	23.1	46.2	15.4
7	Kota Tanjung Pinang	6	50.0	16.7	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**32.3**	**33.8**	**21.5**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku Panduan Penanggulangan Efek Samping/ Komplikasi Kontrasepsi sebesar 33,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (66,75), kemudian Kota Batam (46,2%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (11,1%), dan Kabupaten Natuna, Lingga, Kota Tanjungpinang (masing-masing 16,7%)

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki lengkap keenam buku pedoman/ panduan seperti tersebut di atas sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (50,0%), kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 16,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (0,05), kemudian Kabupaten Natuna (8,3%), dan Kota Batam (15,4%).

4.8.5.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Keluarga Berencana

. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam bentuk Pertemuan Monev yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

(61,5%) kemudian Umpan Balik (55,4%), dan Kunjungan Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (53,8%). Persentase Puskesmas yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap (dalam bentuk Kunjungan Monev, Umpan Balik dan Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota) adalah sebesar 41,5 persen.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 53,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di kabupaten Bintan (91,7%), kemudian Kabupaten Lingga (66,7%), dan Kota Tanjungpinang (66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), Kabupaten Karimun (44,4%), dan Kota Batam (46,2%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk Umpan Balik untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 55,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (100%), Kabupaten Bintan (83,3%), dan Kota Tanjungpinang (66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian Kabupaten Natuna (33,3%), dan Kabupaten Karimun (44,4%).

Tabel 4.8.5.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Pelayanan KB			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Karimun	9	44.4	44.4	44.4	33.3
2	Bintan	12	91.7	83.3	91.7	66.7
3	Natuna	12	50.0	33.3	58.3	25.0
4	Lingga	6	66.7	100.0	83.3	66.7
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	14.3	0
6	Kota Batam	13	46.2	61.5	61.5	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	66.7	66.7	66.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**53.8**	**55.4**	**61.5**	**41.5**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam bentuk mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebesar 61,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%), kemudian Kabupaten Lingga (83,3%), dan Kota Tanjungpinang (66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah mengikuti Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi untuk Pelayanan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%), kemudian Kabupaten Karimun (44,4%), dan Kabupaten Natuna (58,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima ketiga jenis Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan secara lengkap untuk Pelayanan Keluarga Berencana sebesar 41,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Bintan, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%), kemudian kabupaten Natuna (25,0%), dan Kabupaten Karimun (33,3%).

4.8.6. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

4.8.6.1. Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jenis Kegiatan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 bulan, Pemberian Kapsul Vit-A pada Balita, Pemberian Tablet Besi (90 tablet) pada Ibu Hamil, Pemberian PMT Pemulihan Balita pada Gakin dan Penimbangan Balita. Dari keenam jenis kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang paling banyak dilakukan Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, adalah kegiatan Pemberian kapsul vitamin A dan penimbangan balita (100,0%), pemberian tablet besi pada ibu hamil (96,9%), Pemberian ASI Ekslusif dan MP-ASI anak umur 6-24 bulan (86,2%), pemberian PMT pemulihan balita pada Gakin (81,55) dan. Persentase Puskesmas yang melaksanakan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat seperti tersebut di atas secara lengkap adalah sebesar 64,6 persen (Tabel 4.8.6.1.1.a-b).

Tabel 4.8.6.1.1.a
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Pemberian ASI Eksklusif	Pemberian MP-ASI Anak Umur 6-24 Bulan	Pemberian Kapsul Vitamin A	Pemberian Tablet Besi
1	Karimun	9	88.9	100.0	100.0	100.0
2	Bintan	12	91.7	100.0	100.0	100.0
3	Natuna	12	91.7	83.3	100.0	100.0
4	Lingga	6	50.0	83.3	100.0	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	71.4	71.4	100.0	71.4
6	Kota Batam	13	100.0	69.2	100.0	100.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	100.0	100.0	100.0
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**86.2**	**86.2**	**100.0**	**96.9**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan peningkatan pemberian ASI eksklusif adalah sebesar 86,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Kota Batam (100,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Lingga (50,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan adalah sebesar 86,2persen. Persentase tertinggi adalah Kabupaten Karimun, Bintan dan Kota Tanjungpinang (100,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (69,2%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A pada balita adalah sebesar 100 persen, artinya seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan pemberian kapsul Vit-A.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang kegiatan pemberian tablet besi (90 tablet) pada ibu hamil adalah sebesar 96,9 persen. Hanya 1 Kabupaten saja yang belum semua puskesmas melakukan kegiatan pemberian tablet besi pada ibu hamil yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%), sedangkan 6 Kabupaten/Kota lainnya melakukan kegiatan pemberian tablet besi 100 persen.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pemberian PMT pemulihan balita Gakin adalah sebesar 81,5persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Lingga dan Kota Tanjungpinang (100%). Seadangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan penimbangan bayi adalah sebesar 100 persen.

Tabel 4.8.6.1.1.b
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk Pada Gakin	Penimbangan Balita	Kegiatan Lengkap
1	Karimun	9	100.0	100.0	88.9
2	Bintan	12	100.0	100.0	91.7
3	Natuna	12	75.0	100.0	58.3
4	Lingga	6	100.0	100.0	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	100.0	14.3
6	Kota Batam	13	69.2	100.0	53.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	83.3
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**81.5**	**100.0**	**64.6**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan keenam kegiatan program perbaikan gizi masyarakat secara lengkap adalah sebesar 64,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten LIngga (50,0%).

4.8.6.2. Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi Pelatihan Konseling ASI, Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan, Pelatihan Konseling MP-ASI, dan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk yang diikuti oleh tenaga Puskesmastahun 2009 dan 2010. Dari keseluruhan pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat tersebut yang paling banyak diikuti Puskesmas di Kepulauan Riau adalah Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan (58,5%), Tata Laksana Gizi Buruk (43,1%) diikuti oleh Pelatihan Konseling ASI (33,8%),dan Pelatihan Konseling MP-ASI (23,1%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti pelatihan konseling ASI adalah sebesar 33,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (83,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah yang petugasnya mengikutipelatihan konseling ASI terdapat di Kabupaten Bintan (8,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti pelatihan pemantauan pertumbuhan adalah sebesar 58,5persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti pelatihan konseling MP-ASI adalah sebesar 23,1persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (0,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk adalah sebesar 43,1persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang (66,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.8.6.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2009-2010 di ProvinsiKepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Konseling ASI	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan	Pelatihan Konseling MP-ASI	Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk
1	Karimun	9	22.2	55.6	0	66.7
2	Bintan	12	8.3	41.7	25.0	25.0
3	Natuna	12	58.3	83.3	33.3	58.3
4	Lingga	6	33.3	50.0	33.3	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	14.3	14.3	0
6	Kota Batam	13	23.1	61.5	15.4	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	100.0	50.0	66.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**33.8**	**58.5**	**23.1**	**43.1**

4.8.6.3. Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat,buku Pedoman yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi, Buku Surveilans Gizi, Buku Pegangan Kader, Buku Manajemen Pemberian Vitamin A, Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe, Buku Pedoman ASI, Buku Pedoman Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium, Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan, dan Buku Pengelolaan MP-ASI untuk anak usia 6-24 bulan. Persentase Puskesmas untuk ketersediaan buku pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, tertinggi adalah ketersediaan Buku Pegangan Kader (78,5%) diikuti oleh ketersediaan Buku Manajemen Pemberian Vitamin A (72,3%)StandarPemantauan Pertumbuhan (70,8%), Buku Pedoman MP-ASI dan Buku Pedoman ASI (60,0%), Buku Pengelolaan MP-ASI dan Pedoman Pemberian Garam Beryodium (55,4%), Panduan Pemberian Tablet Fe (47,7%). Persentase Puskesmas yang memiliki keseluruhan jenis Pedoman seperti yang disebutkan di atas adalah sebesar 33,8 persen.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Surveilans sebesar 52,3persen. Persentase tertinggi Puskesmas memiliki Buku Surveilans Gizi terdapat di Kabupaten Lingga (100%), Kabupaten Bintan (75,0%), Kota Batam(53,8%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kabupaten Karimun (33,3%), Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%) dan Kota Tanjungpinang (16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pegangan Kader adalah sebesar 78,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan dan Kota Batam (100%) kemudian Kabupaten Karimun (88,9%), Kota Tanjungpinang (83,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%).

Tabel 4.8.6.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Pedoman Gizi	Buku Pegangan Kader	Buku Manajemen Pemberian Vitamin A	Panduan Pemberian Tablet Fe
1	Karimun	9	33.3	88.9	100.0	55.6
2	Bintan	12	75.0	100.0	100.0	75.0
3	Natuna	12	50.0	66.7	58.3	33.3
4	Lingga	6	100.0	50.0	83.3	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	28.6	42.9	28.6
6	Kota Batam	13	53.8	100.0	76.9	61.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	16.7	83.3	16.7	33.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**52.3**	**78.5**	**72.3**	**47.7**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Vit A adalah sebesar 72,3 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten

Karimun dan Bintan (100%), kemudian Kabupaten Lingga (83,3%) dan Kota Batam (76,9%). Sedangkan Persentase terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%) dan Kota Tanjungpinang (16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Manajemen Pemberian Tablet Fe adalah sebesar 47,7 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan(75,0%),kemudian Kota Batam (61,5%), Kabupaten Karimun (55,6%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang (33,3%), Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%)dan Kabupaten Lingga (16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman ASI adalah sebesar 60,0 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (100%) kemudian Kabupaten Bintan (91,7%) dan Kota Batam (69,2%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Tanjungpinang (50,0%), Kabupaten Natuna (33,3%), Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%) dan Kabupaten Lingga (16,7%).

Tabel 4.8.6.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di ProvinsiKepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Pedoman ASI	Pedoman MP-ASI	Pedoman Pemberian Garam Beryodium
1	Karimun	9	100.0	77.8	77.8
2	Bintan	12	91.7	75.0	91.7
3	Natuna	12	33.3	50.0	25.0
4	Lingga	6	16.7	33.3	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	28.6	42.9
6	Kota Batam	13	69.2	69.2	61.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	50.0	66.7	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**60.0**	**60.0**	**55.4**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memilik Buku Pedoman MP-ASI adalah sebesar 60,0persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (77,8%), kemudian kabupaten Bintan (75,0%), Kota Batam (69,2%) dan Kota Tanjungpinang (66,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%). Kabupaten Lingga (33,3%) dan Kabupaten Natuna (50,0%),

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Pemberian Garam Beriodium adalah sebesar 55,4 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%), Kemudian Kabupaten karimun (77,8%), Kota Batam(61,5%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Tanjungpinang (16,7%), Kabupaten Natuna (25,0%), Kepulauan Anambas (42,9%, dan Kabupaten Lingga (50,0%)

Tabel 4.8.6.3.1.c. menunjukkan Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan adalah sebesar 70,8 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%), Kabupaten Karimun (88,9%), Kota

Batam (76,9%) dan Kabupaten Natuna (75,0%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga (16,7%), Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), dan Kota Tanjungpinang (66,7%), .

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pengelolaan MP-ASI adalah sebesar 55,4 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (75,0%), Kota Batam (69,2%), Kabupaten Karimun (66,7%), Kabupaten Natuna(58,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%), Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%) dan Kabupaten Lingga (16,7%).

Tabel 4.8.6.3.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat di ProvinsiKepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
			Buku Pemantauan Pertumbuhan	Buku Pengelolaan MP-ASI	Pedoman Lengkap
1	Karimun	9	88.9	66.7	22.2
2	Bintan	12	91.7	75.0	75.0
3	Natuna	12	75.0	58.3	16.7
4	Lingga	6	16.7	16.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	42.9	28.6	14.3
6	Kota Batam	13	76.9	69.2	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	33.3	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**70.8**	**55.4**	**33.8**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki keseluruhan pedoman secara lengkap untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 33,8 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (75,0%), Kemudian Kota Batam (46,2%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%) Kabupaten Natuna, Lingga dan Kota Tanjungpinang (16,7%) dan Kabupaten Karimun (22,2%).

4.8.6.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengawasan, Evaluasi danBimbingan diperlukan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Bentuk Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang diterima Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau, tertinggi adalah dalam bentuk Pertemuan Monitoring dan Evaluasi (72,3%), Umpan Balik Laporan (69,2%), Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota (67,7%). Persentase puskesmas yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk Pengawasan, evaluasi dan Bimbingan program perbaikan Gizi masyarakat adalah 55,4 persen.(Tabel 4.8.6.4.1).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 67,7persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kabupaten Bintan (91,7%), Kota Batam (84,6%) dan Kabupaten Lingga (83,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (55,6%), Kabupaten Natuna (50,0%) dan Kepulauan Anambas (0,0%) persen.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk Umpan Balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 69,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang (100%), Kabupaten Lingga (83,3%), Kota Batam (76,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Tabel 4.8.6.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Karimun	9	55.6	55.6	55.6	22.2
2	Bintan	12	91.7	100.0	91.7	83.3
3	Natuna	12	50.0	50.0	50.0	33.3
4	Lingga	6	83.3	83.3	100.0	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	0	14.3	14.3	0
6	Kota Batam	13	84.6	76.9	92.3	69.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**67.7**	**69.2**	**72.3**	**55.4**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan,evaluasi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 72,3 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (100%), kemudian Kota Batam (92,3%), Kabupaten Bintan (91,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan,evaluasi dan bimbingan untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah sebesar 55,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%), Kabupaten Bintan dan Lingga (83,3%), Kota Batam (69,2%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) , Kabupaten Karimun (22,2%) dan Kabupaten Natuna (33,3%) .

4.8.7. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

4.8.7.1. Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular

Kegiatan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Program TB paru, Program ISPA, Program Diare, Program DBD, Program Malaria, Program Kusta, Program Schistosomiasis, Program HIV-AIDS, Program Filariasis, Surveilans Terpadu, dan Program Rabies.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program TB Paru sebesar 100,0 persen,

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia sebesar 93,8 persen. Terdapat 4 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya melakukan Program ISPA/Pneumonia. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7%), dan Kabupaten Natuna dan Lingga (83,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Diare adalah sebesar 98,5 persen. Terdapat 6 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya melakukan Program Diare. Sedangkan Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Diare terdapat di Kabupaten Natuna (91,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program DBD adalah sebesar 84,6 persen. Terdapat 4 kabupaten/ kota yang semua Puskesmasnya melakukan Program DBD, yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, Sedangkan Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program DBD adalah Kabupaten Natuna (41,7%).

Tabel 4.8.7.1.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program TB Paru	Program ISPA/ Pneumonia	Program Diare	Program DBD
1	Karimun	9	100.0	100.0	100.0	100.0
2	Bintan	12	100.0	100.0	100.0	100.0
3	Natuna	12	100.0	83.3	91.7	41.7
4	Lingga	6	100.0	83.3	100.0	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	100.0	85.7	100.0	71.4
6	Kota Batam	13	100.0	100.0	100.0	100.0
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**100.0**	**93.8**	**98.5**	**84.6**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Malaria adalah sebesar 96,9 persen. Terdapat 5 kabupaten/ kota yang keseluruhan

Puskesmasnya melakukan Program Malaria. Persentase Puskesmas terendah melakukan kegiatan Program Malaria terdapat di Kota Batam (92,3%) dan Kabupaten Natuna (91,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Kusta adalah sebesar 58,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan Program Kusta terdapat di Kota Tanjungpinang (100,0%), Karimun (88,9%), Kota Batam (76,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga (50,0%), Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%) dan Kabupaten Natuna (16,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Schistosomiasis adalah sebesar 1,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna (8,3%). Terdapat 6 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan Program Schistosomiasis (0,0).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program HIV-AIDS adalah sebesar 44,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (75,0%), Kota Tanjungpinang (66,7%), Kota Batam (61,5%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Lingga (50,0%), Kabupaten Natuna (41,7%) dan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas masing- masing0,0% persen.

Tabel 4.8.7.1.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program Malaria	Program Kusta	Program Schistosomiasis	Program HIV-AIDS
1	Karimun	9	100.0	88.9	0	0
2	Bintan	12	100.0	50.0	0	75.0
3	Natuna	12	91.7	16.7	8.3	41.7
4	Lingga	6	100.0	50.0	0	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	100.0	42.9	0	0
6	Kota Batam	13	92.3	76.9	0	61.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	0	66.7
KEPULAUAN RIAU		65	96.9	58.5	1.5	44.6

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Filariasis adalah sebesar 40,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (77,8%), Kabupaten Bintan, Lingga, dan Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (38,5%), Kabupaten Natuna (16,7%) dan Kabupaten kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Surveilans Terpadu adalah sebesar 75,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (100%), Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (83,3%), Kabupaten

Karimun (77,8%) Kota Batam (76,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%) dan Kabupaten Natuna (50,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan Program Rabies adalah sebesar 23,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (55,6%), Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (0,0) Kabupaten Natuna (8,3) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap adalah sebesar 1,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna (8,3). Terdapat 6 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan melakukan seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular secara lengkap (0,0%), seperti terlihat pada tabel 4.8.7.1.1.c.

Tabel 4.8.7.1.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Program Filariasis	Surveilans Terpadu	Program Rabies	Kegiatan Lengkap
1	Karimun	9	77.8	77.8	55.6	0
2	Bintan	12	50.0	100.0	25.0	0
3	Natuna	12	16.7	50.0	8.3	8.3
4	Lingga	6	50.0	83.3	33.3	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	57.1	14.3	0
6	Kota Batam	13	38.5	76.9	0	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	50.0	83.3	50.0	0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**40.0**	**75.4**	**23.1**	**1.5**

4.8.7.2. Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan TB Paru, ISPA/Pneumonia, Diare, DBD, Kusta, Schistosomiasi, Pencegahan HIV-AIDS, Pengenalan HIV-AIDS, Filariasis, Rabies, Pelatihan Gerak Cepat yang diikuti oleh tenaga Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau Jenis pelatihan Upaya Pengendalian Penyakit Menular dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas adalah pelatihan TB Paru (87,7%), kemudian pelatihan ISPA (18,5%) dan pelatihan Diare (16,9%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit TB Paru adalah sebesar 87,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%) kemudian Kota Batam (92,3%), Kabupaten Bintan dan Natuna (91,7%) persen, Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7%) persen,

Kabupaten Karimun (77,8%) persen. Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Lingga (66,7%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia adalah sebesar 18,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%) kemudian Kota Batam (23,1%), Kabupaten Bintan (16,7%), Sedangkan Kabupaten/ Kota yang Puskesmas nya tidak ada mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit ISPA/Pneumonia terdapat di Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Diare adalah sebesar 16,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%),kemudian Kota Batam (30,8%). Sedangkan Persentase terendah adalah di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu (0,0%) dan Kabupaten Bintan (8,3%). .

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit DBD adalah sebesar 15,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7),kemudian Kabupaten Bintan (25,0%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) dan Kota Batam (23,1%). .Tabel 4.8.7.2.1.a.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Malaria adalah sebesar 63,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kab Bintan (91,7%) kemudian Kepulauan Anambas (85,7%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam (30,8%) dan Kabupaten Lingga (59,0%).

.

Tabel 4.8.7.2.1.a
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan TB Paru	Pelatihan ISPA/ Pneumonia	Pelatihan Diare	Pelatihan DBD	Pelatihan Malaria
1	Karimun	9	77.8	11.1	0.0	0.0	66.7
2	Bintan	12	91.7	16.7	8.3	25.0	91.7
3	Natuna	12	91.7	0.0	0.0	0.0	58.3
4	Lingga	6	66.7	0.0	0.0	0.0	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	0.0	0.0	0.0	85.7
6	Kota Batam	13	92.3	23.1	30.8	23.1	30.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	66.7	66.7
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**87.7**	**18.5**	**16.9**	**15.4**	**63.1**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Kusta adalah sebesar 16,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100%) kemudian Kabupaten Bintan (41,7%). Sedangkan

Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu 0,0 persen.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan Angka Provinsi untuk Puskesmasyang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Schistosomiasis adalah sebesar 0,0 persen, artinya tidak ada satu kabupaten/ kotapun yang petugasnya mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Penyakit Schistosomiasis.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDSadalah sebesar 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat Kota Tanjungpinang (50,0%) kemudian Kabupaten Natuna (33,3%), Kota Batam (30,8%) dan Kabupaten Bintan (25,05) persen. Terdapat 3 kabupaten yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS (0,0%) yaitu Kabupaten Karimun, Lingga,dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

.

Tabel 4.8.7.2.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Kusta	Pelatihan Schistosomiasis	Pelatihan Pencegahan HIV-AIDS	Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS
1	Karimun	9	0	0	0	11.1
2	Bintan	12	41.7	0	25.0	16.7
3	Natuna	12	0	0	33.3	16.7
4	Lingga	6	0	0	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	0	0
6	Kota Batam	13	0	0	30.8	30.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	0	50.0	33.3
KEPULAUAN RIAU		65	16.9	0	21.5	16.9

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDSadalah sebesar 16,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%) kemudian Kota Batam (30,8%), Kabupaten Bintan dan Natuna (16,7%) dan Kabupaten Karimun (11,1%) . Terdapat 2 kabupaten dari 7 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Pengenalan HIV-AIDS (0,0%) yaitu Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis adalah sebesar 4,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (16,7%) kemudian Kota Batam (7,7%). Terdapat 5 kabupaten/ kota yang keseluruhan petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Filariasis yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies adalah sebesar 7,7 persen. Persentase Puskesmas yang mengikuti

Pelatihan Penatalaksanaan Rabies terdapat di Kabupaten Karimun (55,6%). Sedangkan Terdapat 6 kabupaten/kota lain, seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Penatalaksanaan Rabies (0,0%) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.

Tabel 4.8.7.2.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular Tahun 2009-2010 di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Filariasis	Pelatihan Rabies	Pelatihan Tim Gerak Cepat	Pelatihan Lengkap
1	Karimun	9	0	55.6	0	0
2	Bintan	12	16.7	0	0	0
3	Natuna	12	0	0	8.3	0
4	Lingga	6	0	0	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	0	0
6	Kota Batam	13	7.7	0	0	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	0	0	0
KEPULAUAN RIAU		65	4.6	7.7	1.5	0

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat adalah sebesar 1,5 persen. Persentase Puskesmas yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat terdapat hanya di Kabupaten Natuna (8,3%). Sedangkan di 6 kabupaten/ kota seluruh petugas Puskesmasnya tidak mengikuti Pelatihan Tim Gerak Cepat (0,0%).

Dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada satupun (0,0%) Puskesmas yang secara lengkap mengikuti keseluruhan pelatihan Program Pengendalian Penyakit Menular.

4.8.7.3. PedomanProgram PengendalianPenyakit Menular

Jenis Pedoman pelaksanaan Upaya Pengendalian Penyakit Menular yang dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 meliputi: Penanggulangan TB Paru, PenanggulanganISPA, Penanggulangan Diare, Penanggulangan DBD, Penanggulangan Malaria, Penanggulangan Kusta, Penanggulangan Schistosomiasis, Pencegahan HIV-AIDS, Penanggulangan Filariasis, pedoman KLB dan Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenza.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Penanggulangan TB Paru adalah sebesar 89,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun (100%) diikuti oleh Kabupaten Natuna (91,7%), Kabupaten Kepulauan Anambas (85,7%), Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (83,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Batam (76,9%).

Tabel 4.8.7.3.1.a.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Pedoman Penanggulangan TB Paru	Pedoman Penanggulangan ISPA	Pedoman Penanggulangan Diare	Pedoman Penanggulangan DBD
1	Karimun	9	100.0	77.8	77.8	77.8
2	Bintan	12	100.0	91.7	58.3	58.3
3	Natuna	12	91.7	75.0	75.0	75.0
4	Lingga	6	83.3	16.7	33.3	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	85.7	0	14.3	28.6
6	Kota Batam	13	76.9	69.2	61.5	61.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	66.7	66.7	50.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**89.2**	**63.1**	**58.5**	**58.5**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan ISPAadalah sebesar 63,1 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%) kemudian Kabupaten Karimun (77,8%), Kabupaten Natuna (75,0%), Kota Batam (69,2&), Kota Tanjungpinang (66,7%). Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) Kemudian Kabupaten Lingga (16,7%) .

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Diare adalah sebesar 58,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (77,8%) kemudian Kabupaten Natuna (75,0%), Kota Tanjungpinang (66,7%), Kota Batam (61,5%), Kabupaten Bintan (58,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3% kemudian Kabupaten Lingga (33,3%)).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan DBDadalah sebesar 58,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (77,8%) kemudian Kabupaten Natuna (75,0%), Kota Batam (61,5%), Kabupaten Bintan (58,3%), Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di , Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%) kemudian Kabupaten Lingga (33,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Malaria adalah sebesar 81,5 persen. Persentase terdapat di Kabupaten Bintan (100%) kemudian Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (83,3%), Kabupaten Karimun (77,8%) persen, Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kota Batam (69,2%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Kusta adalah sebesar 52,3 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7%) kemudian Kota Batam (61,5%), Kabupaten Bintan dan Natuna (58,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu 0,0 persen.

Tabel 4.8.7.3.1.b.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Pedoman Penanggulangan Malaria	Pedoman Penanggulangan Kusta	Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis	Pedoman Penanggulangan HIV-AIDS
1	Karimun	9	77.8	55.6	22.2	44.4
2	Bintan	12	100.0	58.3	25.0	41.7
3	Natuna	12	83.3	58.3	50.0	75.0
4	Lingga	6	83.3	50.0	0	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	71.4	0	0	0
6	Kota Batam	13	69.2	61.5	46.2	53.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	66.7	33.3	33.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**81.5**	**52.3**	**29.2**	**44.6**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis adalah sebesar 29,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna (50,0%), kemudian Kota Batam (46,2%), Kota Tanjungpinang (33,3%), Kabupaten Bintan (25,0%) dan Kabupaten Karimun (22,2%). Terdapat 2 kabupaten yang keseluruhan Puskesmasnya tidak memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Schistosomiasis, yaitu Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan HIV-AIDSadalah sebesar 44,6 persen. Persentase terdapat di Kabupaten Natuna (75,0%) kemudian Kota Batam (53,8%), Kabupaten Karimun (44,4%), Kabupaten Bintan (41,7%), Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (33,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.8.7.3.1.c.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular di ProvinsiKepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Pedoman Penanggulangan Filariasis	Pedoman Penanggulangan KLB	Pedoman Penanggulangan Rabies	Pedoman Penanggulangan Avian Influenza
1	Karimun	9	33.3	33.3	55.6	55.6
2	Bintan	12	25.0	58.3	33.3	50.0
3	Natuna	12	66.7	75.0	50.0	66.7
4	Lingga	6	16.7	50.0	16.7	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	0	0
6	Kota Batam	13	46.2	46.2	46.2	69.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3	50.0	33.3	50.0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**35.4**	**47.7**	**36.9**	**50.8**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Penanggulangan Filariasis adalah sebesar 35,4 persen. Persentase tertinggi terdapat di

Kabupaten Natuna (66,7%) kemudian Kota Batam (46,2%), Kabupaten Karimun dan Kota Batam (33,3%) dan Kabupaten Bintan (25,0%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memilikiBuku Pedoman Penanggulangan KLB adalah sebesar 47,7 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna (75,0%) kemudianKabupaten Bintan (58,3%), Kabupaten Lingga dan Kota Batam (50,0%), Kota Batam (46,2%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) .

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Penanggulangan Rabies adalah sebesar 36,9 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Karimun (55,6%) kemudian Kabupaten Natuna (50,0%) dan Kota Batam (46,2%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) kemudian Kabupaten Lingga (16,7%) dan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang (33,3%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Buku Pedoman Surveilans Integrasi Avian Influenzaadalah sebesar 50,8 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Batam (69,2%) kemudian Kabupaten Natuna (66,7%), Kabupaten Karimun (55,6%), Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang (50,0%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) dan Kabupaten Lingga (33,3).

4.8.7.4. Pengawasan, Evalusi dan BimbinganProgramPengendalianPenyakit Menular

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Upaya PengendalianPenyakit Menular untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan program. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa Kunjungan Supervisi dari Dinas Kesehatan, Umpan Balik dalam bentuk tertulis, dan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Bentuk pengawasan, evalusi dan bimbingan yang paling banyak diterima Puskesmas dalam Upaya PengendalianPenyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam bentuk Kunjungan Supervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas (84,6%) dan diikuti oleh Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota(76,9%) dan kemudian Umpan Balik (81,5%). Persentase Puskesmas yang secara lengkap menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk kunjungan Supervisi, Umpan Balik dan Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 56,9 persen.

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima Pengawasan, Evalusi Dan Bimbingan dalam bentuk Kunjungan Supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota ke Puskesmas untuk UpayaPengendalianPenyakit Menular adalah sebesar 84,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (100%) kemudian Kabupaten Bintan (91,7%), Kabupaten Karimun (88,9%), Kota Batam (84,6%), Kabupaten Natuna (75,0%) sedangkan persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%).

Tabel 4.8.7.4.1.

Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Pengendalian Penyakit Menular di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Pengendalian Penyakit Menular			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Karimun	9	88.9	88.9	55.6	44.4
2	Bintan	12	91.7	100.0	100.0	91.7
3	Natuna	12	75.0	75.0	58.3	25.0
4	Lingga	6	100.0	100.0	100.0	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	42.9	71.4	28.6
6	Kota Batam	13	84.6	69.2	76.9	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	83.3	83.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**84.6**	**81.5**	**76.9**	**56.9**

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk umpan balik untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 81,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan , Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (100%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kepulauan Anambas (42,9%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan, evalusi dan bimbingan dalam bentuk mengikuti Pertemuan Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 76,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga (100%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (55,6%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evalusi dan bimbingan Upaya Pengendalian Penyakit Menular adalah sebesar 56,9 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Lingga (100%) kemudian Kabupaten Bintan (91,7%) dan Kota Tanjungpinang (83,3%). Persentase Puskesmas terendah terdapat Kabupaten Natuna (25,0%).

4.8.8. PROGRAM IMUNISASI

4.8.8.1. Program Imunisasi di Puskesmas

Pada Rifaskes 2011 jenis Pelayanan Imunisasi yang dikumpulkan meliputi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas dan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas. Persentase Puskesmas yang melaksanakaan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi adalah dengan frekuensi setiap hari (52,3), kemudian frekuensi seminggu sekali (27,7%), dua hari dalam seminggu (6,2%), dan tiga hari dalam seminggu (3,1%).

Persentase Puskesmas tertinggi melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi setiap hari terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota

Tanjungpinang (83,3%) kemudian Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun (66,7%) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Natuna (25,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu adalah sebesar 3,1 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%) kemudianKabupaten Bintan (8,3%). Terdapat 5 kabupaten/ kota seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung Puskesmas dengan frekuensi 3 hari dalam seminggu yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu adalah sebesar 6,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat Kabupaten Lingga (16,7%) kemudianKota Batam (15,4%) dan Kabupaten Karimun (11,1%). Terdapat 4 kabupaten/ kota dari 7 kabupaten/ kota yang seluruh Puskesmasnya tidak melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi 2 hari dalam seminggu yaitu Kabupaten Bintan, Natuna, Karimun, Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi dalam gedung dengan frekuensi seminggu sekali adalah sebesar 27,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Natuna (58,3%) kemudian Kota Batam (46,2%) , Kabupaten Karimun (22,2%), Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang (16,7%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.8.8.1.1.
Persentase Puskesmas menurut Frekuensi Pelayanan Imunisasi di Dalam dan Luar Gedung di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Frekuensi Pelayanan Imunisasi Dalam Gedung Puskesmas				Kegiatan Pelayanan Imunisasi di Luar Gedung Puskesmas
			Setiap Hari	Tiga Hari/Minggu	Dua Hari/Minggu	Seminggu Sekali	
1	Karimun	9	66.7	0	11.1	22.2	100.0
2	Bintan	12	66.7	8.3	0	16.7	100.0
3	Natuna	12	25.0	0	0	58.3	91.7
4	Lingga	6	83.3	0	16.7	0	100.0
5	Kepulauan Anambas	7	42.9	14.3	0	0	85.7
6	Kota Batam	13	30.8	0	15.4	46.2	84.6
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	0	0	16.7	83.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**52.3**	**3.1**	**6.2**	**27.7**	**92.3**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung adalah sebesar 92,3 persen. Terdapat 3 kabupaten/ kota

di Provinsi Kepulauan Riau yang keseluruhan Puskesmasnya (100%) melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Persentase terendah Puskesmas yang melakukan kegiatan pelayanan imunisasi di luar gedung Puskesmas terdapat di Kota Tanjungpinang (83,3%).

4.8.8.2. Pelatihan Program Imunisasi

Jenis Pelatihan dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi yang telah dikumpulkan dalam Rifaskes 2011 ini meliputi Pelatihan Tatalaksana Imunisasi dan Pelatihan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi(KIPI) yang diikuti oleh petugas Puskesmas pada tahun 2009 dan 2010. Dari kedua jenis pelatihan tersebut, Pelatihan Tatalaksana Imunisasi merupakan pelatihan dengan persentase tertinggi yang diikuti oleh petugas Puskesmas(35,4%) dan kemudian Pelatihan KIPI (24,6%).(Tabel 4.8.8.2.1)

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang petugasnya mengikuti Pelatihan Tatalaksana Imunisasi adalah sebesar 35,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (66,7%) kemudian Kabupaten Natuna (58,3%) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%), Kabupaten Bintan (33,3%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun(0,0%).

Tabel 4.8.8.2.1.
Persentase Puskesmas menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Program Imunisasi Tahun 2009-2010 di ProvinsiKepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pelatihan Tata Laksana Imunisasi	Pelatihan KIPI	Pelatihan Lengkap Pelayanan Imunisasi
1	Karimun	9	0	0	0
2	Bintan	12	33.3	16.7	16.7
3	Natuna	12	58.3	25.0	25.0
4	Lingga	6	16.7	16.7	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	57.1	28.6	28.6
6	Kota Batam	13	23.1	46.2	15.4
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	33.3	33.3
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**35.4**	**24.6**	**18.5**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan KIPI adalah sebesar 24,6 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Batam (46,2%) diikuti oleh Kota Tanjungpinang (33,3%) dan Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (0,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti secara lengkap kedua jenis pelatihan pelayanan imunisasi tersebut adalah sebesar 18,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (33,3%) kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%) serta Kabupaten Natuna (25,0%). Sedangkan Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Karimun (0,0%).

4.8.8.3. Pedoman Program Imunisasi

Pedoman pelayanan imunisasi diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Keberadaan buku pedoman pelayanan Immunisasi yang telah dikumpulkan pada Rifaskes 2011 ini meliputi Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, Pedoman Penanganan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Imunisasi.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki buku pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, terbanyak adalah Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia (61,5%), Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (56,9%), Pedoman Penanganan KIPI (55,4%), dan SOP Pelayanan Imunisasi (38,5%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang yang memiliki Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasidi Indonesia adalah sebesar 61,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (33,3%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi adalah sebesar 56,9 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (83,3%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (33,3%).

Tabel 4.8.8.3.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Buku Pedoman Pelayanan Imunisasi				
			Pedoman Pelaksanaan Program Imunisasi di Indonesia	Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi	Pedoman Penanganan KIPI	SOP Pelayanan Imunisasi	Pedoman Lengkap Pelayanan Imunisasi
1	Karimun	9	66.7	55.6	55.6	33.3	33.3
2	Bintan	12	91.7	83.3	91.7	50.0	50.0
3	Natuna	12	58.3	58.3	66.7	33.3	33.3
4	Lingga	6	33.3	33.3	33.3	33.3	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	71.4	57.1	14.3	14.3	14.3
6	Kota Batam	13	53.8	53.8	53.8	53.8	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**61.5**	**56.9**	**55.4**	**38.5**	**35.4**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki Pedoman Penanganan KIPI adalah sebesar 55,4 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (91,7%). Persentase terendah Puskesmas terdapat di Kabupaten Anambas (14,3%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki SOP Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 38,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Batam (53,8%). Sedangkan Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki secara lengkap keempat jenis pedoman untuk Pelayanan Imunisasi adalah sebesar 35,4 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (50,0%). Persentase terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

4.8.8.4. Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi

Pengawasan, evaluasi dan bimbingan diperlukan dalam Pelayanan Imunisasi untuk memantau dan mengevaluasi serta membimbing pelaksanaan Pelayanan Imunisasi. Pengawasan, evaluasi dan bimbingan dapat berupa kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervisi, umpan balik tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maupun ikut serta pada pertemuan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau menerima pengawasan, evaluasi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi adalah dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (95,4%), kemudian kunjungan supervise petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervise (87,7%), pertemuan monitoring dan evaluasi program (80,0%).

Persentase Puskesmas tertinggi menerima kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk supervisi terdapat di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga (100,0%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%).

Tabel 4.8.8.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan dalam Program Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pengawasan, Evaluasi dan Bimbingan Program Imunisasi			
			Kunjungan Petugas Dinkes Kab/Kota	Umpan Balik Laporan	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi	Bimbingan Teknis Lengkap
1	Karimun	9	100.0	100.0	22.2	22.2
2	Bintan	12	100.0	100.0	100.0	100.0
3	Natuna	12	91.7	100.0	83.3	75.0
4	Lingga	6	100.0	100.0	66.7	66.7
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	57.1	71.4	28.6
6	Kota Batam	13	92.3	100.0	100.0	92.3
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	100.0	100.0	83.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**87.7**	**95.4**	**80.0**	**70.8**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbinganPelayanan Imunisasi dalam bentuk umpan balik dari Dinas Kesehatan kabupaten/ Kota adalah sebesar 95,4 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat 6 Kabupaten /Kota yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang (masing-masing 100,0%). Persentase Puskesmas terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas (57,1%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima pengawasan, evaluasi dan bimbinganPelayanan Imunisasi dalam bentuk keikutsertaan pada pertemuan monitoring dan evaluasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota adalah sebesar 80,0 persen. Terdapat 3 kabupaten/kota yang 100,0 persen Puskesmasnya mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program, yaitu Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Persentase Puskesmas terendah mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi program terdapat di Kabupaten Karimun (22,2%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang menerima secara lengkap seluruh bentuk pengawasan, evaluasi dan bimbinganPelayanan Imunisasi adalah sebesar 70,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten Bintan (100,0%). Persentase Puskesmas terendah menerima secara lengkap keseluruhan bentuk pengawasan, evalusi dan bimbingan Pelayanan Imunisasi terdapat di Karimun (22,2%).

4.9. PELAYANAN PONED PUSKESMAS PERAWATAN

Pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar) ditanyakan pada Puskesmas Perawatan dengan Pelayanan PONED. Di Provinsi Kepulauan Riau, Puskesmas dengan Pelayanan PONED berjumlah 15 Puskesmas dan berada di 6 Kabupaten/Kota. (tabel 4.9.1) Sedangkan di Kabupaten Lingga tidak tersedia Puskesmas perawatan PONED.

Tabel 4.9.1.
Persentase Puskesmas perawatan Poned menurut Kegiatan Pelayanan dan Pelatihan PONED di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No.	Kabupaten/Kota	Jml Pusk Perawatan PONED	Pelayanan PONED 24 jam	Pelatihan PONED yang diikuti Petugas
1	Karimun	3	100.0	100.0
2	Bintan	3	100.0	100.0
3	Natuna	6	83.3	83.3
4	Kepulauan Anambas	1	100.0	100.0
5	Kota Batam	1	100.0	100.0
6	Kota Tanjung Pinang	1	100.0	100.0
KEPULAUAN RIAU		**15**	**93.3**	**93.3**

Tabel 4.9.1. menunjukkan persentase Puskesmas Perawatan Poned dengan ketersediaan Pelayanan PONED 24 jam dan Keikutsertaan petugas dalam pelatihan PONED. Persentase Puskesmas Perawatan PONED yang memberikan pelayanan PONED 24 jam di Provinsi Kepulauan Riau adalah 93,3 persen. Seluruh Puskesmas PONED di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang telah menyediakan Pelayanan PONED 24 jam (100%). Sedangkan persentase Puskesmas Perawatan PONED di Kabupaten Natuna yang menyediakan Pelayanan PONED 24 jam adalah sebesar 83,3 persen,

Persentase Puskesmas Perawatan PONED di Kepulauan Riau yang petugasnya telah mengikuti pelatihan PONED adalah 93,3 persen. Seluruh Puskesmas Perawatan PONED di 5 Kabupaten /Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah mengikuti pelatihan PONED (100%) yaitu

di Kabupaten Karimun, Bintan, Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sedangkan di Kabupaten Natuna yang sudah mengikuti pelatihan Poned hanya 83,3 persen..

4.10. PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sesuai SK Menkes no 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas, disebutkan bahwa salah satu dari tiga fungsi Puskesmas adalah sebagai Pusat Pemberdayaan masyarakat dibidang Kesehatan.

Tabel 4.10.1.menunjukkan Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai petugas khusus dan petugas yang dilatih pada tahun 2009 dan 2010. Persentase Puskesmas yang mempunyai petugas khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 61,5 persen. Persentase tertinggi adalah di Kota Batam (92,3%). Terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti pelatihan terkait fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan bidang Kesehatan hanya 41,5 persen. Persentase tertinggi Puskesmas yang petugasnya mengikuti pelatihan di Kota Tanjungpinang (83,3%). Terendah di Kabupaten Karimun (11,1%).

Tabel 4.10.1.
Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Petugas Khusus dan Petugas yang dilatih Pemberdayaan Masyarakat, Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Petugas Khusus	Petugas yang dilatih
1	Karimun	9	22.2	11.1
2	Bintan	12	83.3	66.7
3	Natuna	12	58.3	25.0
4	Lingga	6	50.0	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	14.3
6	Kota Batam	13	92.3	53.8
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3	83.3
KEPULAUAN RIAU		65	61.5	41.5

Tabel 4.10.2. menunjukkan tentang ketersediaan pedoman, Standard Operational Procedure(SOP)/Protap Peraturan tertulis yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotaatau Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki pedoman pemberdayaan masyarakat hanya 36,9 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Bintan (83,3%). Terendah di Kabupaten Karimun (0,0%).

Tabel 4.10.2.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Pedoman, SOP dan Peraturan tentang Pemberdayaan Masyarakat, di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pedoman	SOP/Protap	Peraturan Tertulis
1	Karimun	9	0	0	0
2	Bintan	12	83.3	16.7	16.7
3	Natuna	12	16.7	16.7	8.3
4	Lingga	6	50.0	50.0	50.0
5	Kepulauan Anambas	7	14.3	0	0
6	Kota Batam	13	30.8	30.8	15.4
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	33.3	33.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**36.9**	**20.0**	**15.4**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai SOP/Protap pemberdayaan masyarakat hanya 20,0 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lingga (50,0%). Terendah di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai peraturan tertulis pemberdayaan masyarakat hanya 15,5 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Lingga (50,05). Terendah di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.10.3. menunjukkan ketersediaan alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Persentase Puskesmas yang mempunyai alokasi dana khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan hanya 21,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kota Batam (46,2%). Sedangkan persentase terendah ada Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.10.3.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alokasi Dana Khusus Pemberdayaan Masyarakat di ProvinsiKepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Juml Pusk	Alokasi Dana Khusus
1	Karimun	9	0
2	Bintan	12	41.7
3	Natuna	12	8.3
4	Lingga	6	0
5	Kepulauan Anambas	7	0
6	Kota Batam	13	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3
KEPULAUAN RIAU		65	21.5

Tabel 4.10.4.a dan 4.10.4.b. menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Puskesmas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Jenis Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pertemuan Tingkat Desa, Survei Mawas Diri

(SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Pelatihan Kader Kesehatan Baru, Pertemuan Kader Kesehatan, Pelatihan Kader Lama, Pelatihan Bagi Tokoh Masyarakat, dan Pelatihan Bagi LSM/Ormas. Kegiatan pemberdayaan masyarakat terbanyak adalah Musyawarah Masyarakat Desa (80,0%), Pertemuan Tingkat Desa (78,5%),Pertemuan Kader kesehatan (72,3%), Survei mawas Diri (70,8%), dan Pelatihan Kader Kesehatan Baru (50,8%), .

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kegiatan pertemuan tingkat desa adalah 78,5 persen. Persentase tertinggi di Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang (100%). Persentase terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri adalah 70,8 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (100%). Persentase terendah terdapat di Kabupaten Natuna (41,7%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa adalah 80,0 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (100,0%). Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%).

Sedangkan persentase yang melaksanakan Pelatihan Kader Kesehatan Baru adalah 50,8 persen. Persentase tertinggi adalah Kota Tanjungpinang (83,3%). Persentase terendah adalah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga (33,3%).

Tabel 4.10.4.a.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di ProvinsiKepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pertemuan Tingkat Desa	Survei Mawas Diri	Musyawarah Masyarakat Desa	Pelatihan Kader Kesehatan Baru
1	Karimun	9	77.8	88.9	88.9	55.6
2	Bintan	12	100.0	100.0	100.0	33.3
3	Natuna	12	50.0	41.7	50.0	66.7
4	Lingga	6	83.3	100.0	100.0	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	42.9	42.9	42.9
6	Kota Batam	13	100.0	46.2	84.6	46.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	100.0	83.3
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**78.5**	**70.8**	**80.0**	**50.8**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan pertemuan Kader Kesehatan adalah 72,3 persen. Persentase tertinggi adalah di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang sebesar (100,0%). Persentase terendah adalah di Kabupaten Lingga (33,3%). Untuk Pelatihan Kader Lama secara Provinsi sebesar 58,5 persen. Persentase tertinggi adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar (100,0%). Persentase terendah adalah Kabupaten Bintan sebesar 16,7 persen.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan Pelatihan bagi Toma adalah sebesar 26,2 persen. Persentase tertinggi adalah Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang sebesar (100,0%). Persentase terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%) persen. Sedang Pelatihan bagi LSM/Ormas adalah sebesar 3,1 persen. Persentase tertinggi adalah di Kabupaten Karimun (11,1%) persen. Persentase terendah adalah di 5 Kabupaten/Kota sebesar (0,0%) persen yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota TanjungpinangDalam lingkup provinsi Kepulauan Riau , persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa adalah 80,0 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan, Lingga dan Kota Tanjung Pinang (100,0%), sedangkan persentase terendah ada di Kabupaten kepulauan Anambas (42,9%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan Pelatihan Kader Kesehatan Baru adalah 50,8 persen. Persentase tertinggi ada di Kota Tanjung Pinang(83,3%), sedangkan persentase terendah ada Kabupaten Bintan dan Lingga (33,3%).

Tabel 4.10.4.b.
Persentase Puskesmas menurut Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Pertemuan Kader Kesehatan	Pelatihan Kader Lama	Pelatihan Bagi Toma	Pelatihan Bagi LSM/Ormas
Karimun	9	77.8	66.7	44.4	11.1
Bintan	12	58.3	16.7	8.3	0
Natuna	12	58.3	50.0	16.7	8.3
Lingga	6	33.3	33.3	50.0	0
Kepulauan Anambas	7	71.4	100.0	0	0
Kota Batam	13	100.0	76.9	30.8	0
Kota Tanjung Pinang	6	100.0	83.3	50.0	0
KEPULAUAN RIAU	**65**	**72.3**	**58.5**	**26.2**	**3.1**

Dalam lingkup provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pertemuan kader kesehatan adalah 72,3%. Persentase tertinggi ada di Kata Batam dan Kota Tanjung pinang (masing masing 100,0%), sedangkan persentase terendah ada di Kab Lingga (33,3%).

Dalam lingkup provinsi Kepulauan Riau Jawa Barat, persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Lama adalah 58.5%. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (100,0%), diikuti Kota Tanjung Pinang (83,3%). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Bintan (16,7%), Kabupaten Lingga (33,38%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau, yang melaksanakan kegiatan pelatihan bagi tokoh masyarakat hanya 26,2 persen. Persentase tertinggi ada di kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang (masing masing 50,0%), diikuti Kab Karimun (44,4). Sedangkan Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan (0,0%).

Persentase Puskesmas di provinsi Kepulauan Riau, yang melaksanakan kegiatan pelatihan bagi LSM/Ormas hanya 3,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Karimun (11,1%), diikuti Kabupaten Natuna (8,3%). Sedangkan di 5 Kabupaten/Kota lainnya 0,0 persen.

Tabel 4.10.5. menunjukkan pembinaan dan pemantauan kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dilakukan petugas Puskesmas berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Pembinaan dan pemantauan yang dilakukan dapat berupa pemberian umpan balik laporan kegiatan, melakukan supervisi kegiatan dan mengadakan pertemuan pembinaan. Pembinaan dan pemantauan yang sering dilakukan petugas Puskesmas adalah melakukan pertemuan pembinaan sebesar 63,1 persen, diikuti melaksanakan supervisi sebesar 56,9 persen, dan memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 38,5 persen.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau memberikan umpan balik laporan kegiatan sebesar 38,5 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Lingga (83,3%). Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan supervisi adalah 56,9 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang (83,3%). Persentase Terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.10.5.
Persentase Puskesmas menurut Pelaksanaan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan UKBM di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Umpan Balik	Supervisi	Pertemuan Pembinaan
1	Karimun	9	22.2	55.6	77.8
2	Bintan	12	50.0	83.3	83.3
3	Natuna	12	16.7	16.7	25.0
4	Lingga	6	83.3	83.3	83.3
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	14.3
6	Kota Batam	13	46.2	76.9	76.9
7	Kota Tanjung Pinang	6	66.7	83.3	83.3
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**38.5**	**56.9**	**63.1**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan pertemuan pembinaan adalah 63,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan, Lingga dan Kota Tanjungpinang (83,3%). Persentase terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

Tabel 4.10.6. menunjukkan kondisi input dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Input dikategorikan baik bila tersedia sumberdaya tenaga, pedomandan dana khusus. Sedangkan proses dikategorikan baik bila ada kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa, pelatihan kader kesehatan baru dan lama.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang kondisi input pemberdayaan masyarakat yang baik hanya 9,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang mempunyai Input pemberdayaan Masyarakat yang baik adalah di Kota Tanjungpinang (33,3%). Terdapat 3 Kabupaten/Kota diProvinsi Kepulauan Riau dimana semua Puskesmasnya tidak memiliki input yang baik untuk pemberdayaan masyarakatnya 0,0 persen yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 4.10.6.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Input dan Proses Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Input	Proses
1	Karimun	9	0.0	77.8
2	Bintan	12	16.7	33.3
3	Natuna	12	8.3	25.0
4	Lingga	6	0.0	33.3
5	Kepulauan Anambas	7	0.0	42.9
6	Kota Batam	13	7.7	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	33.3	83.3
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**9.2**	47,7

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan proses yang baik dalam pemberdayaan masyarakat hanya 47,7 persen. Persentase Puskesmas tertinggi dengan proses pemberdayaan masyarakat yang baik adalah di Kota Tanjungpinang (83,3%), sedang persentase terendah adalah di Kabupaten Natuna (25,0%).

Tabel 4.10.7.a. dan 4.10.7.b. menunjukkan keberadaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan. Jenis UKBM yang dikumpulkan pada Rifaskes 2011 meliputi Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Pos Pelayanan terpadu bagi lanjut usia (Posyandu Lansia), Pos Obat desa (POD)/Warung Obat Desa (WOD), Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan pesantren (Poskestren), Dana Sehat, Kelompok Peduli Lansia, Kelompok Peduli HIV-AIDS dan Kelompok Peduli TB Paru.

Tabel 4.10.7.a.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Posyandu	Posyandu Lansia	POD/WOD	SBH	Poskestren
1	Karimun	9	100.0	100.0	11.1	0	0
2	Bintan	12	100.0	100.0	33.3	58.3	8.3
3	Natuna	12	100.0	75.0	8.3	25.0	8.3
4	Lingga	6	100.0	66.7	16.7	16.7	0
5	Kepulauan Anambas	7	100.0	85.7	0	14.3	0
6	Kota Batam	13	100.0	84.6	30.8	0	23.1
7	Kota Tanjung Pinang	6	100.0	100.0	50.0	16.7	16.7
KEPULAUAN RIAU		**65**	**100.0**	**87.7**	**21.5**	**20.0**	**9.2**

Persentase Puskesmas dengan keberadaan UKBM yang terbanyak adalahPuskesmas dengan keberadaan Posyandu dan Peduli HIV-AIDS (100,0%), kemudian berturut-turut Puskesmas dengan Posyandu Lansia (87,7%), dengan Dana Sehat (30,8%), dengan POD/WOD (21,5%), dengan SBH (20,0%), dengan Peduli Lansia Peduli (10,8%), dengan Poskestren (9,2%) dan dengan Peduli TB Paru (1,5%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang yang ada Posyandu adalah 100,0 persen,. Terdapat di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau mempunyai Posyandu (100%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang ada Posyandu Lansia adalah 87,7 persen. Terdapat 3 Kabupaten dan Kota seluruh Puskesmasnya mempunyai Posyandu Lansia (100%) yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang . Sedang persentase Puskesmas terendah yang ada Posyandu Lansia adalah di Kabupaten Lingga (66,7%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang yang ada POD/WODadalah 21,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang ada POD/WOD adalah Kota Tanjungpinang (50,0%). Persentase terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang yang ada SBH adalah 20,0 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang ada SBH adalah Kabupaten Bintan (58,3%). Sedangkan persentase terendah adalah Kabupaten Karimun dan Kota Batam (0,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang ada Poskestren adalah 9,2 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang ada Poskestren adalah Kota Batam (23,1%). Terdapat 3 Kabupaten yang Puskesmasnya tidak ada Poskestren yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 4.10.7.b.
Persentase Puskesmas menurut Keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Dana Sehat	Peduli Lansia	Peduli HIV-AIDS	Peduli TB Paru
1	Karimun	9	77.8	0	100.0	0
2	Bintan	12	41.7	8.3	100.0	0
3	Natuna	12	25.0	16.7	100.0	0
4	Lingga	6	33.3	50.0	100.0	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	100.0	0
6	Kota Batam	13	15.4	7.7	100.0	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	16.7	0	100.0	0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**30.8**	**10.8**	**100.0**	**1.5**

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang ada Dana Sehat 30,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang ada Dana Sehat adalah Kabupaten Karimun (77,8%). Persentase Terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang ada Peduli Lansia adalah 10,8 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang ada Peduli Lansia adalah Kabupaten Lingga

(50,05). Terdapat 3 Kabupaten/Kota yang Puskesmasnya tidak ada(0,0%) Peduli Lansia yaitu Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang ada Peduli HIV-AIDS adalah 100,0 persen, seluruh Puskesmas di Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau peduli HIV-AIDS.

Presentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang ada Peduli TB Paru adalah 1,5 persen. Persentase Puskesmas tertinggi yang ada Peduli TB Paru adalah Kabupaten Lingga (16,7%). Di 6 Kabupaten/Kota lainnya Provinsi Kepulauan Riau dimana puskesmasnya tidak ada kelompok peduli TB Paru, yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

4.11. ALAT KESEHATAN (ALKES) DAN OBAT

Ketersediaan alat kesehatan dianalisis menurut: jumlah Jenis alat yang baik dan digunakan yaitu jenis alat yang ditunjukkan dan diakui alat tersebut baik dan digunakan untuk pelayanan. Jumlah Jenis/item alat dikelompokkan atas 5 yaitu : Tersedia 80-100 persen, 60-79 persen, 40-59 persen, 20-39 persen, dan 0- 19 persen dari sejumlah jenis alat .

4.11.1. ALKES POLIKLINIK UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik umum yang dikumpulkan sebanyak 56 jenis/ item.

Tabel4.11.1.1.menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan ketersediaan jenis alat poliklinik umum yang baik dan digunakan . Di ProvinsiKepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai kelengkapan 80-100 persen jenis alat poliklinik umum hanya 3,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kota Tanjungpinang (16,7%), Kota Batam (7,7%) persen. Terdapat 5 Kabupaten yang puskesmasnya tidak mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik umum yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Lingga, Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 4.11.1.1.
Persentase Puskesmas menurut kelengkapan Ketersediaan Jenis Alat Kesehatan Poliklinik Umum di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan jenis Alat Kesehatan Poliklinik Umum				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Karimun	9	0	22.2	33.3	22.2	22.2
2	Bintan	12	0	25.0	50.0	8.3	16.7
3	Natuna	12	0	66.7	16.7	0	16.7
4	Lingga	6	0	66.7	33.3	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	28.6	14.3	28.6	28.6
6	Kota Batam	13	7.7	38.5	0	15.4	38.5
7	Kota Tanjung Pinang	6	16.7	66.7	16.7	0	0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**3.1**	**43.1**	**23.1**	**10.8**	**20.0**

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik umum adalah 43,1 persen. Tertinggi di Kabupaten Natuna, Lingga dan Kota Tanjungpinang (66,75). Persentase terendah di Kabupaten Karimun (22,2%).

Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik umum adalah 23,1 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan (50,0%). Persentase terendah ada di Kota Batam (0,0%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai kelengkapan 20-39 persen jenis alat poliklinik umum adalah 10,8 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%). Terdapat 3 Kabupaten/Kota dari 7 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Puskesmas yang tidak mempunyai 20-39 persen jenis alat poloklinik umum yaitu Kabupaten Natuna, Lingga dan Kota Tanjungpinang (0.0%).

Persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik umum di Provinsi Kepulauan Riau adalah 20,0 persen. Persentase tertinggi ada di Kota Batam (38,5). Ada 2 Kabupaten/Kota dengan persentase 0 persen, yaitu Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang .

4.11.2. ALKES POLIKLINIK KIA

Pada Rifaskes 2011 data jenis alat Poliklinik KIA yang dikumpulkan sebanyak 59 jenis. Tabel4.11.2.1. menunjukkan persentase Puskesmas menurut kelengkapan ketersediaan jenis alat poliklinik KIA.

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmasyang mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik KIA hanya 9,2 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna (16,7%). Terdapat 4 Kabupaten/Kota yang puskesmasnya tidak mempunyai 80-100 persen jenis alat poliklinik KIA yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang (0,0%).

Di ProvinsiKepulauan Riau, persentase Puskesmasyang mempunyai 60-79 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 38,5 persen. Tertinggi ada di Kota Batam (69,2%). Terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Tabel 4.11.2.1.
Persentase Puskesmas menurut kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan Alat Kesehatan Poliklinik KIA				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Karimun	9	0	33.3	44.4	22.2	0
2	Bintan	12	16.7	50.0	16.7	16.7	0
3	Natuna	12	16.7	8.3	50.0	16.7	8.3
4	Lingga	6	0	66.7	16.7	16.7	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	71.4	0	28.6
6	Kota Batam	13	15.4	69.2	15.4	0	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	33.3	33.3	33.3	0
KEPULAUAN RIAU		**65**	**9.2**	**38.5**	**33.8**	**13.8**	**4.6**

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 33,8 persen. Tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (71,4%). Terendah ada di Kota Batam (15,4%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 13,8 persen. Tertinggi ada di Kota Tanjungpinang (33,3%). Terendah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam (0,0%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai kurang dari 20 persen jenis alat poliklinik KIA adalah 4,6 persen. Tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (28,6%). Sementara terendah aada di 5 Kabupaten/Kota (0,0%)

4.11.3. ALKES PONED

Ditanyakan khusus pada Puskesmas Perwatan dengan PONED. Pada Rifaskes 2011 data Jenis Alat PONED yang dikumpulkan sebanyak 26 jenis.

Tabel 4.11.3.1, menunjukkan persentase Puskesmas Perawatan PONED menurut kelengkapan ketersediaan jenis alat kesehatan PONED.

Tabel 4.11.2.1.
Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Kelengkapan Ketersediaan Jenis Alat PONED di ProvinsiKepulauan Riau Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk Prwtn Poned	Persentase Kelengkapan Ketersediaan Alat PONED				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Karimun	3	33.3	33.3	0	0	33.3
2	Bintan	3	0	33.3	66.7	0	0
3	Natuna	6	0	33.3	16.7	16.7	33.3
4	Kepulauan Anambas	1	0	100.0	0	0	0
5	Kota Batam	1	0	100.0	0	0	0
6	Kota Tanjung Pinang	1	100.0	0	0	.0	.0
KEPULAUAN RIAU		**15**	**13.3**	**40.0**	**20.0**	**6.7**	**20.0**

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan dengan PONED yang mempunyai 80 persen atau lebih jenis alat kesehatan PONED adalah 13,3 persen. Hanya 2 Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan alat kesehatan PONED 80-100 persen, yaitu di Kota Tanjungpinang (100,0%) dan Kabupaten Karimun (33,3%). sementara Kabupaten/Kota Lainnya yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam 0,0 persen.

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai 60-79 persen jenis alat kesehatan PONED sebesar 40,0 persen. Hanya 5 Kabupaten Kota yang Puskesmas perawatan Poned memiliki ketersediaan alat kesehatan PONED 60-79 persen yaitu di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam(100,0%), kemudian Kabupaten Karimun, Bintan dan Natuna (33,3%). Sedangkan Kota Tanjungpinang, (0,0%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 20,0 persen. Hanya 2 Kabupaten/Kota yang Puskesmas Perawatan Poned nya mempunyai 40-59 persen jenis alat kesehatan PONED yaitu di Kabupaten Bintan (66,7%), dan Kabupaten Natuna (16,7%), sementara Kabupaten/Kota Lainnya tidak ada (0,0%) yaitu Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 6,7 persen. Hanya satu Kabupaten/Kota yang Puskesmas PONED yang mempunyai 20-39 persen jenis alat kesehatan PONED, yaitu i Kabupaten Natuna (16,7), sementara Kabupaten/Kota Lainnya 0,0 persen.

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas PONED yang mempunyai < 20 persen jenis alat kesehatan Puskesmas PONED adalah 20,0 persen. Hanya ada di 2 Kabupaten/Kota yang Puskesmas PONED nya mempunyai < 20 persen jenis alat kesehatan PONED, yaitu di Kabupaten Karimun danNatuna (masing-masing 33,3%),

4.11.4. ALKES IMUNISASI

Tabel 4.11.4.1, menunjukkan persentase Puskesmasmenurut ketersediaan jenis alat imunisasi. Jenis alat kesehatan imunisasi yang dimaksud pada laporan ini adalah Cold Box, Vaccine Carier dan Kulkas yang dimiliki Puskesmas tersebut untuk pelayanan imunisasi.

Tabel 4.11.4.1.
Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Alkes Imunisasi di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Ketersediaan Alkes Imunisasi (Kulkas, Cold Box, Vaccine Carrier)
1	Karimun	9	55.6
2	Bintan	12	50.0
3	Natuna	12	33.3
4	Lingga	6	16.7
5	Kepulauan Anambas	7	14.3
6	Kota Batam	13	69.2
7	Kota Tanjung Pinang	6	83.3
KEPULAUAN RIAU		**65**	**47.7**

Tabel4.11.4.1., menunjukkan persentase Puskesmas yang mempunyai tiga jenis alat imunisasi (cold box, kulkas dan vaccine carier) yang berfungsi. Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai ketiga jenis alat imunisasi berfungsi hanya 47,7 persen. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi KotaTanjungpinang(83,3%), diikuti Kota Batam (69,2%), Kabupaten Karimun (55,6%), dan persentase terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas (14,3%).

4.11.5.OBAT UMUM

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat umum yang dikumpulkan sebanyak 44 jenis. Tabel 4.11.5.1.menunjukkan persentase Puskesmas menurut Kelengkapan ketersediaan Jenis obat umum. Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 80-100 persen jenis obat umum adalah 36,9 persen. Persentase Puskesmas teringgi memiliki ketersediaan jenis obat umum adalah di Kabupaten Karimun (77,8%). Terendah adalahdi Kabupaten Lingga (0,0%).

Tabel 4.11.5.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Jenis Obat Umum di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

			Kelengkapan Ketersediaan jenis Obat Umum				
No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Karimun	9	77.8	22.2	0	0	0
2	Bintan	12	58.3	41.7	0	0	0
3	Natuna	12	41.7	58.3	0	0	0
4	Lingga	6	0	83.3	16.7	0	0
5	Kepulauan Anambas	7	28.6	71.4	0	0	0
6	Kota Batam	13	23.1	76.9	0	0	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	100.0	0	0	0
	KEPULAUAN RIAU	**65**	**36.9**	**61.5**	**1.5**	**0**	**0**

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen jenis obat umum adalah 61,5 persen. Persentase tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang (100,0%), kemudian Kabupaten Lingga 83,3 persen. Persentase terendah ada di Kabupaten Karimun (22,2%).

Persentase Puskesmas yang mempunyai 40-59 persen jenis obat umum di Provinsi Kepulauan Riau adalah 1,5 persen. Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan jenis obat umum 40-59 persen adalah Kabupaten Lingga (16,7%). Sementara 6 kabupaten/kota yang puskesmasnya tidak memiliki ketersediaan jenis obat umum 40-59 persen.

4.11.6. OBAT PONED

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat PONED yang dikumpulkan sebanyak 17 jenis.Tabel 4.11.6.1. menunjukkan persentase Puskesmas perawatan dengan PONED menurut ketersediaan Jenis obat PONED. Di Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada Puskesmas PONED yang mempunyai 80-100 persen Jenis obat PONED (0,0%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai 60-79 persen Jenis obat PONED hanya 20,0 persen, dan semuanya ada di Kabupaten Bintan.

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai 40-59 persen Jenis obat PONED hanya 40,0 persen. Persentase Puskesmas

PONED yang memiliki ketersediaan 60-79 persen Jenis obat PONED terdapat masing-masing di Kabupaten Anambas (100,0%), Kabupaten Natuna (66,7%) dan Kabupaten Karimun (33,3%) persen. Sementara 3 Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas Perawatan PONED lainnya 0,0 persen .

Tabel 4.11.6.1.
Persentase Puskesmas Perawatan Poned menurut Kelengkapan Ketersediaan Jenis Obat PONED di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk Perawatan Poned	Kelengkapan Ketersediaan Jenis Obat PONED				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Karimun	3	0.0	0	33.3	66.7	0
2	Bintan	3	0.0	100.0	0	0	0
3	Natuna	6	0.0	0	66.7	16.7	16.7
4	Kepulauan Anambas	1	0.0	0	100.0	0	0
5	Kota Batam	1	0.0	0	0	100.0	0
6	Kota Tanjung Pinang	1	0.0	0	0	100.0	0
Kepulauan Riau		**15**	**0.0**	**20.0**	**40.0**	**33.3**	**6.7**

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai 20-39 persen Jenis obat PONED adalah 33,3 persen. Tertinggi di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang (100,0%), kemudian Kabupaten Karimun (66,7%) dan Kabupaten Natuna (16,7%). Sementara yang terendah di Kabupaten Bintan dan kabupaten Kepulauan Anambas (0,0%).

Di Provinsi Kepulauan Riau, persentase Puskesmas Perawatan PONED yang mempunyai persediaan jenis obat PONED kurang dari 20 persen adalah 6,7 persen. Dan semuanya ada di Kabupaten Natuna (16,7%).

4.11.7. OBAT/ALATKELUARGA BERENCANA (KB)

Pada Rifaskes 2011 data jenis obat/Alat KB yang dikumpulkan sebanyak 11 jenis. Tabel 4.11.7.1, menunjukkan persentase Puskesmas menurut ketersediaan Jenis Obat/Alat KB. Persentase Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai 80 persen atau lebih Jenis Obat/Alat KB adalah 6,2 persen, dan semuanya ada di Kabupaten Bintan (33,3%).

Di provinsi Kepulauan Riau Persentase Puskesmas yang mempunyai 60-79 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 12,3 persen. Persentase tertinggi ada di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga (33,3%), kemudian Kabupaten Karimun (11,1%) dan Kota Batam (7,7%). Terdapat 3 Kabupaten dan Kota yang Puskesmasnya tidak mempunyai 60-79 persen jenis obat/alat KB (0,0%) yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas dan Kota Tanjungpinang.

Sedangkan persentase Puskesmas dalam lingkup provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai 40-59 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 23,1 persen. Tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas (42,9%), kemudianKabupatenKarimun (33,3%), Kabupaten Bintan dan Natuna (25,0%), Kabupaten Lingga (16,7%) dan Kota Batam (15,4%). Terendah di Kota Tanjungpinang (0,0%).

Tabel 4.11.7.1.
Persentase Puskesmas menurut Kelengkapan Ketersediaan Jenis Obat/Alat KB di Provinsi Kepulauan Riau, Rifaskes 2011

No	Kabupaten/Kota	Jml Pusk	Kelengkapan Ketersediaan jenis Obat/Alat KB				
			80-100%	60-79%	40-59%	20-39%	< 20%
1	Karimun	9	0	11.1	33.3	44.4	11.1
2	Bintan	12	33.3	33.3	25.0	8.3	0
3	Natuna	12	0	0	25.0	41.7	33.3
4	Lingga	6	0	33.3	16.7	50.0	0
5	Kepulauan Anambas	7	0	0	42.9	14.3	42.9
6	Kota Batam	13	0	7.7	15.4	76.9	0
7	Kota Tanjung Pinang	6	0	0	0	16.7	83.3
Kepulauan Riau		65	6.2	12.3	23.1	38.5	20.0

Dalam lingkup provinsi , persentase Puskesmas yang mempunyai 20-39 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 38,5 persen. Tertinggi di Kota Batam (76,9%). Terendah di Kabupaten Bintan (8,3%) .

Dalam lingkup Provinsi, persentase Puskesmas yang mempunyai 0-19 persen Jenis Obat/Alat KB adalah 20,0 persen. Tertinggi di Kota Tanjungpinang (83,3%). Terendah di Kabupaten Bintan, Lingga dan Kota Batam (0,0%).

BAB V

KESIMPULAN

Rifaskes Puskesmas 2011 telah menghasilkan gambaran input dan proses upaya kesehatan Puskesmas yang sangat kaya, rinci dan cukup valid untuk membuat gambaran atau potret fasilitas kesehatan di Puskesmas mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas.

Pada prinsipnya ditemukan bahwa komponen-komponen input (terutama SDM, sarana dan prasarana) dan proses (terutama kegiatan, pembinaan, supervisi dan monitoring) dari pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum seperti yang diharapkan. Pada unsur input upaya kesehatan Puskesmas ditemukan bahwa baik kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta obat dan alat kesehatan yang saat ini ada di Puskesmas masih dibawah standar yang telah ditentukan. Ditemukan juga terjadi kesenjangan *supply* dan *demand* dari unsur input upaya kesehatan Puskesmas. Disamping itu digambarkan pula adanya disparitas unsur input upaya kesehatan Puskesmas antar Kabupaten/Kota maupun individual Puskesmas. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa penyediaan sarana, prasarana, dan SDM yang sesuai dengan ketiga fungsi Puskesmas (pelayanan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan pembangunan berwawasan kesehatan) masih belum diperhatikan dengan semestinya.

Di Provinsi Kepulauan Riau , dari 65 Puskesmas, Semuanya memiliki tenaga dokter, 12.3 persen tidak memiliki dokter gigi, Semua Puskesmas memiliki perawat, dan 1.5 tidak memiliki tenaga bidan. 20,0 Puskesmas di Provinsi kepulauan Riau tidak memiliki tenaga gizi, 15,4 tidak memiliki sanitarian, dan 72.3 tidak memiliki tenaga promkes.

Dari sudut sarana prasarana, di propinsi Kepulauan Riau ditemukan bahwa 15,4% bangunan Puskesmas berada dalam kondisi rusak sedang dan berat dan 7.7% Puskesmas memiliki jenis bangunan semi permanen/tidak permanen, sarana air bersih hanya dimiliki oleh 60,0 Puskesmas dan 29,2% Puskesmas tidak mempunyai listrik 24 jam.

Hanya 3,1% Puskesmas di di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kelengkapan jenis alkes poliklinik umum 80% atau lebih dari jumlah standar alkes poliklinik umum (56 alat). Sementara sebanyak 53,9 % Puskesmas memiliki jenis alat poliklinik Umum kurang dari 60,0%.

Sebanyak 80,0% Puskesmas Perawatan PONED di Provinsi Kepulauan Riau memiliki jenis obat PONED kurang dari 60 persen . Tidak ada satupun yang memiliki jenis obat PONED ≥80 lengkap.

Pada unsur proses upaya kesehatan Puskesmas, terjadi kesenjangan kelengkapan dan kualitas kegiatan, pelaksana program, pembinaan, monitoring dan supervisi program Puskesmas dibanding dengan standar yang sudah ditentukan dan disepakati. Ditemukan juga

disparitas proses upaya kesehatan Puskesmas tersebut diatas antar Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, walaupun sebanyak 90,8% Puskesmas telah melaksanakan Kegitan Perencanaan Tahunan namun di Kabupaten kepulauan Anambas hanya 28,6 % yang melaksanakannya.

Dilihat dari input dan proses yang menunjang tiga fungsi Puskesmas, maka input dan proses yang mendukung keberhasilan fungsi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih jauh dari harapan. Hanya 61,5% Puskesmas di Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki petugas didalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pelatihan yang dibutuhkan untuk fungsi tersebut kepada tenaga pelaksananya kurang sekali dilakukan, hanya 41,5% petugas yang dilatih untuk kegiatan funsgi pemberdayaan masyarakat.

Khusus untuk pencapaian MDG's, maka input dan proses program wajib kesehatan ibu dan anak, terutama program PONED, masih jauh dibandingkan standar minimal yang harus dipenuhi. Ada satu kabupaten yang tidak mempunyai Puskesmas poned yaitu kabupaten Lingga> Hanya 33,9% Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Puskesmas PONED, dimana 10,8% diantaranya adalah Puskesmas PONED Non Perawatan.

Dalam manajemen pelaksanaan Rifaskes Puskesmas 2011, telah pula dilakukan validasi proses dan substansi Rifaskes Puskesmas 2011 (bersama-sama dengan RSU Pemerintan dan Laboratorium Klinik Mandiri), oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, UNAIR dan UNHAS. Hasil validasi menunjukkan bahwa lebih dari 80 langkah-langkah proses Rifaskes Puskesmas 2011 dilaksanakan sesuai proposal, pedoman, instrumen Rifaskes Piuskesmas 2011 dan Rifaskes 2011 secara umum. Demikian pula variabel yang dihasilkan oleh Rifaskes 2011, 80 sesuai dengan hasil validasi yang dilakukan oleh ketiga Universitas tersebut diatas.

BAB VI

SARAN-SARAN

1. Perlu dilakukan analisis lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh Rifaskes Puskesmas 2011, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, jelas sudah diketahui semua permasalahan dan kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas. Dengan demikian intervensi dan perbaikan pada unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas telah tergambarkan secara jelas dan gamblang tanpa harus membuat intervensi baru.
3. Perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hasil Rifaskes 2011 untuk masukan perencanaan kesehatan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu sebaiknya ada perencanaan yang terpadu didalam penggunaan dana yang sudah tersedia,baik Dana Dekonsentrasi, DAK, DAU, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan BLN.
4. Untuk perencanaan Provinsi perlu memprioritaskan masalah-masalah input dan proses yang ditemukan dari hasil data Rifaskes 2011 sehingga spesifikasi daerah bisa nampak dan efisiensi penggunaan dana bisa terjadi. Prioritas input dan proses ini akan lebih baik lagi apabila dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota.
5. Secara horisontal di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, perencanaan program-program Puskesmas tidak mungkin sempurna apabila tidak dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan terintegrasi antar Ditjen, Bidang dan unsur-unsur terkait yang kewenangannya secara berbeda-beda ada pada mereka, namun berhubungan erat sekali dengan program kesehatan prioritas.
6. Secara vertikal perlu kejelasan dan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap kewenangan dan fungsi masing-masing level didalam pelaksanaan program-program kesehatan prioritas dengan integritas yang tinggi.
7. Khusus untuk pencapaian MDG's, perlu diprioritaskan, ditekankan, dan diperkuat program PONED di seluruh Indonesia, terutama daerah DTPK.
8. Pemenuhan dan pengembangan input dan proses upaya Puskesmas yang menunjang ke tiga fungsi utama Puskesmas yaitu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan perlu mendapatkan prioritas tinggi.
9. Kesenjangan geografi, perdesaan/perkotaan dari input dan proses upaya kesehatan Puskesmas harus segera dipikirkan pemecahannya dengan meningkatkan integritas dan kejelasan pembagian peran antara Kementerian Kesehatan, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota.

10. Untuk kepentingan persiapan BPJS, maka sudah jelas bahwa dari hasil Rifaskes Puskesmas 2011, perlu segera memperbaiki atau memenuhi kekurangan unsur input dan proses upaya kesehatan Puskesmas dengan segera pada tahun 2013 seoptimal mungkin. Tanpa hal ini dilaksanakan, maka akan diragukan keberhasilan pelaksanaan BPJS yang akan dimulai pada tahun 2014 mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengisian Kuesioner Puskesmas Riset Fasilitas Kesehatan, 2011

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia (Riskesdas), 2007

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 2010*, 2010

Blum, H.L. *Planning for Health*, 2nd Edition. Human Sciences Press, 1981

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, 2009

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, 2008

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, 2008

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil, 2007

Donabedian, Avedis. *Explorations in Quality Assessment and Monitoring. Vol I. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment, 1980; Vol.II. The Criteria and Standards of Quality. 1982; Vol. III The Methods and Findings of Quality Assessment and Monitoring: An Illustrated Analysis. Ann Arbor: Health Administration Press, 1985.*

Jakab, M., Preker, A., Harding, A. and Hawkins, L. *The Introduction of Market Forces in The Public Hospital Sector*. From New Public Sector Management to Organizational Reform. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper, the World Bank, 2002

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/2010 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-1014, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, 2010

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, 2010

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2007

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 2010

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM
RIFASKES 2011
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN

KUESIONER
RIFASKES PUSKESMAS 2011